

**PERKEMBANGAN ISU GENDER  
DALAM PROGRAM PENGOLAHAN DAN PENGALIHAN  
SALAH PENGEMBANGAN BANGUNAN PEREMPUN**

**OLEH:**

**Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc.**

**Dr. Ir. Ma'mun Sarma, MS, M.Ec.**

**Ir. Istiqlaliyah Muflikhati, MS**

**Tin Herawati, SP., M.Si.**

**Kementerian Pemberdayaan Perempuan  
Republik Indonesia  
2007**

# DAFTAR ISI

	Halaman
PENDAHULUAN .....	1
Latar Belakang .....	1
Tujuan Penulisan Buku.....	3
Sasaran Pengguna Buku.....	4
<i>Output</i> dan <i>Outcome</i> yang Diharapkan.....	4
Landasan Hukum dan Pemikiran Rasional.....	4
SEPINTAS MENGENAI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....	14
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri- Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).....	14
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK).....	17
MEKANISME PENGINTEGRASIAN ISU GENDER KE DALAM KELEMBAGAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN.....	23
MEKANISME PENGINTEGRASIAN ISU GENDER KE DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN.....	34
Contoh Pengintegrasian Pengelolaan Program PNPM Mandiri-P2KP.....	34
Mekanisme Kerja Pengintegrasian Isu Gender ke dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PPNPM-PPK).....	44
KONDISI PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH.....	48
PENUTUP.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	58

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1a. Pelaku PNPM-PPK di Desa.....	26
Tabel 1b. Pelaku PNPM-PPK di Kecamatan.....	27
Tabel 1c. Pelaku PNPM-PPK di Kabupaten.....	28
Tabel 1d. Pelaku PNPM-PPK Lainnya.....	29
Tabel 2a. Rekapitulasi Tahapan Integrasi Isu Gender ke Dalam Tahapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)- Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Lokasi Lama.....	34
Tabel 2b. Rekapitulasi Integrasi Isu Gender ke Dalam Tahapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)- Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Lokasi Baru....	38
Tabel 4.a. Isu gender dalam Pengembangan PNPM-PPK.....	49
Tabel 4.b. Cara Mencapai Tujuan Program Penanggulangan Kemiskinan dengan Metode Responsif Gender ( <i>Participatory</i> ).....	53

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pengintegrasikan Isu Gender Ke Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Perempuan.....	6
Gambar 2. Landasan Rasional Strategi Penurunan Tingkat Kemiskinan Berperspektif Gender Melalui Pengembangan Ekonomi Perempuan.....	10
Gambar 3a. Struktur Kelembagaan PNPM Mandiri-P2KP.....	24
Gambar 3b. Struktur Manajemen Program Pengembangan Kecamatan (PPK).....	25
Gambar 3c. Aliran Dana Budget Program Pengembangan Kecamatan (PPK).....	32
Gambar 3d. Garis Besar Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan yang Responsif Gender.....	33
Gambar 4a. Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri P2KP di Lokasi Lama (Sumber: PNPM Mandiri -P2KP. 2007).....	31
Gambar 4b. Integrasi Isu-Isu Gender ke Dalam Tahapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)- Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Lokasi Lama .....	32
Gambar 5a. Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri P2KP di Lokasi Baru (Sumber: PNPM Mandiri -P2KP. 2007).....	40
Gambar 5b. Integrasi Isu-Isu Gender ke Dalam Tahapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)- Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Lokasi Baru .....	41
Gambar 6a. Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri P2KP Tingkat Kota/ Kabupaten.....	42

<b>Gambar 6b. Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri P2KP Tingkat Kota/ Kabupaten yang Responsif Gender (Secara detail dapat mengacu pada Lampiran 4).....</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 7a. Siklus Aktivitas Program Pengembangan Kecamatan.....</b>	<b>46</b>
<b>Gambar 7b . Alur Tahapan PNPM-PPK.....</b>	<b>47</b>
<b>Gambar 8.a. Isu gender dalam Usaha Kecil Mikro (UKM).....</b>	<b>50</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Target Millenium Development Goals (MDGs).....	59
Lampiran 2. Pengertian Istilah-Istilah Berkaitan dengan Gender.....	60
Lampiran 3. Proses Integrasi Isu Gender ke Dalam Tahapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)- Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Pada Lokasi Baru dan Lokasi Lama.....	62
Lampiran 4. Mekanisme Pengintegrasian Isu Gender ke Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK)....	81
Lampiran 5. Daftar Istilah dan Singkatan.....	89
Lampiran 6. Perkuatan Perempuan dalam Pengembangan Ekonomi Keluarga di Bidang Pekerjaan <i>On-Farm</i> , <i>Off-farm</i> dan <i>Non-Farm</i> .....	93

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur atas hidayahNya dan karuniaNya, maka buku "PENGINTEGRASIAN ISU GENDER DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI PEREMPUAN" akhirnya selesai tersusun. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan-Republik Indonesia atas kesempatan yang diberikan untuk menyusun buku ini.

Tujuan penyusunan buku "Pengintegrasian Isu Gender dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Perempuan" adalah untuk:

1. Memberikan acuan bagi para pengambil kebijakan di daerah dalam menyusun kebijakan, strategi, program dan Rencana Aksi Daerah dalam rangka implementasi kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan terlebih dahulu dimulai dari penyediaan sajian informasi dan analisis yang komprehensif dan terpilah tentang akses, kontrol, manfaat dan partisipasi warga negara laki-laki dan perempuan
2. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menerapkan model pembangunan partisipatif yang responsif gender yang diawali dengan peningkatan pemahaman melalui penyamaan persepsi (*meeting of mind*) mengenai permasalahan kemiskinan yang berkaitan dengan kesenjangan gender pada berbagai aspek .
3. Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat yang responsif gender di daerah untuk mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dalam rangka peningkatan GDI dan pencapaian sasaran MDGs yang dilandasi oleh pengembangan potensinya perempuan dalam berkontribusi di pembangunan sektor ekonomi.

Sasaran pengguna buku ini adalah:

1. Para pengambil kebijakan mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota mencakup Badan Perencana Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Dinas/SKPD, dan para anggota legislatif.
2. Para penyuluh/ pelatih/ pendamping masyarakat
3. Pemangku Kepentingan di semua tingkatan masyarakat.

*Output* yang dihasilkan adalah berupa buku yang menjelaskan langkah-langkah pengintegrasian isu gender dalam penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi perempuan. Buku penjelasan ini berisi instrumen-instrumen mengenai mekanisme pengintegrasian isu gender ke dalam program penanggulangan kemiskinan, isu gender dalam program-program berbasis pertanian, dan instrumen untuk pemberdayaan perempuan dalam mengelola keuangan keluarga, mengelola waktu dan pekerjaan rumah tangga.

*Outcome* yang diharapkan adalah dapat memberikan penjelasan bagi para pengambil kebijakan di daerah dalam menyusun kebijakan, strategi, program dan Rencana Aksi, dapat meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menerapkan model pembangunan partisipatif yang responsif gender, dan akhirnya dapat mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat yang responsif gender di daerah untuk mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis memohon maaf atas belum sempurnanya buku ini baik substansi maupun format penulisan. Penulis dengan hati terbuka menerima saran, masukan, dan kritik demi penyempurnaan penulisan buku ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih pada semua pihak pengguna buku ini.

PENULIS  
Desember 2007



# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Dua era besar sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat ini, yaitu era desentralisasi atau otonomi daerah dan era globalisasi total yang akan terjadi pada tahun 2020 mendatang. Disamping menghadapi dua tantangan besar tersebut, Bangsa Indonesia juga menghadapi dampak krisis ekonomi nasional yang berkepanjangan. Perubahan era dan krisis ekonomi ini telah berpengaruh secara multi dimensi pada tatanan kehidupan masyarakat baik dari tahapan makro, meso, dan mikro. Krisis ekonomi itu sendiri berdampak pada peningkatan masalah keluarga dan generasi muda Indonesia, seperti masalah kemiskinan, degradasi atau kemerosotan moral generasi muda, dan kaburnya identitas Bangsa Indonesia. Transisi atau perubahan nilai-nilai individu telah mengancam keberadaan nilai-nilai leluhur Bangsa Indonesia seperti menipisnya nilai gotong-royong, sopan santun dan rasa hormat serta kasih sayang terhadap sesama, serta lebih mengorbankan harga diri dan prinsip hidup demi kepentingan material dan sebagainya.

Sejalan dengan globalisasi ekonomi, terdapat komitmen internasional tentang delapan tujuan utama yang akan dicapai sesuai dengan target pada *Millenium Development Goals (MDGs)* sampai dengan tahun 2015, yaitu: (1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan, (2) Mewujudkan pendidikan dasar, (3) Meningkatkan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) Mengurangi angka kematian bayi, (5) Meningkatkan kesehatan ibu, (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, (7) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan (8) Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan (Target *MGDs* ada di Lampiran 1).

Merujuk pada tujuan internasional di atas, maka Visi Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009 diarahkan untuk mencapai (1) Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai, (2) Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia, dan (3) Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya berdasarkan Visi Pembangunan Nasional tersebut ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009, meliputi: (1) Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai, (2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, dan (3) Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera. Strategi Pembangunan Indonesia diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Hak-hak dasar rakyat dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan, rasa takut, dan kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapatnya memperoleh prioritas untuk diwujudkan (RPJM, tahun 2004-2009).

Berkaitan dengan tujuan pembangunan di atas, peran gender dalam Pembangunan Nasional sangat diakui baik secara eksplisit maupun implisit dan tertuang dalam kebijakan pemerintah. Indikator pembangunan gender dan sumberdaya manusia diperkenalkan sejak 1990, oleh UNDP (*United Nations Development Program*) melalui laporan berkalaanya "*Human Development Report (HRD)*", yaitu HDI (*Human Development Index*) yang mengukur tiga aspek yaitu *Life expectancy*, *Infant Mortality Rate*, dan *Food Security*. Sejak 1995, ditambah lagi konsep kesetaraan gender (*gender equality*), yang terdiri atas: (1) GDI (*Gender Development Index*) yaitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan, dan jumlah pendapatan, dan (2) GEM (*Gender Empowerment Measure*) yang mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan beberapa sektor lainnya.

Secara aktual, masih banyak penduduk Indonesia yang tergolong dalam kategori miskin, dan sebagian besar dari jumlah tersebut berada di perdesaan. Fenomena kemiskinan di Indonesia semakin dirasakan peningkatannya baik kuantitas maupun kualitasnya setelah krisis ekonomi nasional sejak pertengahan tahun 1998. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Berdasarkan ukuran ekonomi (umumnya dihitung dari konsumsi pangan dan non-pangan), indikator nasional untuk Indonesia dalam menentukan penduduk miskin adalah berdasarkan garis kemiskinan tahun 2006 adalah Rp. 152.847/bulan/orang atau setara dengan PPP (*Parity Purchasing Power*) USD1,55/hari/orang. Permasalahan utama pembangunan di Indonesia adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin. Berdasarkan Statistik makro, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan meningkat dari 35,1 juta (15,97%) pada tahun 2005 menjadi 39,05 juta (17,75%) pada tahun 2006 (BPS, Maret 2006). Adapun berdasarkan Statistik mikro, jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin) pada tahun 2005 adalah 19,1 juta, terdiri atas 3,8 juta sangat miskin, 8,2 juta miskin, dan 6,9 juta dekat/ hampir miskin.

Sehubungan dengan masalah kemiskinan ini, Pemerintah Indonesia telah banyak melaksanakan program untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan berbagai strategi dan pendekatan. Dalam mewujudkan target MGDs, Pemerintah Indonesia mengupayakan harmonisasi program-program pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yaitu gerakan nasional yang menjadi kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

PNPM Mandiri ini adalah program diharapkan dapat memperbaiki program-program terdahulu yang pada umumnya berupa pemberian permodalan dan pembangunan infrastruktur yang padat karya dan cenderung pada pelaku ekonomi secara umum saja. Sebagai hasil dari strategi penyusunan program yang cenderung sektoral tersebut, maka hasilnya ternyata masih belum menyentuh akar permasalahan penyebab kemiskinan yang salah satunya bermuara ke masalah kesenjangan gender. Masalah rendahnya produktivitas perempuan dalam pengembangan ekonomi keluarga sama sekali belum disentuh secara mendetil dan berkesinambungan. Untuk merealisasikan program yang dapat menyentuh permasalahan kesenjangan gender serta memberikan penekanan pada pengembangan ekonomi keluarga, maka diperlukan suatu strategi tertentu yang memerlukan pemetaan tentang perkembangan gender dan cara yang arif dalam

mensosialisasikan pada masyarakat. Apabila strategi penurunan tingkat kemiskinan berperspektif gender dapat disusun dengan baik melalui pengembangan ekonomi perempuan berbasis kehidupan masyarakat perdesaan, maka diharapkan hasilnya akan lebih baik dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan strategi yang dilaksanakan sebelumnya.

Sangat diyakini bahwa kunci keberhasilan menghadapi masalah kemiskinan dan sekaligus menghadapi dua tantangan Bangsa Indonesia, yaitu globalisasi dan desentralisasi di atas, adalah dengan mempersiapkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) Indonesia yang paripurna, handal dan berbudaya dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan pembentukan SDM yang handal dan memperkuat kegiatan ekonomi di perdesaan dalam menurunkan jumlah keluarga miskin, maka diperlukan suatu panduan yang mengarah pada pengintegrasian isu-isu gender dalam penanggulangan kemiskinan, terutama pada PNPM Mandiri. Tulisan ini menyusun suatu **“Pengintegrasian Isu Gender dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Perempuan”** yang diperlukan bagi para pengambil kebijakan, para penyuluh/pelatih/pendamping masyarakat dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

### **Tujuan Penulisan Buku**

Tujuan penyusunan buku **“Pengintegrasian Isu Gender dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Perempuan”** adalah untuk:

1. Memberikan acuan bagi para pengambil kebijakan di daerah dalam menyusun kebijakan, strategi, program dan Rencana Aksi Daerah dalam rangka implementasi kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan terlebih dahulu dimulai dari penyediaan sajian informasi dan analisis yang komprehensif dan terpilah tentang akses, kontrol, manfaat dan partisipasi warga negara laki-laki dan perempuan.
2. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menerapkan model pembangunan partisipatif yang responsif gender yang diawali dengan peningkatan pemahaman melalui penyamaan persepsi (*meeting of mind*) mengenai permasalahan kemiskinan yang berkaitan dengan kesenjangan gender pada berbagai aspek .
3. Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat yang responsif gender di daerah untuk mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dalam rangka peningkatan GDI dan pencapaian sasaran MDGs yang dilandasi oleh pengembangan potensinya perempuan dalam berkontribusi di pembangunan sektor ekonomi.

## **Sasaran Pengguna Buku**

Sasaran pengguna buku “**Pengintegrasian Isu Gender dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Perempuan**” adalah:

1. Para pengambil kebijakan mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota mencakup Badan Perencana Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Dinas/SKPD, dan para anggota legislatif.
2. Para penyuluh/ pelatih/ pendamping masyarakat
3. Pemangku Kepentingan di semua tingkatan masyarakat.

## **Output dan Outcome yang Diharapkan**

*Output* yang dihasilkan adalah berupa buku yang menjelaskan langkah-langkah pengintegrasian isu gender dalam penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi perempuan. Buku penjelasan ini berisi instrumen-instrumen mengenai mekanisme pengintegrasian isu gender ke dalam program penanggulangan kemiskinan, isu gender dalam program-program berbasis pertanian, dan instrumen untuk pemberdayaan perempuan dalam mengelola keuangan keluarga, mengelola waktu dan pekerjaan rumah tangga.

*Outcome* yang diharapkan adalah dapat memberikan penjelasan bagi para pengambil kebijakan di daerah dalam menyusun kebijakan, strategi, program dan Rencana Aksi, dapat meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menerapkan model pembangunan partisipatif yang responsif gender, dan akhirnya dapat mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat yang responsif gender di daerah untuk mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan.

## **Landasan Hukum dan Pemikiran Rasional**

### **Landasan Hukum**

Landasan Hukum yang digunakan dalam melaksanakan “**Pengintegrasian Isu Gender dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Perempuan**” adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18A, 18B, 27, 28, 28A, 28C, 28F, 28H, 33, dan 34.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277).
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, yang menginstruksikan kepada setiap pejabat negara, termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan PUG.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/ Jasa Pemerintah.
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4455).
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
15. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan pada tanggal 7 Desember 2001 yang kemudian dilengkapi dengan Keputusan presiden Nomor 8 Tahun 2002.
16. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Republik Indonesia Tahun 2004-2009 yang disebutkan pada, Bab 12, Bagian b (1), tentang "Terjaminnya Keadilan Gender dalam berbagai Perundangan, Program Pembangunan, dan Kebijakan Publik".
18. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Menteri Negara.
19. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73/ 2005 Tentang Kelurahan.
20. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
21. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577).

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/ atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4597).
24. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 005/MPPN/06/2006 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/ Hibah Luar Negeri.
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
27. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 58 Tahun 2004 Tentang Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan.
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor P.01/MENEG.PP/V/ 2005 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
30. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
31. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

### **Landasan Pemikiran Rasional**

Permasalahan keluarga yang ada saat ini didominasi oleh adanya masalah sosial ekonomi (*social economics problems*) atau kemiskinan yang mengakibatkan masalah keluarga lainnya seperti perceraian, konflik antar anggota keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, kenakalan remaja, dan lain-lain. Pembangunan ekonomi nasional selama ini masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas. Indikator utamanya adalah tingginya ketimpangan dan kemiskinan. Ketimpangan gender yang masih terjadi di Indonesia diantaranya ada pada pasar kerja, yaitu adanya akses perempuan terhadap kesempatan yang mendatangkan pendapatan lebih rendah daripada akses lelaki. Perempuan lebih kecil kemungkinannya untuk bekerja, dan sebaliknya lebih besar kemungkinannya untuk tidak dipekerjakan. Perempuan cenderung mendapatkan upah lebih kecil daripada lelaki.

Rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat terlihat pula dari masih meluasnya masalah kemiskinan. Selama kurun waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan menurun secara drastis dari mulai 40,1 persen menjadi 11,3 persen. Namun demikian, jumlah penduduk miskin meningkat setelah krisis ekonomi nasional sejak pertengahan Tahun 1997. Perkembangan penduduk miskin Indonesia adalah 37.3 juta (18.9%) pada tahun 2000, 37.1 juta (18.4%) pada tahun 2001, 38.4 juta (18.2%) pada tahun 2002, dan 37.3 juta (17.4%) pada tahun 2003. (Menkokesra, 2004). Pada tahun 2004 dan 2005 persentase penduduk miskin mengalami penurunan yaitu menjadi 16,7 % dan 16,0 %. Namun menurut BPS (2007), penduduk miskin pada tahun 2006 meningkat lagi menjadi 17,8%.

Angka kemiskinan ini akan lebih besar lagi jika dalam kategori kemiskinan dimasukkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang kini jumlahnya mencapai lebih dari 21 juta orang. PMKS meliputi gelandangan, pengemis, anak jalanan, yatim piatu, jompo terlantar, dan penyandang cacat yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum kondisi PMKS lebih memprihatinkan ketimbang orang miskin. Selain memiliki kekurangan pangan, sandang dan papan, kelompok rentan (*vulnerable group*) ini mengalami pula ketelantaran psikologis, sosial dan politik (Suharto, 2004).

Saat ini, semakin banyak kelompok perempuan yang semakin kuat dan kompak, baik dari segi organisasi maupun produktivitas, untuk meningkatkan partisipasinya di sektor publik. Kelompok usaha ekonomi produktif perempuan ini akan dapat menyumbang kemajuan perekonomian daerah dengan signifikan. Untuk itu Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan telah menetapkan kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) sebagai upaya untuk meningkatkan pemenuhan hak ekonomi perempuan dengan melakukan koordinasi dan sinergi program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dari sektor-sektor terkait. Perempuan mempunyai hak untuk melaksanakan pemenuhan hak ekonomi sebagai salah satu kebutuhan dasar khususnya guna meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga di samping untuk menyetarakan posisi dan kondisi perempuan dengan laki-laki. Perempuan telah berperan serta dalam kegiatan ekonomi namun pada umumnya mereka masuk di sektor informal, sehingga kontribusi perempuan pengusaha mikro dan kecil sering tidak diperhitungkan (Swasono, 2005).

Menteri Pemberdayaan Perempuan mengajak seluruh unsur, sektor pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan perbankan untuk bersama-sama membina dan mengembangkan para perempuan pengusaha agar menjadi pengusaha yang tangguh yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap perekonomian nasional. Untuk itu, tanpa mengingkari adanya peran ganda perempuan, maka harus ada strategi penguatan perempuan dan sekaligus penguatan keluarga agar dapat mewujudkan kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat secara bersama-sama dengan mengedepankan kemitraan dan keharmonisan keluarga Indonesia. Dengan demikian semakin penting langkah-langkah untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam semua kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Sesuai dengan kesepakatan dunia tentang Delapan Tujuan Utama *Millenium Development Goals (MDGs)* (Lampiran 1), maka Indonesia telah mencanangkan berbagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan penduduk yang semakin terpuruk sejak adanya krisis ekonomi nasional yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Salah satu dari tujuan utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan suatu bangsa, yang dicerminkan dari *Gender Related Development Index (GDI)* dan *Gender Empowerment Measures (GEM)*.

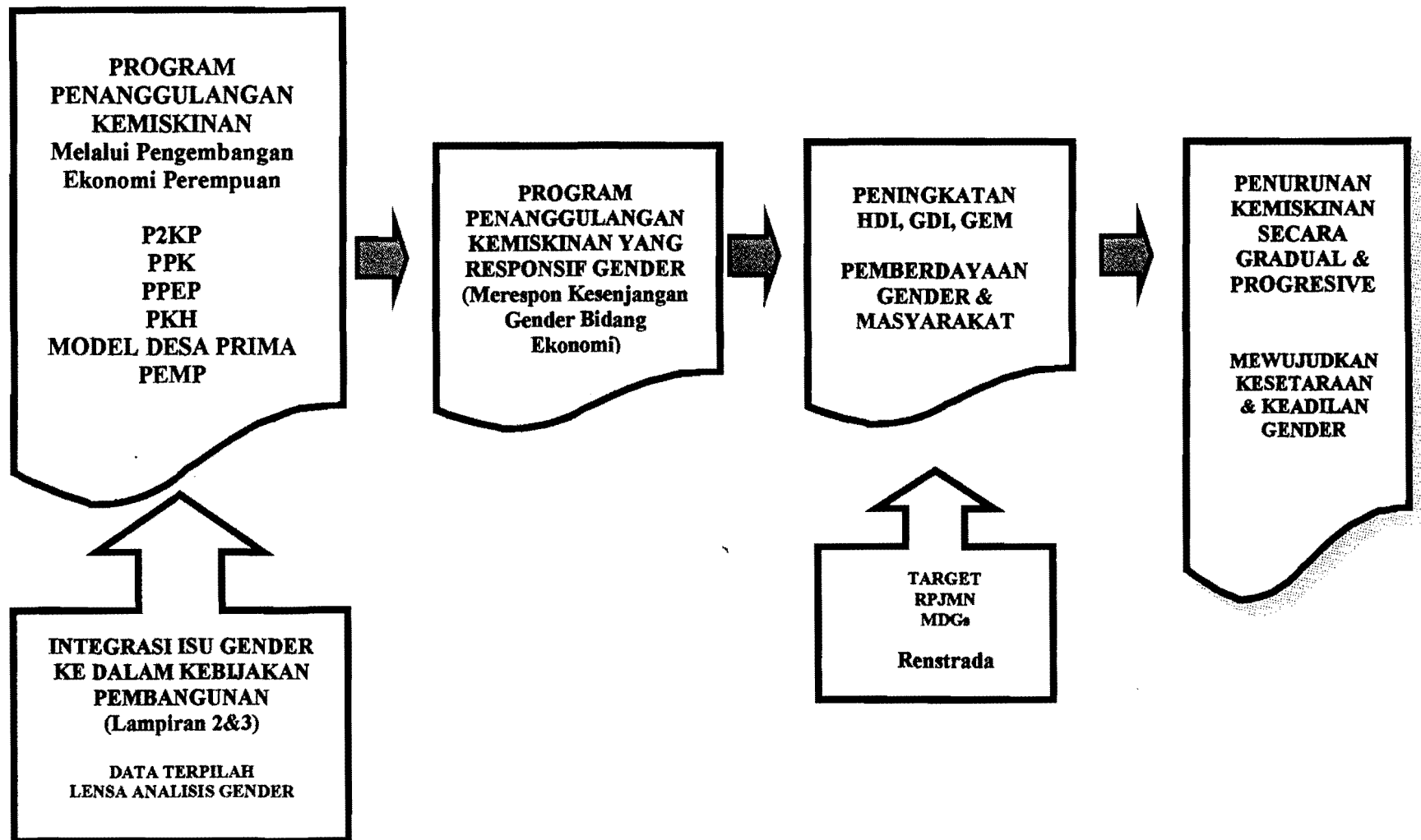
Gambar 1 menjelaskan "Kerangka Pemikiran Integrasi Isu Gender Ke Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Perempuan"

Dalam rangka mencapai pembangunan bangsa yang berkeadilan gender tersebut, maka perlu ada panduan untuk mengintegrasikan isu-isu gender dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dimulai dari pengembangan ekonomi perempuan. Pada saat ini sudah banyak program-program penanggulangan kemiskinan seperti P2KP, PPEP, PPK, MODEL DESA PRIMA, dan PEMP yang perlu dilakukan usaha pengintegrasian isu gender ke dalam semua kebijakan tersebut.

Adapun alasan rasional mengapa harus mengikutsertakan perspektif gender ke dalam program penanggulangan kemiskinan adalah dimulai dari adanya peran gender dalam keluarga yang menurut sejumlah ahli keluarga adalah sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya yang meliputi agama, psikologi, makan dan minum, dan sebagainya. Adapun tujuan membentuk keluarga adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggota keluarganya. Keluarga yang sejahtera diartikan sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan fisik dan mental yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga, dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya (Landis 1989; BKKBN 1992).

Secara umum sudah terjadi kemitraan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dengan tahapan kemitraan yang berbeda-beda dari satu keluarga ke keluarga lainnya, dari satu daerah ke daerah lainnya. Kemitraan gender ini tercermin dalam akses dan kontrol terhadap sumberdaya keluarga, meskipun belum tercapai kesetaraan yang sempurna. Namun demikian masih terjadi ketimpangan gender atau ketidakseimbangan kemitraan gender yang sempurna di masyarakat yang dibuktikan dengan minimnya perempuan menduduki pengurus organisasi ekonomi dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Organisasi perempuan yang ada umumnya adalah organisasi keagamaan dan perkumpulan sosial. Masih ditemui adanya kendala terhadap peran perempuan dalam berkontribusi pada kegiatan ekonomi dan sosial budaya. Belum terjadi keseimbangan peran yang sempurna antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan budaya masyarakat tradisional yang patriarki. Budaya tersebut menganggap bahwa laki-laki sebagai *a main/primary breadwinner*, dan perempuan sebagai *a secondary breadwinner*.





Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pengintegrasikan Isu Gender Ke Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Perempuan

Berdasarkan kenyataan yang diuraikan di atas, Gambar 2 menjelaskan landasan rasional tentang "Strategi Penurunan Tingkat Kemiskinan Berperspektif Gender Melalui Pengembangan Ekonomi Perempuan" sebagai berikut:

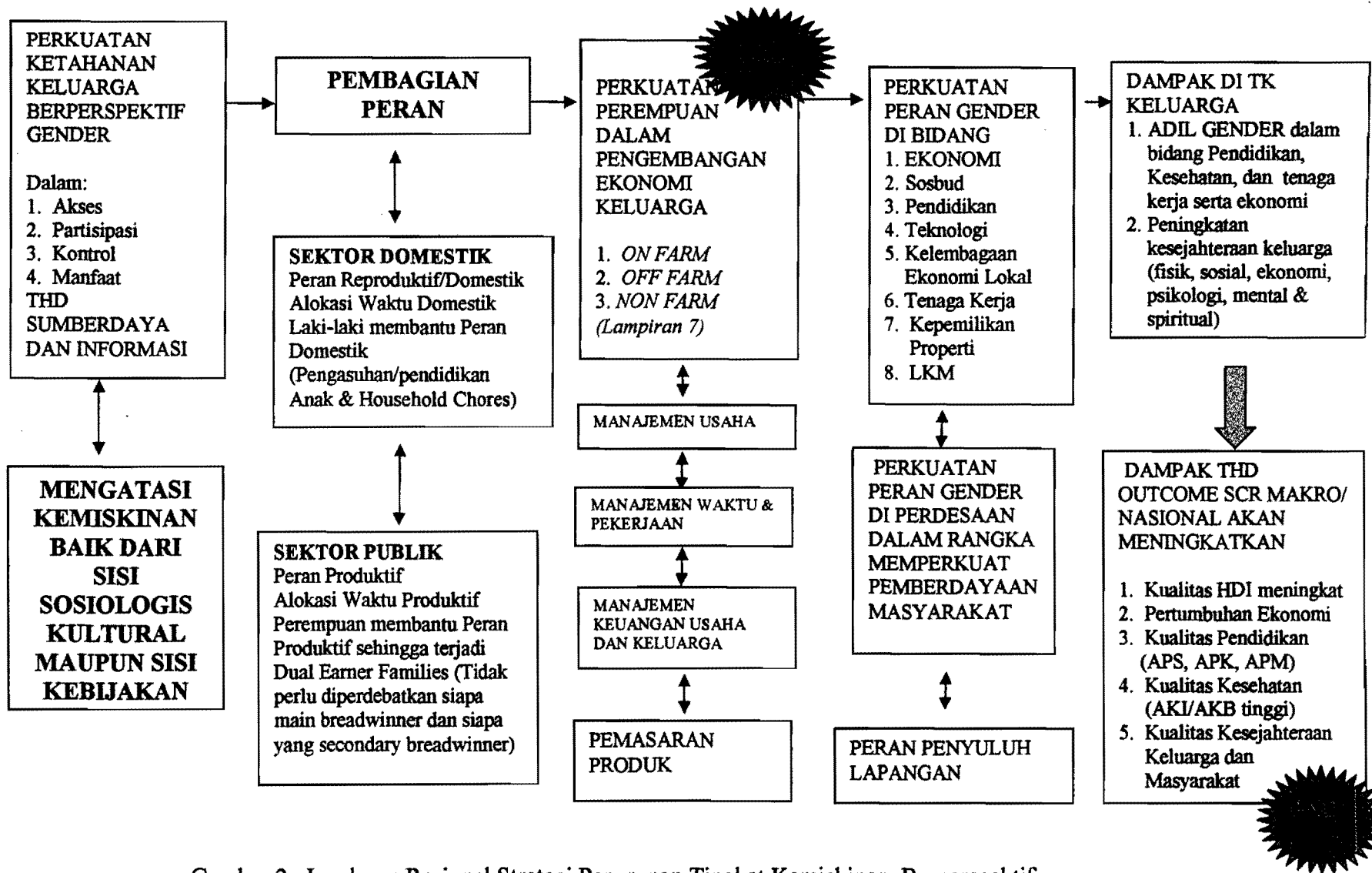
1. Pemikiran yang rasional diawali dari konsep keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dan sebagai insitusi utama dan pertama bagi pendidikan anak. Perkuatan ketahanan keluarga berperspektif gender didasari pada kesetaraan dan keadilan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap penggunaan sumberdaya dan memperoleh informasi untuk mencapai kesejahteraan keluarga.
2. Perkuatan ketahanan keluarga berperspektif gender ini dinilai paling cocok pada kondisi saat ini untuk mengatasi kemiskinan baik dari sisi sosiologis kultural maupun sisi kebijakan. Untuk mengatasi kesenjangan gender yang terjadi di tingkat keluarga dan masyarakat, maka harus melakukan pendekatan dari sisi sosiologis kultural secara bijak dan gradual berkaitan dengan pembagian peran gender dalam berbagai aktivitas baik publik maupun domestik serta sosial kemasyarakatan. Peran gender di sektor domestik melibatkan peran reproduktif/ domestik yang menyangkut aktivitas manajemen sumberdaya keluarga (materi, non materi dan waktu, pekerjaan dan keuangan), misalnya laki-laki membantu peran domestik dalam pengasuhan/ pendidikan Anak dan *Household Chores*.
3. Perkuatan ketahanan keluarga berperspektif gender menyangkut peran gender pada berbagai aktivitas termasuk di sektor publik yang memerlukan alokasi waktu produktif yang melibatkan peran produktif perempuan sehingga terjadi *Dual Earner Families* (Tidak perlu diperdebatkan siapa *a main breadwinner* dan siapa *yang a secondary breadwinner*).
4. Perkuatan perempuan dalam pengembangan ekonomi keluarga baik pada *on farm, off farm*, formal, maupun non formal merupakan **ENTRY POINT** untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara umum (pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan) agar keluar dari lingkaran kemiskinan melalui manajemen usaha, manajemen waktu dan pekerjaan, manajemen keuangan usaha dan keluarga, serta pemasaran produk.
5. Selanjutnya, di tingkat keluarga dilakukan perkuatan peran gender di segala bidang yang diawali dari perkuatan peran ekonomi, kemudian sosial budaya, pendidikan, penguasaan teknologi, perkuatan peran perempuan pada kelembagaan ekonomi lokal, tenaga kerja, dan kepemilikan properti serta keterlibatan pada lembaga keuangan mikro.
6. Perkuatan peran gender di tingkat keluarga ini diharapkan berdampak pada perkuatan peran gender di perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di segala bidang. Pemberdayaan ini tentu saja akan terwujud apabila peran para petugas penyuluh lapangan bekerja maksimal dalam melakukan pendampingan pada masyarakat.

Perkuatan gender di tingkat keluarga diharapkan berdampak pada keadaan ADIL GENDER dalam bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan ekonomi, serta pada peningkatan kesejahteraan keluarga (fisik, sosial, ekonomi, psikologi, mental dan spiritual).

Perkuatan gender di tingkat keluarga diharapkan berdampak pada *outcome* secara makro/nasional, yaitu meningkatkan kualitas *Human Development Index* (HDI); pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan (APS, APK, APM), kualitas kesehatan (AKI/AKB), dan kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat .

Oleh karena itu konsep gender dan keluarga tidak dapat dipisahkan, keduanya saling berkaitan secara kausal. Dengan demikian perlu adanya “Gender Awareness dalam Keluarga” dengan mempertahankan keutuhan keluarga sebagai suatu sistem yang saling terkait satu dengan lainnya. Adapun strategi dan dinamika pemberdayaan gender ada tahapan individu, keluarga, dan masyarakat dapat dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan keadaan lokal dengan mempertimbangkan *local wisdom*, *endogenous knowledge*, dan norma serta adat setempat. Namun demikian, nilai-nilai atau norma-norma yang kurang sesuai dengan perkembangan jaman, dapat dilakukan modifikasi perubahan sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat, khususnya yang berkaitan dengan akses perempuan pada pendidikan dan peningkatan pengetahuan serta pada informasi pekerjaan.

Akhirnya, karakteristik kehidupan baik di perkotaan maupun di perdesaan merupakan landasan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi berperspektif gender dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam mencapai tujuan tersebut, langkah pertama adalah melakukan transformasi keadaan dari keadaan saat ini yang bermasalah menuju keadaan masa datang yang diinginkan melalui pendampingan masyarakat. Penggunaan istilah-istilah gender disajikan pada Lampiran 2.



Gambar 2. Landasan Rasional Strategi Penurunan Tingkat Kemiskinan Berperspektif Gender Melalui Pengembangan Ekonomi Perempuan.

## Landasan Kebijakan Nasional

Landasan Kebijakan Nasional digunakan dalam melaksanakan “Pengintegrasian Gender dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Perempuan” adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Republik Indonesia Tahun 2004-2009 yang secara spesifik disebutkan pada Bab 12, Bagian b (1), tentang “Terjaminnya Keadilan Gender dalam berbagai Perundangan, Program Pembangunan, dan Kebijakan Publik”.

Dijelaskan dalam RPJMN Bab 12 bahwa dengan adanya kondisi yang bersifat kultural (terkait dengan nilai-nilai budaya patriarkal) dan sekaligus bersifat struktural (dimapankan oleh tatanan sosial politik yang ada) tersebut, maka diperlukan tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan. Untuk itu, diperlukan kemauan politik yang kuat agar semua kebijakan dan program pembangunan memperhitungkan kesetaraan dan keadilan gender, serta peduli anak. Prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
  - b. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan;
  - c. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - d. Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga;
  - e. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
  - f. Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
2. Dokumen-1 PRSP (*Interim Poverty Reduction Strategy Paper*) sebagai panduan bagi penyusunan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang dikeluarkan dan disahkan pada Bulan Januari 2003 oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan. SNPK merupakan cara-cara dan tahapan sistematis yang harus ditempuh dan dijalankan oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan berbagai pihak dalam upaya mendorong gerakan nasional penanggulangan kemiskinan. Tujuan SNPK adalah:
    - a. Menegaskan komitmen lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat,

- organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, lembaga internasional, dan pihak yang peduli untuk memecahkan masalah kemiskinan.
- b. Membangun konsensus bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar dan pendekatan partisipatif dalam perumusan strategi dan kebijakan.
  - c. Mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, lembaga internasional, dan pihak yang peduli, dan
  - d. Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals*) terutama tujuan penanggulangan kemiskinan.

Dokumen-1 PRSP mencantumkan "Kebijakan Perwujudan Keadilan dan Kesetaraan Gender" dengan tujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan baik di ruang domestik maupun publik, dan menjamin kesamaan hak perempuan dalam pengambilan keputusan, memperoleh pelayanan publik, dan mencapai kesejahteraan sosial. Kebijakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender adalah:

- a. Mendorong pengarusutamaan gender di kalangan pemerintah dan masyarakat.
- b. Memperkuat lembaga dan organisasi perempuan.
- c. Memperkuat pelayanan publik yang berkeadilan gender.
- d. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan baik di sektor publik maupun domestik.
- e. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Dokumen-1 PRSP juga mencantumkan adanya kebijakan "Pengarusutamaan" dalam strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga yang diarahkan secara tajam pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin; dikelola dengan baik agar tidak menciptakan hambatan dan beban baru bagi masyarakat miskin, tidak menciptakan ketergantungan masyarakat miskin dan tidak mematikan inisiatif yang telah dilakukan oleh berbagai pihak oleh kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat maupun pelaku usaha.

3. PNPM Mandiri-P2KP yang dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan peningkatan peran pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara mandiri dengan tujuan:
  - a. Mewujudkan masyarakat "Berdaya dan Mandiri" yang mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan di wilayahnya, sejalan dengan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

- b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menerapkan model pembangunan partisipatif yang berbasis kemitraan dengan masyarakat dan kelompok peduli setempat.
  - c. Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi penanggulangan kemiskinan.
  - d. Meningkatkan capaian manfaat bagi masyarakat miskin untuk mendorong peningkatan IPM dan pencapaian sasaran MDGs.
4. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan suatu program nasional Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, memperkuat pemerintah daerah dan institusi masyarakat serta memperbaiki tata kelola pemerintah local (*local governance*). PPK dimulai pada tahun 1998 dimana terjadi pergantian kepemimpinan politik dan krisis ekonomi nasional. Saat ini PPK merupakan pelaksanaan fase ke-3 dan akan berjalan sampai dengan tahun 2009. Sejak Tahun 1998 sampai dengan Juli 2005, PPK sudah mencakup 30 dari 32 provinsi (94%); 260 dari 440 (59%) kabupaten; 1.983 dari 5.073 kecamatan (39%); dan 34.233 dari 71.011 desa (48%) (BPS, 2004).
5. Kerangka Kebijakan Pemerintah dalam RKP 2008 dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan.

## **SEPINTAS MENGENAI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)**

### **Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri- Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)**

Dalam rangka peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, mulai tahun 2007 pemerintah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Mekanisme penanggulangan kemiskinan telah dirumuskan kembali melalui PNPM Mandiri yang secara langsung melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuhkembangkan sehingga masyarakat miskin menjadi subjek untuk dirinya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan bukan sebagai obyek.

PNPM Mandiri adalah gerakan nasional yang menjadi kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM diperlukan mengingat: (1) Banyaknya Kementerian/ lembaga (K/L) mempunyai kegiatan atas nama pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan (19 K/L dengan lebih dari 35 program) ◊ menimbulkan inefisiensi dan tumpang tindih kegiatan, (2) Ketidaktepatan pasar dalam pemerataan hasil pembangunan (alokasi sumber daya), (3) Sulitnya bagi pemerintah (pusat dan daerah) dalam menjangkau kelompok masyarakat miskin.

Tujuan umum PNPM adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Adapun tujuan utama PNPM adalah memberdayakan masyarakat, yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, agar mampu merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan. Tujuan khusus PNPM adalah:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang menggerak, representatif dan akuntabel.
3. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor).
4. Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengaktifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.



5. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
6. Meningkatkan modal social masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi social dan budaya serta untuk melestarikan kearifan local.
7. Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

PNPM Murni. Inti terdiri dari program/ proyek pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan yang mencakup: (1) PPK sebagai basis pemberdayaan masyarakat di perdesaan, (2) P2KP sebagai basis pemberdayaan masyarakat di perkotaan, (3) PISEW/RISE sebagai basis pengembangan daerah-daerah cepat tumbuh, dan (4) P2DTK/SPADA sebagai basis pengembangan daerah tertinggal dan khusus. Adapun komponen PNPM inti adalah BLM untuk berbagai kegiatan masyarakat, dan pendampingan, bantuan teknis, pelatihan serta peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah<sup>2)</sup>. PNPM-Penguatan terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu..

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Secara strategis, program ini menyiapkan kemandirian masyarakat berupa institusi kepemimpinan masyarakat yang representatif (disebut Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM), mengakar, dan menguat bagi perkembangan *social capital* masyarakat di masa datang dan menyiapkan kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat dan kelompok peduli setempat. Tujuan PNPM-Mandiri P2KP juga untuk mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi penanggulangan kemiskinan, dan untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat miskin untuk mendorong peningkatan IPM dan pencapaian sasaran MDGs<sup>16)</sup>.

Tiap BKM bersama masyarakat menyusun Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) secara partisipatif. Sejak pelaksanaan P2KP-hingga P2KP-3 telah terbentuk sekitar 6.405 BKM yang tersebar di 1.125 kecamatan di 235 kabupaten/ kota dan telah memunculkan lebih dari 291.000 relawan dari masyarakat setempat dan telah mencakup 18,9 juta orang pemanfaat penduduk miskin melalui 243.838 KSM.

Strategi dasar PNPM adalah mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dan menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan dan pembangunan partisipatif. Adapun strategi operasional PNPM adalah:

1. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis.
2. Menguatkan peran pemerintah kota/ kabupaten sebagai pengelola program-program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
3. Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan akuntabel.
4. Mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas.
5. Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya.
6. Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan dinamis serta berkelanjutan.

Prinsip dasar PNPM Mandiri meliputi: Bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, transparansi dan akuntabel, prioritas, kolaborasi, keberlanjutan, dan sederhana. Sedangkan pendekatan PNPM Mandiri adalah memperhatikan prinsip-prinsip program yang berbasis masyarakat dengan:

1. Menggunakan kecamatan sebagai lokus kegiatan.
2. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/ pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
3. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
4. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
5. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.

Komponen program meliputi:

1. Pengembangan masyarakat yang mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri atas pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai. Hal-hal yang disediakan adalah dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional pendampingan masyarakat, fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi.
2. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang merupakan sarana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal yang meliputi serangkaian kegiatan agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin, yang terdiri atas kegiatan seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan.

Ruang lingkup kegiatan PNPM meliputi:

1. Penyediaan dan perbaikan prasarana/ sarana lingkungan pemukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya.
2. Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin dengan perhatian yang diberikan lebih kepada kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini.
3. Kegiatan terkait dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs.
4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

### **Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK)**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program-Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, memperkuat institusi lokal, dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. PPK telah dimulai sejak Indonesia mengalami krisis multidimensi dan perubahan politik pada 1998. Melihat keberhasilannya, saat ini pemerintah mengadopsi mekanisme dan skema PPK dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Tujuan PNPM-PPK dicapai dengan meningkatkan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan desa atau antar desa, serta menyediakan sarana dan prasarana, serta kegiatan sosial dan ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat. Fase pertama PPK (PPK I) dimulai pada 1998/1999 sampai 2002, fase kedua (PPK II) dimulai pada 2003 dan berlangsung hingga 2006, sedang fase ketiga (PPK III) telah dimulai pada awal 2006. Melihat keberhasilan pelaksanaan program yang mengusung sistem pembangunan *bottom up planning* ini, Pemerintah Pusat bertekad untuk melanjutkan upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dalam skala yang lebih luas, salah satunya dengan menggunakan skema PPK. Upaya itu diawali dengan peluncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), per 1 September 2006.

Tujuan umum PNPM-PPK adalah mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintahan local, serta penyediaan prasarana sarana social dasar dan ekonomi. Tujuan khususnya meliputi peningkatan peranserta masyarakat terutama rumah tangga miskin dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;

melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal; mengembangkan kapasitas pemerintahan local dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia ini (terbesar karena cakupan wilayah, serapan dana, kegiatan yang dihasilkan dan jumlah pemanfaatnya), berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PMD), Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Pembiayaan program berasal dari alokasi APBN, dana hibah lembaga/ negara pemberi bantuan, serta pinjaman dari Bank Dunia. PPK menyediakan dana bantuan secara langsung bagi masyarakat (BLM) sekitar Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar per kecamatan, tergantung dari jumlah penduduk. PPK memusatkan kegiatannya pada masyarakat perdesaan Indonesia yang paling miskin. Masyarakat desa kemudian bersama-sama terlibat dalam proses perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber dana tersebut. Hal itu dilakukan atas dasar kebutuhan pembangunan dan prioritas yang ditentukan bersama dalam sejumlah forum musyawarah.

PNPM-PPK dilaksanakan di bawah Departemen Dalam Negeri (*Ministry of Home Affairs*), Kantor Pembangunan Masyarakat Desa /PMD (*Community Development Office*). Dana PPK berasal dari berbagai sumber yaitu dari Pemerintah Indonesia, dana bantuan, dan dana pinjaman dari World Bank. Departemen Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat mengelola PPK dan tim fasilitator dan konsultan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat nasional untuk melakukan bantuan teknis dan training.

PPK memberikan *block grants* ke masing-masing kecamatan dengan besar dana tergantung dari jumlah penduduk dengan total dana berkisar antara Rp 500 juta sampai dengan Rp 1,5 milyar ( US\$ 50,000 – 150,000). PPK difokuskan pada masyarakat pedesaan miskin dengan melibatkan masyarakat desa untuk ikut dalam perencanaan partisipatoris dan proses pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumberdaya ini sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya.

#### **Tahapan Kegiatan PNPM-PPK**

PNPM-PPK bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai tahapan kegiatan sebagai berikut (secara detil disajikan pada Lampiran 5):

- a. **Diseminasi Informasi dan Sosialisasi** tentang PPK dilakukan dalam beberapa cara. Lokakarya yang dilakukan pada tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa untuk menyebarkan informasi dan mempopulerkan program. Di setiap desa dilengkapi Papan Informasi sebagai salah satu media informasi bagi masyarakat. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait penyebaran informasi (media massa, NGO, akademisi, anggota dewan) menjadi bagian dalam kegiatan ini. Tahapan ini dapat diintegrasikan isu gender yang berkaitan dengan permasalahan kemiskinan dengan disertai analisis gender sebagai data pembuka wawasan.

- b. **Proses Perencanaan Partisipatif** di tingkat dusun, desa dan kecamatan. Masyarakat memilih fasilitator desa (FD) untuk mendampingi dalam proses sosialisasi dan perencanaan. FD mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa. Masyarakat kemudian menentukan pilihan terhadap jenis kegiatan pembangunan yang ingin didanai. PPK menyediakan tenaga konsultan sosial dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk membantu sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Tahapan ini dapat dilakukan pengintegrasian isu-isu gender, agar perencanaan program sudah responsif gender.
- c. **Seleksi Proyek di Tingkat Desa dan Kecamatan.** Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan yang akan didanai. Musyawarah terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan. Forum antardesa terdiri dari wakil-wakil dari desa yang akan membuat keputusan akhir mengenai proyek yang akan didanai. Pilihan proyek adalah *open menu* untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan.
- d. **Masyarakat Melaksanakan Proyek mereka.** Dalam pertemuan masyarakat memilih anggotanya untuk menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa-desa yang terdanai. Fasilitator Teknis PPK mendampingi TPK dalam mendisain prasarana, penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja umumnya berasal dari desa penerima manfaat.
- e. **Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan.** Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan dua kali dalam pertemuan terbuka di desa, yakni sebelum proyek mencairkan dana tahap berikutnya. Pada pertemuan akhir, TPK akan melakukan serah terima proyek kepada masyarakat, desa, dan Tim Pemelihara kegiatan.

Kunci utama PNPM-PPK adalah menjalankan prinsip-prinsip:

1. **Keberpihakan kepada orang miskin** dengan mendorong orang miskin untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan PNPM-PPK baik di desa maupun antar desa, termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya.
2. **Keberpihakan Pada Perempuan** sebagai salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan, PNPM-PPK mengharuskan adanya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada semua tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian. Kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan melalui pertemuan kelompok perempuan dan keikutsertaan wakil-wakil perempuan dalam berbagai forum pengambilan keputusan.

3. **Partisipasi/ Inclusion**, yaitu ditekankan pada partisipasi masyarakat, terutama kaum perempuan dan kaum miskin melalui pengambilan keputusan lokal oleh seluruh penduduk desa mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan PNPM-PPK dengan memberikan tenaga, pikiran, dana maupun barangnya.
4. **Desa Berpartisipasi** adalah seluruh desa di kecamatan penerima PNPM-PPK berhak ikut berpartisipasi dalam proses tahapan PNPM-PPK, untuk itu dituntut adanya kesiapan dari masyarakat desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM-PPK.
5. **Transparansi, pengambilan keputusan dan manajemen keuangan** harus terbuka dan dilaporkan kepada masyarakat dengan penekanan pada pembagian informasi (*information sharing*) pada seluruh siklus project. Masyarakat dan pelaku PNPM-PPK harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan PNPM-PPK serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.
6. **Open Menu**, yaitu penduduk desa dapat mengajukan aktivitas apapun, kecuali yang bersifat negatif.
7. **Dana yang Berkompetisi Sehat**, yaitu adanya pengajuan dana yang dikompetisikan secara terbuka dengan kompetisi yang sehat. Prinsip kompetisi sehat adalah memilih sesuatu sesuai yang menjadi prioritas dengan mempertimbangkan keberadaan sumberdaya yang tersedia sesuai dengan aspek penilaian yang disepakati.
8. **Desentralisasi**, yaitu adanya pengambilan keputusan dan manajemen yang terjadi pada tingkat lokal. Pengertian desentralisasi adalah masyarakat memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang luas untuk mengelola PNPM-PPK secara mandiri dan partisipatif tanpa intervensi negatif dari luar.
9. **Sederhana**, yaitu tidak adanya peraturan yang kompleks, hanya ada strategi dan metode yang sederhana saja.
10. **Akuntabilitas**, yaitu bahwa setiap pengelolaan kegiatan PNPM-PPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.
11. **Keberlanjutan** adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kehiatan harus mempertimbangkan pelestarian seluruh kegiatan PNPM-PPK.

#### Capaian PPK:

1. Perbaikan akses.

Perbaikan akses ke pasar, pusat kota, fasilitas pendidikan dan kesehatan, supply air bersih di 34.000 desa termiskin (hampir 50% dari total desa). PPK telah membiayai 104.000 infrastruktur, aktivitas sosial ekonomi diseluruh negara:

- 27.690 km pembangunan jalan atau upgrade.

- 6.040 buah pembangunan jembatan atau rekonstruksi
  - 6.740 unit pembangunan sistem irigasi
  - 6.565 unit pembangunan penyediaan air bersih
  - 2.660 unit pembangunan sanitasi
  - 1.760 unit pembangunan sekolah, penyediaan peralatan sekolah dan material
  - 61.100 orang beasiswa pendidikan
  - 1.450 unit pembangunan pos kesehatan desa.
2. Tingkat Pengembalian Tinggi (*High Rates of Return*).  
Berdasarkan suatu evaluasi ekonomi yang independen, *weighted internal rates of return* dari infrastruktur PPK berkisar antara 39 sampai 68%. Pada banyak hal, manfaat yang besar dari PPK berasal dari keseluruhan aktivitas ekonomi baru yang diakibatkan dari adanya pembangunan infrastruktur atau kapasitas produksi laten yang akhirnya dapat disalurkan ke pasar lokal.
3. Penghematan Biaya secara Signifikan  
Pembangunan infrastruktur desa melalui PPK, dengan metode pembiayaan PPK secara signifikan menghemat rata-rata 56% lebih murah (dengan pekerjaan yang setara baik kualitas maupun tingkatannya) dari pada pekerjaan yang dikontrakan oleh pemerintah/ Departemen.
4. Perluasan Kesempatan Kerja dan Tingkatan Kerja
- 37 juta hari kerja telah diciptakan melalui pekerjaan jangka pendek pada pekerjaan padat karya pembangunan infrastruktur.
  - Pembukaan lapangan kerja dan pelayanan transportasi dengan adanya jalan dan jembatan baru.
  - 650.000 penerima manfaat pinjaman dan enterpreneur yang berpartisipasi pada kredit PPK dan aktivitas bisnis.
5. Memberikan Dampak Signifikan pada Pengeluaran Rumahtangga Pedesaan. Hasil penelitian yang membandingkan antara kecamatan penerima PPK dan yang tidak menerima PPK menunjukkan bahwa kecamatan yang menerima PPK lebih lama, maka akan memberikan dampak yang lebih besar pada pengeluaran rumahtangganya.
6. Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan Daerah (*Local Governance*) melalui Penyusunan suatu model perencanaan dan keuangan yang partisipatori.
- Masyarakat Indonesia yang tinggal di 34.000 desa di seluruh negara berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang demokratis dan partisipatori dalam hal mengalokasikan dana pembangunan publik.
  - Sekitar 60% dari seluruh partisipan dalam pertemuan perencanaan PPK berasal dari masyarakat termiskin di desanya, dan 70% dari angkatan kerja untuk konstruksi infrastruktur berasal dari kelompok termiskin.

- Partisipasi perempuan dalam pertemuan dan aktivitas PPK berkisar antara 26 sampai 45%.
- Rata-rata nasional kontribusi masyarakat adalah 17% dengan berbagai variasi pada tingkat propinsi.
- Komitmen pemerintah daerah (Kabupaten) yang tinggi dalam menyediakan dana pendamping sebesar 40% pada PPK 2 dan pada PPK 3 seluruh kabupaten akan menyediakan seluruh dana dari budgetnya sendiri.
- Akuntabilitas pemerintah dan peran masyarakat sipil semakin kuat. Peran LSM dan Jurnalis di PPK sebagai pengawas dan pemantau independen. Sejak PPK berjalan, sudah 1.260 liputan baik broadcasting atau publikasi.

7. Tingkat Korupsi Rendah

Audit independen PPK oleh Moores Rowland menemukan kurang dari 1 persen proyek desa yang menyimpang.

**Monitoring Pelaksanaan Aktivitas dan Pengeluaran Dana**

1. Monitoring Partisipatori Masyarakat
2. Kelalaian Pemerintah (*Government Oversight*)
3. Kelalaian Konsultan (*Consultant Oversight*)
4. Mekanisme Penyelesaian Keluhan (*Grievance and Complaints Resolution Mechanism*)
5. Independen Civil Society Monitoring
6. Financial Reviews and Audits



- Partisipasi perempuan dalam pertemuan dan aktivitas PPK berkisar antara 26 sampai 45%.
- Rata-rata nasional kontribusi masyarakat adalah 17% dengan berbagai variasi pada tingkat propinsi.
- Komitmen pemerintah daerah (Kabupaten) yang tinggi dalam menyediakan dana pendamping sebesar 40% pada PPK 2 dan pada PPK 3 seluruh kabupaten akan menyediakan seluruh dana dari budgetnya sendiri.
- Akuntabilitas pemerintah dan peran masyarakat sipil semakin kuat. Peran LSM dan Jurnalis di PPK sebagai pengawas dan pemantau independen. Sejak PPK berjalan, sudah 1.260 liputan baik broadcasting atau publikasi.

7. Tingkat Korupsi Rendah

Audit independen PPK oleh Moores Rowland menemukan kurang dari 1 persen proyek desa yang menyimpang.

Monitoring Pelaksanaan Aktivitas dan Pengeluaran Dana

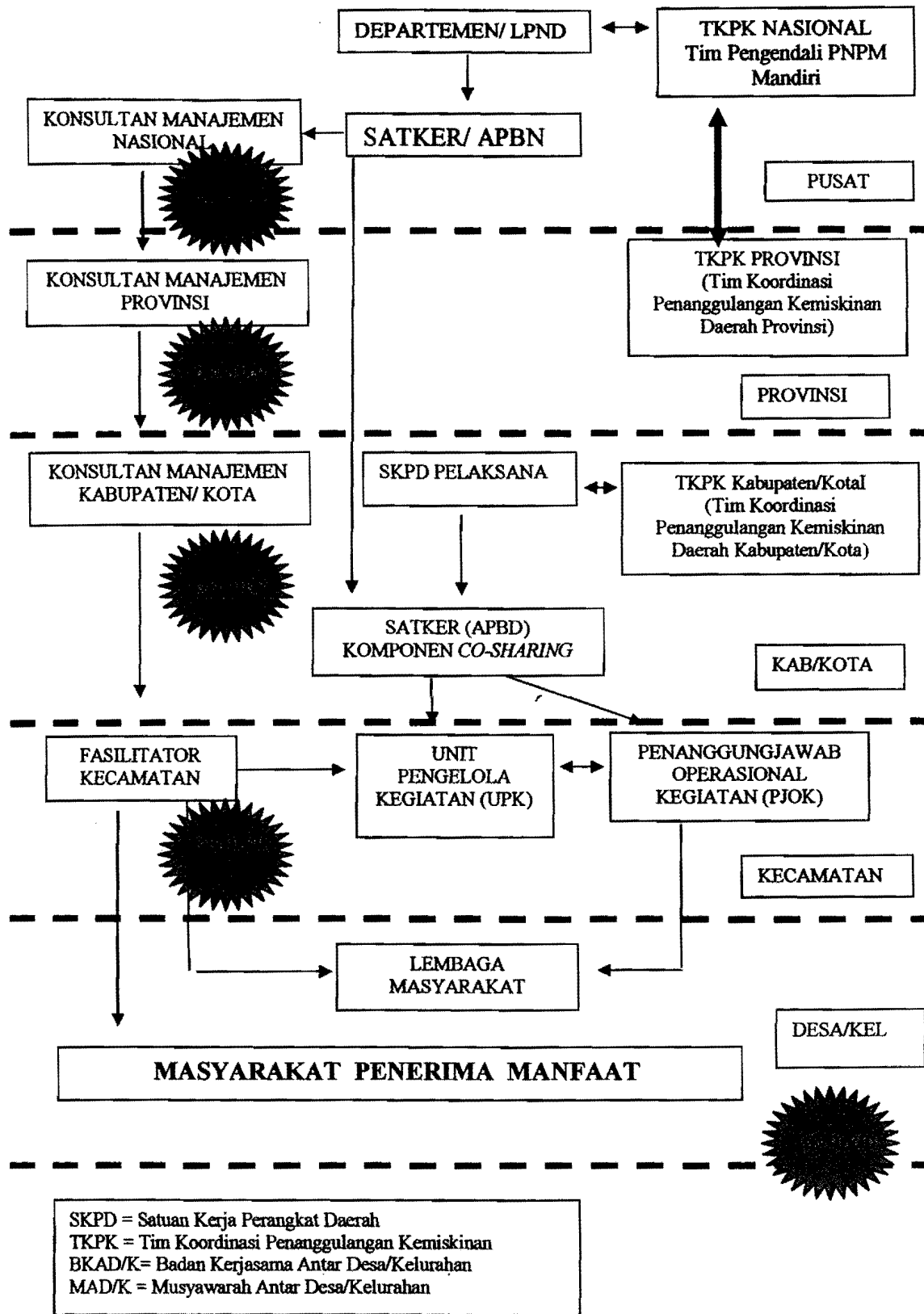
1. Monitoring Partisipatori Masyarakat
2. Kelalaian Pemerintah (*Government Oversight*)
3. Kelalaian Konsultan (*Consultant Oversight*)
4. Mekanisme Penyelesaian Keluhan (*Grievance and Complaints Resolution Mechanism*)
5. Independen Civil Society Monitoring
6. Financial Reviews and Audits

## **MEKANISME PENGINTEGRASIAN ISU GENDER KE DALAM KELEMBAGAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

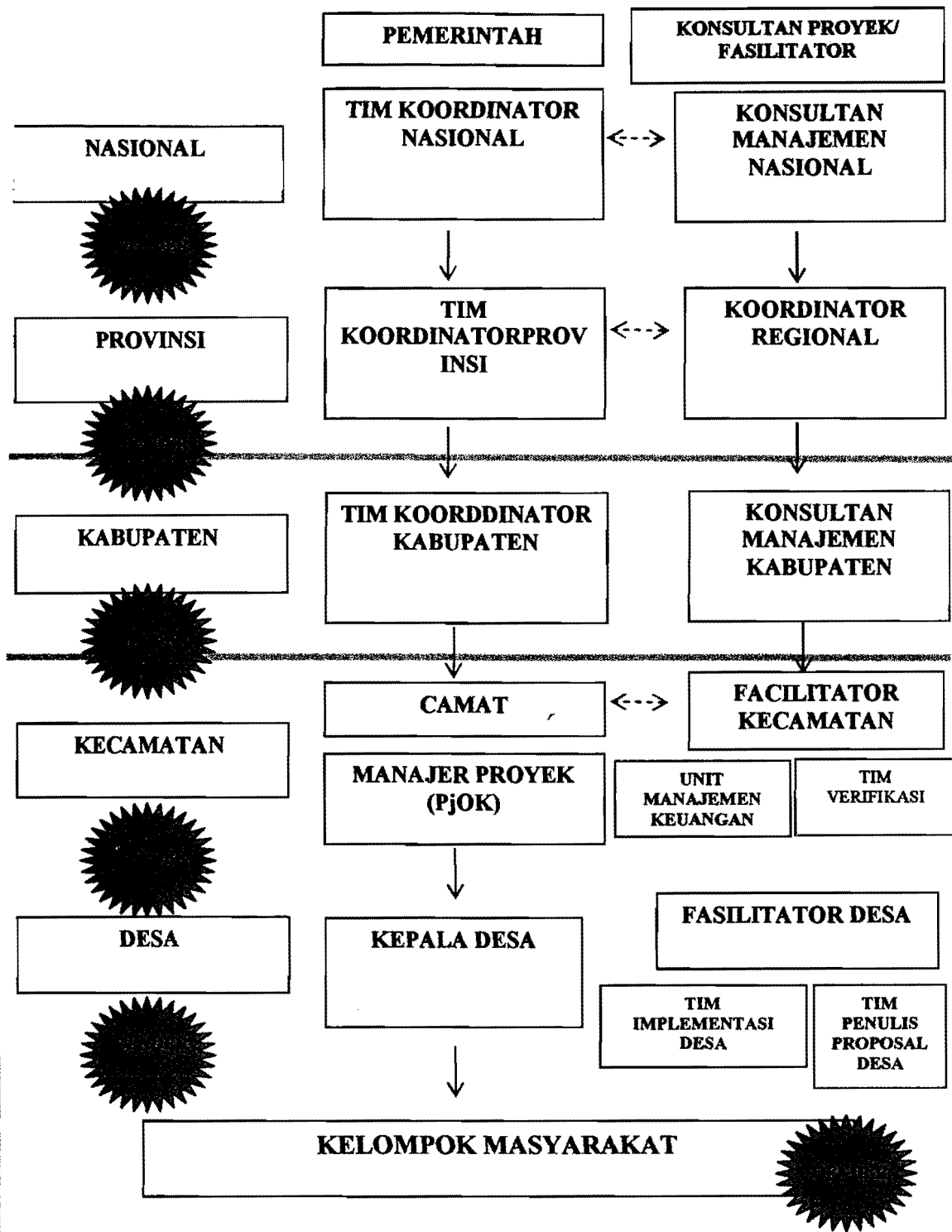
Berikutnya disajikan struktur manajemen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri-P2KP Tingkat Kecamatan/ Kota/ Propinsi sampai Nasional (Gambar 3a) dan struktur manajemen Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tingkat Desa/ Kecamatan/ Kabupaten sampai Propinsi (Gambar 3b).

Pengintegrasian konsep gender ke dalam kelembagaan program penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan berkoordinasi dengan Departemen terkait yang menangani PNPM-Mandiri dan PPK di tingkat nasional.
2. Kantor Pemberdayaan Perempuan harus secara eksplisit dilibatkan dalam penyusunan kebijakan di tingkat propinsi semua kegiatan yang berkaitan dengan PNPM-Mandiri P2KP dan PPK.
3. Kantor Pemberdayaan Perempuan harus secara eksplisit dilibatkan dalam penyusunan kebijakan di tingkat kabupaten/ kota semua kegiatan yang berkaitan dengan PNPM-Mandiri P2KP dan PPK.
  - a. Sebaiknya ada Kantor Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten/ Kota sehingga koordinasi pembangunan daerah dapat dijamin responsif gender.
  - b. Seandainya belum ada Kantor Pemberdayaan Perempuan, maka dapat dipantau dan dikoordinir oleh Setda.
4. Di tingkat kabupaten/ kota, harus dilakukan pembentukan mekanisme pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang responsif gender (PNPM-Mandiri-P2KP maupun PPK) dan berkoordinasi dengan Kantor Pemberdayaan Perempuan melalui forum komunikasi, atau kelompok kerja.
5. Pokja gender yang dibentuk di tingkat kabupaten yang bertugas untuk mendampingi, memfasilitasi, dan memonitor kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan yang berkaitan dengan PNPM-Mandiri P2KP dan PPK.
6. Pokja gender ini dapat berkoordinasi dengan *gender vocal point* yang ada di tingkat kecamatan dan desa yang berkaitan dengan PNPM-Mandiri P2KP dan PPK.



Gambar 3a. Struktur Kelembagaan PNPB Mandiri-P2KP



Gambar 3b. Struktur Manajemen Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Masyarakat adalah pelaku utama PNPM-PPK mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Pelaku-pelaku PNPM mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten disajikan pada Tabel 1a sampai 1 c.

Tabel 1a. Pelaku PNPM-PPK di Desa.

NO	PELAKU	PERAN/ FUNGSI
1	Kepala Desa (Kades)	Berperan sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM-PPK di desa; bersama BPD menyusun peraturan desa yang mendukung pelebagaan prinsip dan prosedur PNPM-PPK sebagai pola pembangunan partisipatif; mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau kerjasama antar desa.
2	BPD (Badan Permusyawaratan Desa) atau sebutan lainnya	Berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM-PPK, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian di desa; melegalisasi peraturan desa yang berkaitan dengan pelebagaan dan pelestarian PNPM-PPK di desa.
3	TPK (Tim Pengelola Kegiatan)	TPK terdiri atas anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa; berperan untuk mengelola dan melaksanakan PNPM-PPK; Ketua sebagai penanggungjawab operasional kegiatan di desa, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dan pengelolaan administrasi serta keuangan program; Sekretaris dan Bendahara adalah membantu Ketua TPK terutama dalam masalah administrasi dan keuangan.
4	TPU (Tim Penulis Usulan)	TPU terdiri atas anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; berperan untuk menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang ditetapkan dalam musyawarah desa dan musyawarah khusus perempuan.
5	Tim Pemantau	Tim Pemantau berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah; Berperan memantau pelaksanaan kegiatan yang ada di desa.
6	Tim Pemelihara	Tim Pemelihara berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah; Berperan memelihara hasil-hasil yang ada di desa. Hasil laporan pemeliharaan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa, dengan dukungan dana yang berasal dari swadaya masyarakat setempat.
7	KPD (Kader Pemberdayaan Desa)	KPD berasal dari anggota masyarakat yang terpilih; Berperan untuk memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM-PPK di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan; Jumlah KPD minimal dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan atau jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peranserta kaum perempuan.

Tabel 1b. Pelaku PNPB-PPK di Kecamatan.

NO	PELAKU	PERAN/ FUNGSI
1	Camat	Berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPB-PPK oleh desa-desa di wilayah kecamatan; Membuat surat penetapan camat tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati musyawarah antar desa untuk didanai melalui PNPB-PPK.
2	Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK)	PjOK adalah sebagai Kasi pemberdayaan masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPB-PPK di kecamatan.
3	Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PjAK)	PjAK adalah seorang aparat di kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan administrasi kecamatan.
4	Tim Verifikasi (TV)	TV adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, baik di bidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan dan pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam musyawarah desa kedua; Berperan melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta PNPB-PPK dan membuat rekomendasi kepada musyawarah antar desa sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
5	UPK	Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan PNPB-PPK di tingkat antar desa termasuk mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara yang berasal dari masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa.
6	BP-UPK	BP-UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh UPK. BP-UPK dibentuk melalui Musyawarah Antar Desa, minimal 3 orang terdiri dari ketua dan anggota.
7	Fasilitator Kecamatan (FK) / Teknik (FT)	FK/FT merupakan pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PNPB-PPK yang berperan dalam memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan, dimulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian; Berperan untuk membimbing kader-kader desa tau pelaku-pelaku PNPB-PPK di desa dan kecamatan.
8	Pendamping Lokal (PL)	Pendamping lokal adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu FK untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian; Di setiap kecamatan akan ditempatkan minimal satu orang pendamping lokal.
9	Tim Pengamat	Tim pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau dan mengamati jalannya proses musyawarah antar desa serta memberikan masukan/ saran agar dapat berlangsung secara partisipatif.
10	Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil PPK yang terdiri dari kelembagaan UPK, prasarana sarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan dan perguliran dana; Berperan merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam bidang micro finance, pelaksana program dan pelayanan usaha kelompok.
11	Setrawan Kecamatan	Diutamakan dari PNS di lingkungan kecamatan yang dibekali kemampuan khusus untuk melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di lingkungan kecamatan dan perubahan tata pemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif.

Tabel 1c. Pelaku PNPM-PPK di Kabupaten.

NO	PELAKU	PERAN/ FUNGSI
1	Bupati	Merupakan pembina TK PNPM-PPK Kabupaten; penanggungjawab atas pelaksanaan operasional dan administrasi kegiatan di tingkat kabupaten, termasuk bersama DPRD untuk melakukan kaji ulang terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan pengaturan desa sesuai komitmen awal yang telah disepakati.
2	Tim Koordinasi PNPM-PPK Kabupaten (TK PNPM-PPK Kab)	Dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan pen gembangan peranserta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program; berfungsi untuk memberikan dukungan koordinasi program antar instansi, pelayanan dan proses administrasi di tingkat kabupaten.
3	Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PjOKab)	Seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati, yang mempunyai tugas pokok sejenis di kabupaten yang berperan sebagai pelaksana harian TK PNPM-PPK Kabupaten.
4	Penanggungjawab Administrasi Kabupaten (PjAKab)	Seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati, yang mempunyai tugas pokok sejenis di kabupaten yang berperan sebagai penyelenggara administrasi Kabupaten.
5	Konsultan Manajemen Kabupaten (KM Kab)	Tenaga konsultan profesional yang berkedudukan di tingkat kabupaten; berperan sebagai supervisor atas pelaksanaan tahapan PNPM-PPK di lapangan yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan; Memastikan setiap tahapan pelaksanaan PNPM-PPK dapat selesai dengan baik; Berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan teknis kepada pelaku PNPM-PPK di kecamatan dan desa; Mendorong munculnya forum lintas pelaku sebagai media pembelajaran pemberdayaan masyarakat; Melakukan koordinasi dengan TK PNPM-PPK Kabupaten.
6	Konsultan Manajemen Teknik (KMT)	KMT berkedudukan di tingkat kabupaten; berperan sebagai supervisor atas hasil kualitas teknik kegiatan prasarana infrastruktur pedesaan, mulai dari perencanaan desain, RAB, survei dan pengukuran, pelaksanaan serta operasional dan pemeliharaan. KMT harus memastikan pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur selesai dengan baik, tepat waktu, dan tetap mengacu kepada prinsip prosedur PNPM-PPK serta sesuai dengan kaidah atau standar teknik prasarana.
7	Pendamping UPK	Konsultan yang bertugas melakukan pendampingan UPK dan lembaga pendukung menjadi suatu lembaga yang akuntabel secara kelembagaan; Pendampingan yang diberikan dalam aspek pengelolaan keuangan dan pinjaman, aspek penguatan kelembagaan, serta aspek pengembangan jaringan kerjasama.
8	Setrawan Kabupaten	Adalah PNS di lingkungan pemerintah kabupaten yang dibekali kemampuan khusus untuk melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di lingkungan kecamatan dan perubahan tata pemerintahan dan perubahan tata pemerintahan, mengkoordinasi dan memfasilitasi setrawan kecamatan, serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif.

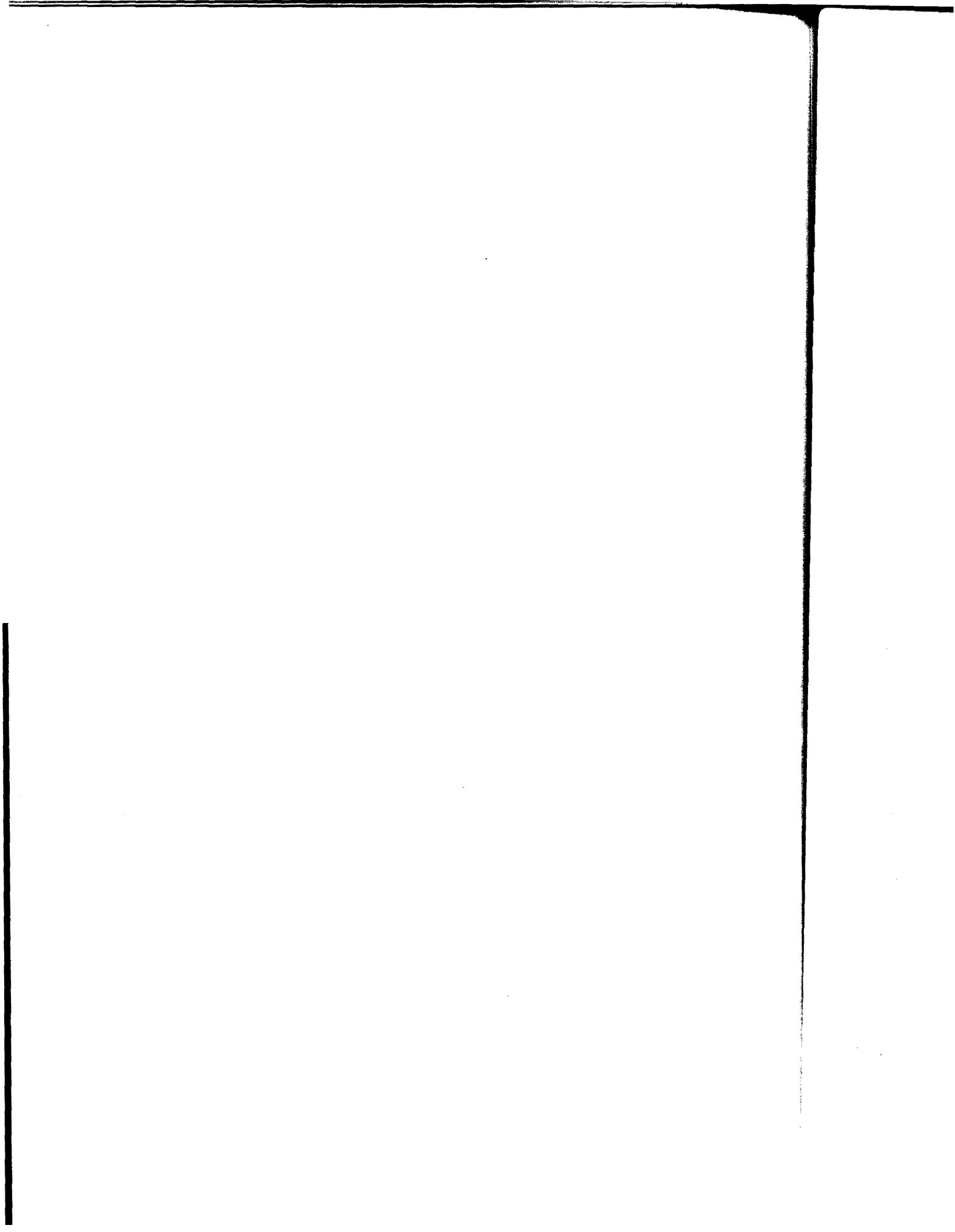
Tabel 1d. Pelaku PNPM-PPK Lainnya.

NO	PELAKU	PERAN/ FUNGSI
1	Gubernur	Sebagai pembina dan penanggungjawab pelaksanaan PNPM-PPK di tingkat provinsi
2	TK-PNPM-PPK Propinsi	Tim yang dibentuk oleh gubernur yang berperan dalam melakukan pembinaan administrasi dan peranserta masyarakat serta memberikan dukungan pelayanan dan proses administrasi di tingkat provinsi.
3	Penanggungjawab Operasional Propinsi (PjOProv)	Adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan desa atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di Propinsi yang berperan sebagai pelaksana garian TK PNPM-PPK Propinsi ; PjOProv ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.
4	Konsultan Manajemen Propinsi	Dipimpin oleh seorang koordinator dengan didukung oleh beberapa staf profesional.
5	Tim Koordinasi PNPM-PPK Nasional (TK PNPM-PPK Nasional)	Berperan dalam melakukan pembinaan kepada TK PNPM-PPK di Provinsi dan kabupaten yang meliputi pembinaan teknis dan administrasi.
6	Sekretariat Nasional PNPM-PPK	Didukung oleh beberapa staf profesional dengan fungsi dan perannya menjaga proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM-PPK secara nasional agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM-PPK; melakukan supervisi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, pengendalian secara fungsional terhadap fasilitator dan konsultan serta memberikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan dalam PNPM-PPK.

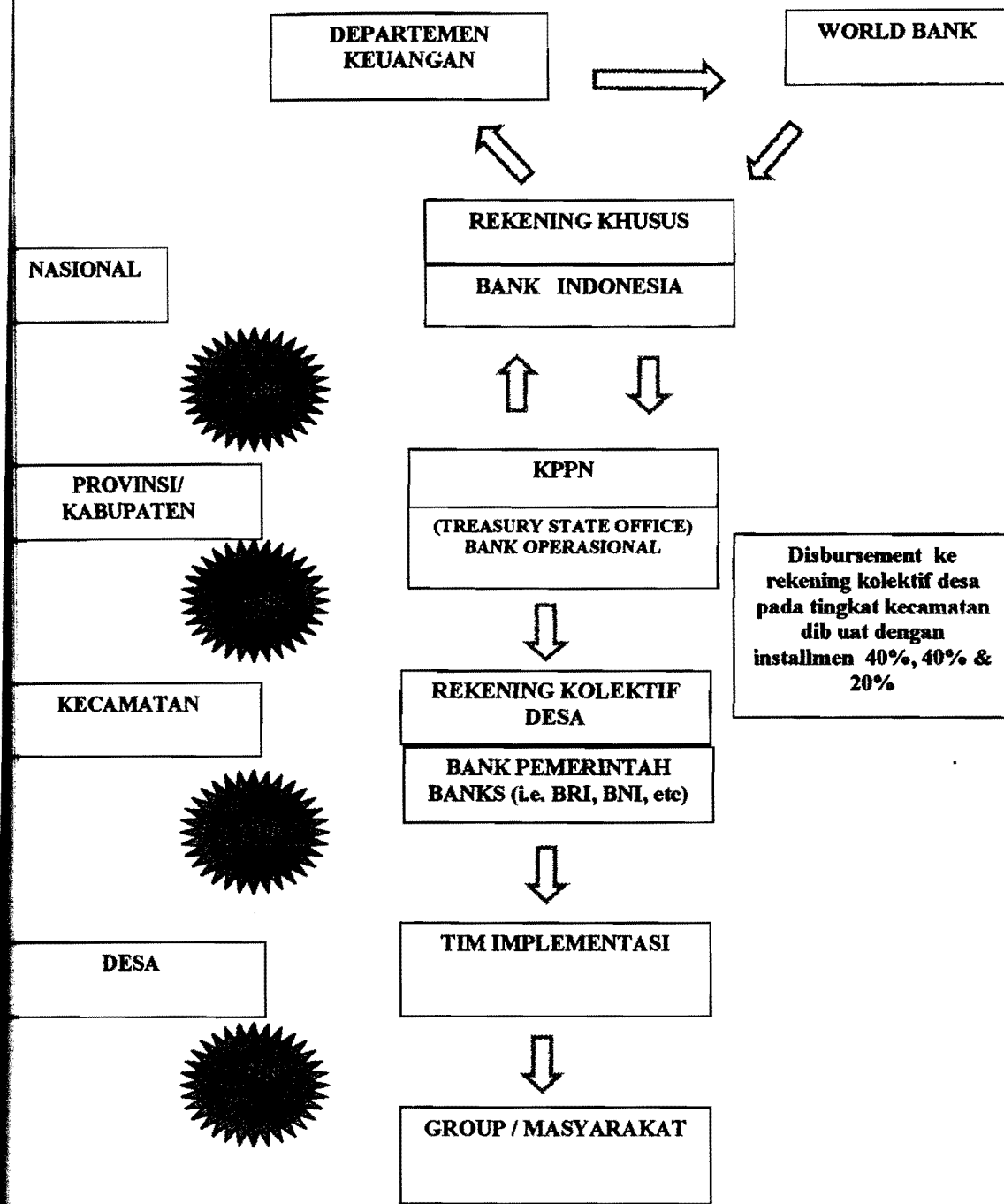


Gambar 3c berikut ini menyajikan aliran dana budget Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Pengintegrasian konsep gender ke dalam dana budget disebut sebagai "Gender Budgeting" atau anggaran responsif gender (Gender Responsive Budgeting (GRB)). Konsep GRB ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan agar anggaran pemerintah mendukung kesetaraan dan keadilan gender:
  - a. Memastikan bahwa anggaran, kebijakan, serta program yang disusun pemerintah mempertimbangkan kepentingan individual berbagai kelompok sosial.
  - b. Mempertimbangkan kelompok yang terpinggirkan karena status etnis, kasta, kelas sosial dan kemiskinan, lokasi geografi, dan usia dengan memberi perhatian bagaimana anggaran berdampak pada mereka yang paling tidak beruntung dan terpinggirkan.
  - c. Mempertimbangan adanya perbedaan dan persamaan kebutuhan laki-laki dan perempuan.
2. Bukanlah persoalan memisahkan anggaran antara laki-laki dan perempuan atau melihat perbandingan antara jumlah alokasi dana antara laki-laki dan perempuan tanpa mempunyai suatu makna dan tujuan, namun GRB lebih menyangkut penggunaan dana yang mengikuti penerapan konsep pengarusutamaan gender (PUG) dengan memastikan adanya kesadaran menanggulangi kesenjangan gender pada kehidupan di masyarakat dari berbagai aspek (sosial, ekonomi, politik, dan budaya).
3. GRB tidak memaknai alokasi dana 50:50 untuk laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memaknai adanya persamaan dan perbedaan kebutuhan. Di Bidang ekonomi misalnya,
  - a. Kebutuhan laki-laki dan perempuan sebagai manusia mempunyai persamaan, yaitu kebutuhan pokok akan sandang, pangan, dan papan. Namun karena adanya pembagian peran dalam keluarga yang cenderung didasari oleh sistem patriarkhi, dimana laki-laki sebagai kepala keluarga yang berperan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perempuan sebagai ibu rumahtangga yang berperan sebagai pengasuh anak dan pemelihara rumah, maka sepertinya perempuan tidak dibuthkan perannya sebagai pencari nafkah.
  - b. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing mempunyai kompetensi, keahlian, ketrampilan, motivasi, dan keinginan untuk mengaktualisasikan dirinya. Untuk itu perlu alokasi dana yang berbeda antara pemberdayaan laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi. Perempuan yang mempunyai kompetensi namun belum mendapat kesempatan memaksimalkan fungsi ekonominya, maka pemerintah dapat mengalokasikannya dananya untuk memfasilitasi kaum perempuan yang berkeinginan untuk mencari penghasilan.
4. *Gender Budgeting*, yaitu dukungan anggaran terhadap proyek/kegiatan yang telah disusun tersebut, hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



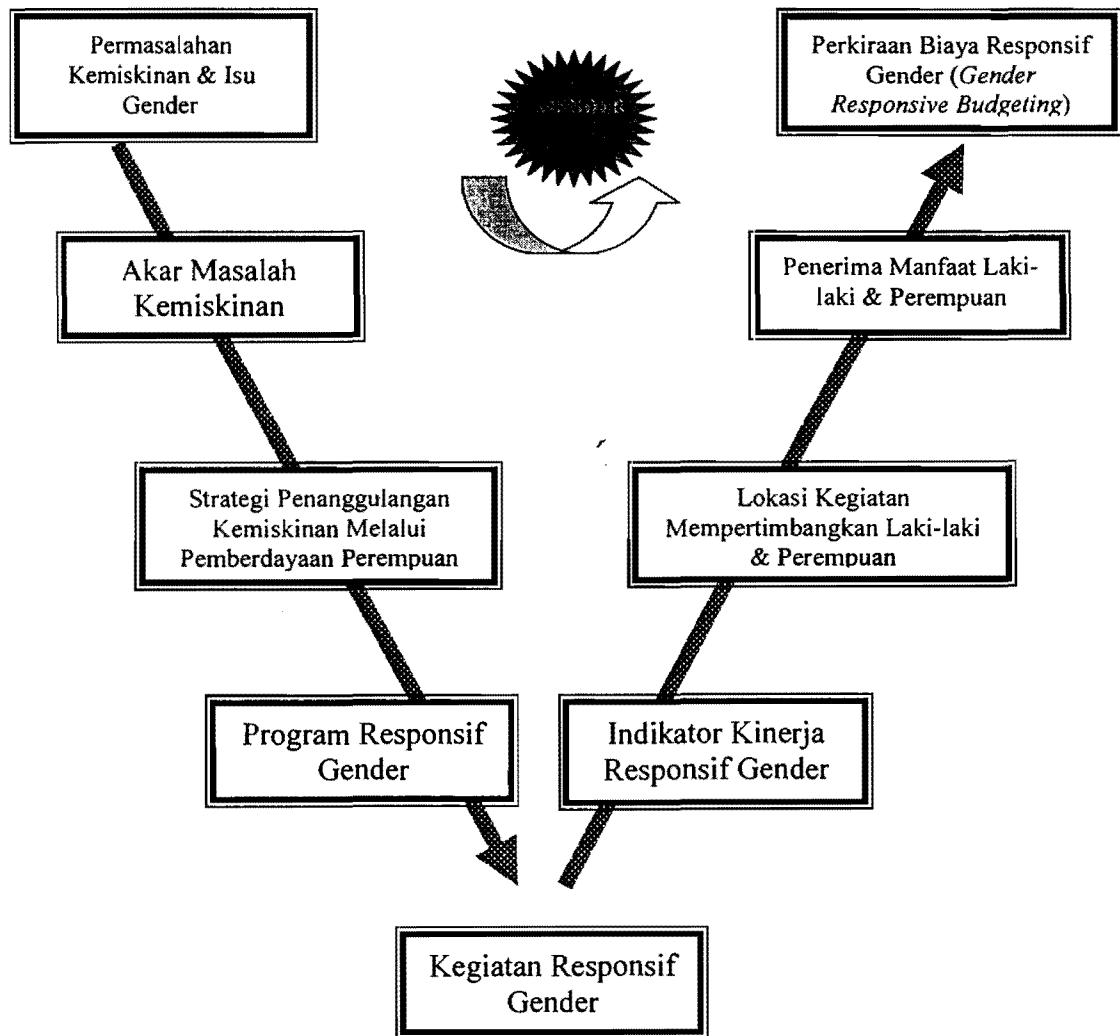
- (1) Rencana anggaran program penanggulangan kemiskinan dengan memasukkan isu-isu gender dilakukan secara bersama-sama antara lembaga legislatif (DPR/DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota) dengan lembaga eksekutif (Departemen/ Dinas/ SKPD, Bappeda Provinsi/ Kabupaten/ Kota).
  - (2) Anggaran dialokasikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan praktis dan strategis yang dapat diakses oleh laki-laki dan perempuan agar dapat mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari pembangunan.
  - (3) Memfokuskan pada penggunaan yang memberi manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek pembangunan.
5. Harus ada Quota untuk kegiatan ekonomi perempuan, misalnya minimal 20 persen dari total dana pemberdayaan masyarakat di suatu desa dan kecamatan.



Gambar 3c. Aliran Dana Budget Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

*GRB = Gender Responsive Budgeting*

Berdasarkan uraian Gambar 3a sampai 3c di atas, maka Gambar 3d berikut ini menjelaskan garis besar “Kerangka Logis Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan yang Responder Gender” yang secara detail akan diuraikan pada bab selanjutnya dan dilampirkan pada lampiran.



Gambar 3d. Garis Besar Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan yang Responsif Gender

## MEKANISME PENGINTEGRASIAN ISU GENDER KE DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

### Contoh Pengintegrasian Pengelolaan Program PNPM Mandiri-P2KP

#### Kondisi Awal PNPM Mandiri P2KP

Kondisi awal dari tahapan kegiatan PNPM Mandiri P2KP di Lokasi Lama dan Baru disajikan pada Gambar 4a dan 5a. Adapun integrasi isu-isu gender ke dalam masing-masing tahapan kegiatan PNPM Mandiri-P2KP disajikan pada Gambar 4b dan 5b. Secara detil, pengintegrasian pengelolaan program PNPM Mandiri P2KP baik lokasi lama maupun lokasi baru disajikan pada Lampiran 3. Sedangkan daftar istilah dan singkatan serta keterangan pemberdayaan ekonomi perempuan disajikan pada Lampiran 6 dan 7. Berikut ini disajikan Tabel 2a dan 2b tentang rekapitulasi integrasi isu Gender ke Dalam Tahapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)- Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Lokasi Lama dan baru.

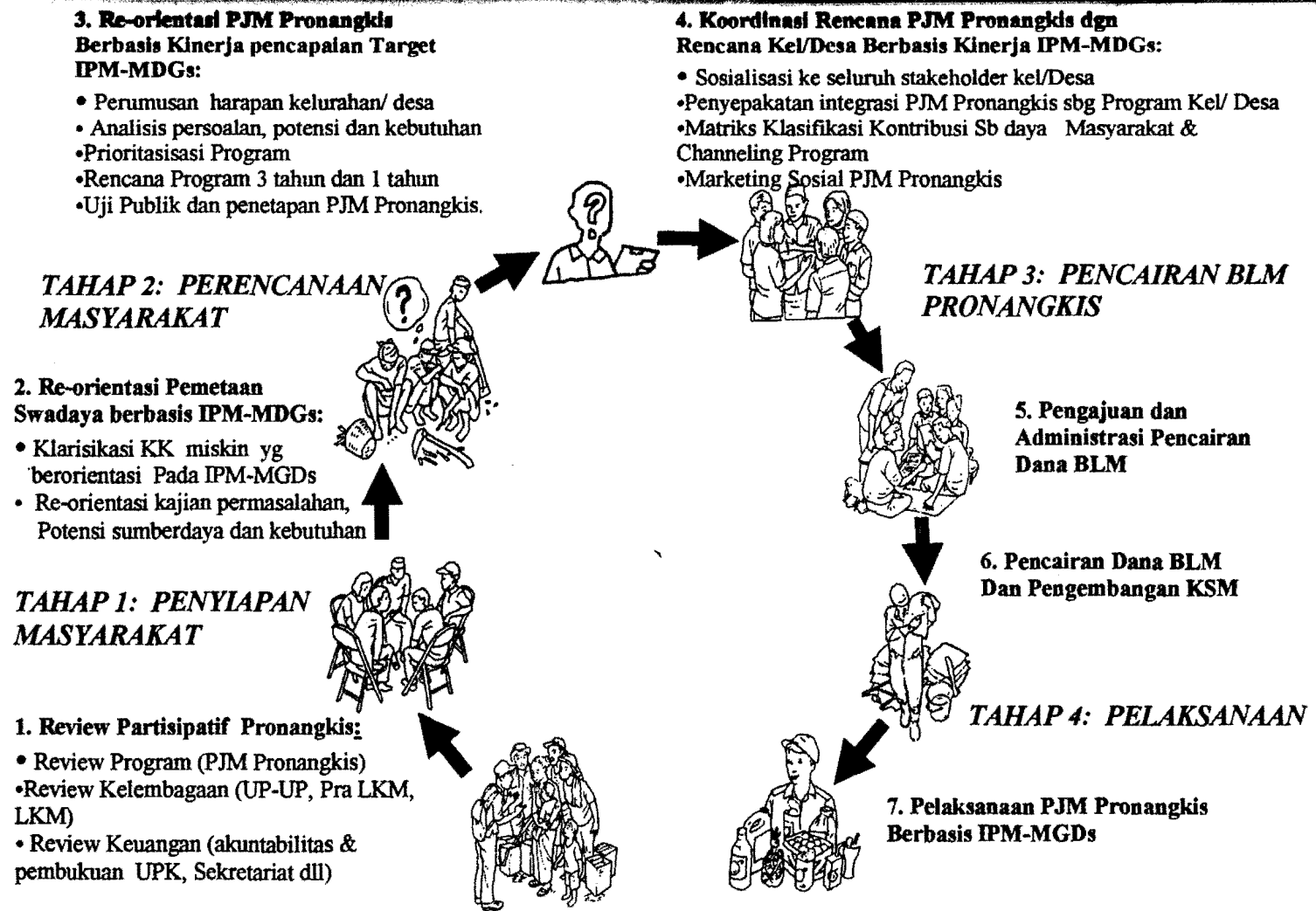
#### Kondisi Responsif Gender

Tabel 2a. Rekapitulasi Tahapan Integrasi Isu Gender ke Dalam Tahapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)- Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Lokasi Lama.

TAHAPAN	KEGIATAN	INTEGRASI ISU GENDER YANG DIBUTUHKAN
TAHAP I PENYIAPAN MASYARAKAT	<b>1. Review Partisipasi Pronangkis:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Review Program (PJM Pronangkis)</li> <li>• Review Kelembagaan (UP-UP, Pra LKM, LKM)</li> <li>• Review Keuangan (akuntabilitas &amp; pembukuan UPK, Sekretariat dll)</li> </ul>	Lihat Lampiran 3 Review Program, Kelembagaan dan Keuangan diarahkan juga untuk melibatkan lebih banyak partisipasi perempuan agar dapat mempunyai tingkat keberdayaan dan kemandirian yang lebih baik.
	<b>2. Reorientasi Pemetaan Swadaya Berbasis IPM- MDGs:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klarifikasi KK miskin yg berorientasi Pada IPM-MGDs</li> <li>• Re-orientasi kajian permasalahan, Potensi sumberdaya dan kebutuhan</li> </ul>	Lihat Lampiran 3 Reorientasi pemetaan diarahkan juga untuk memetakan KK miskin, permasalahan serta potensi yang menggambarkan penduduk perempuan, % KK perempuan baik usia produktif maupun lansia juga sangat penting.

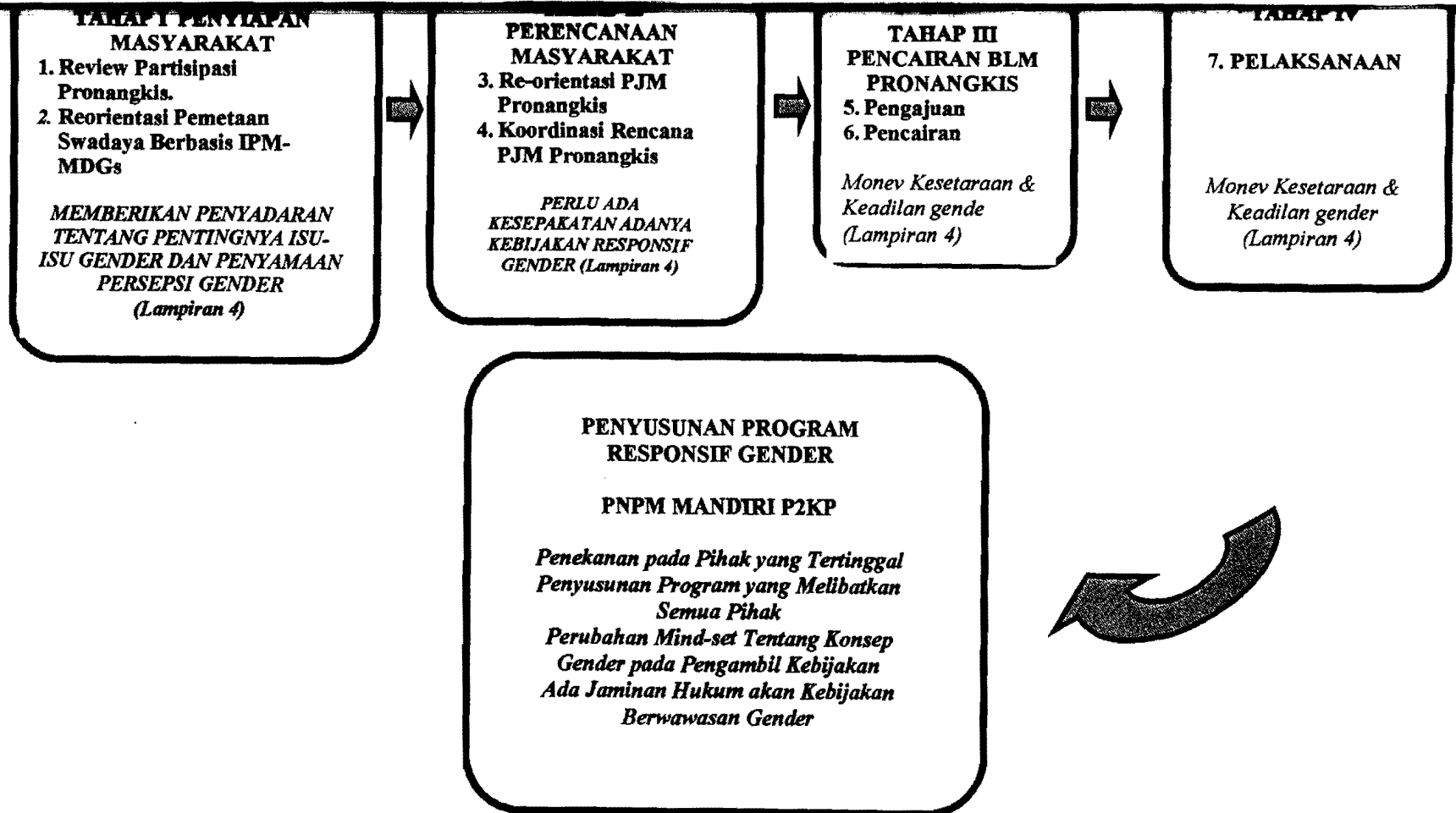
Tabel 2a. Rekapitulasi Tahapan Integrasi (lanjutan).

<b>TAHAP II PERENCANAAN MASYARAKAT</b>	<b>3. Re-orientasi PJM Pronangkis:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan harapan kelurahan/ desa</li> <li>• Analisis persoalan, potensi dan kebutuhan</li> <li>• Prioritisasi Program</li> <li>• Rencana Program 3 tahun dan 1 tahun</li> <li>• Uji Publik dan penetapan PJM Pronangkis.</li> </ul>	Lihat Lampiran 3 Reorientasi PJM Pronangkis diarahkan juga untuk menggalangi persoalan, potensi dan kebutuhan ekonomi produktif perempuan dari keluarga miskin.
	<b>4. Koordinasi Rencana PJM Pronangkis:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi ke seluruh stakeholder kel/Desa</li> <li>• Penyepakatan integrasi PJM Pronangkis sbg Program Kel/ Desa</li> <li>• Matriks Klasifikasi Kontribusi Sb daya Masyarakat &amp; Channeling Program</li> <li>• Marketing Sosial PJM Pronangkis</li> </ul>	Lihat Lampiran 3 Koordinasi Rencana PJM Pronangkis juga diarahkan ke sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam menanggulangi masalah kemiskinan.
<b>TAHAP III PENCAIRAN BLM PRONANGKIS</b>	<b>5. Pengajuan dan Admisnistrasi Pencairan dana BLM.</b>	Lihat Lampiran 3 Pengajuan dana juga diarahkan pada alokasi pemberdayaan ekonomi perempuan.
	<b>6. Pencairan Dana BLM dan Pengembangan KSM.</b>	Lihat Lampiran 3 Pencairan dana juga diarahkan pada monitoring dan evaluasi kegiatan dengan memperdulikan penggunaan dana untuk pemberdayaan ekonomi perempuan.
<b>TAHAP IV PELAKSANAAN</b>	<b>7. Pelaksanaan PJM Pronangkis berbasis IPM- MDGs.</b>	Lihat Lampiran 3 Plaksanaan PJM pronangkis juga diarahkan pada perencanaan yang berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan.



Gambar 4a. Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri P2KP di Lokasi Lama (Sumber: PNPM Mandiri -P2KP. 2007).





Gambar 4b. Integrasi Isu-Isu Gender ke Dalam Tahapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)- Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Lokasi Lama

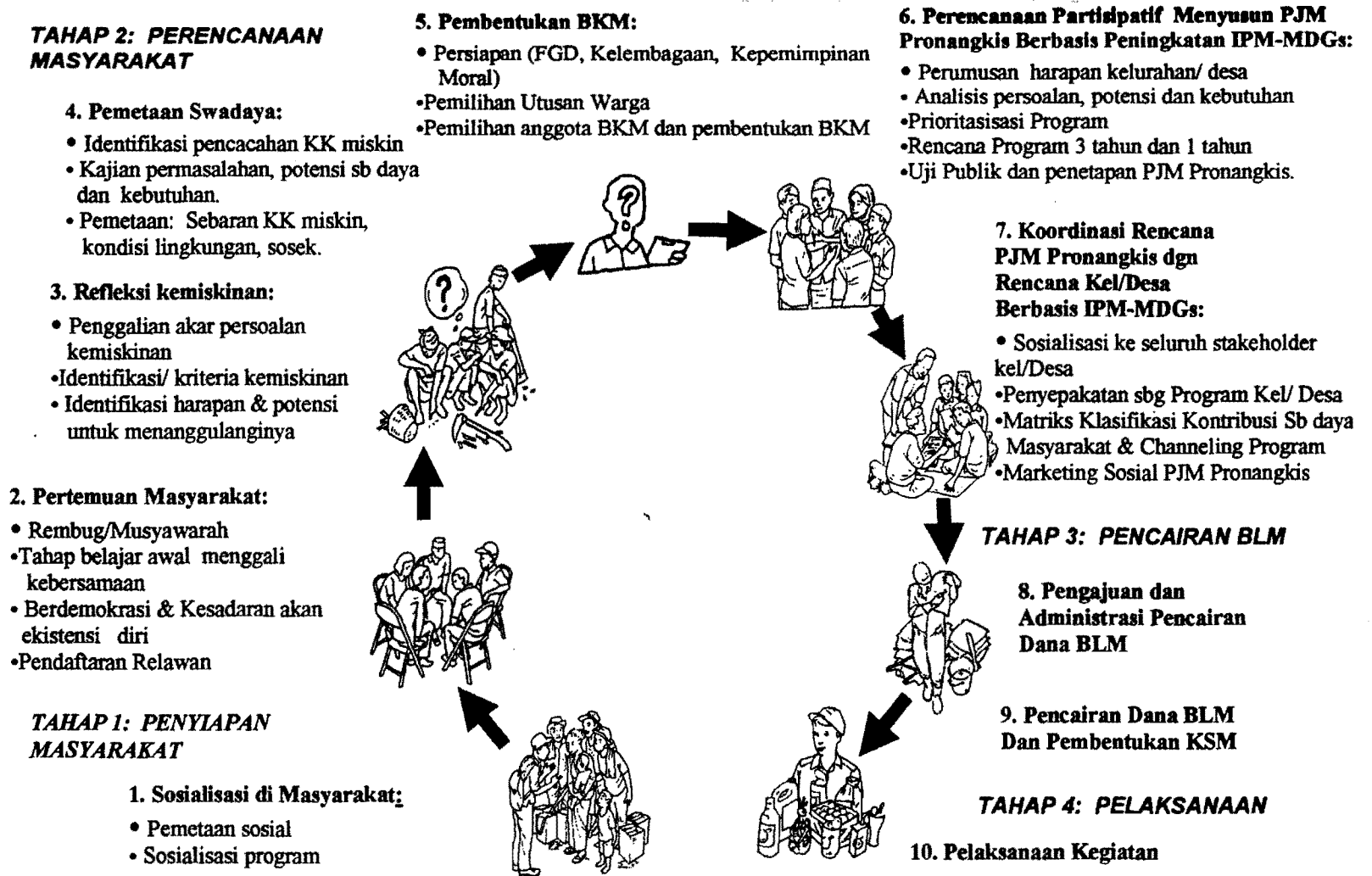
Tabel 2b. Rekapitulasi Integrasi Isu Gender ke Dalam Tahapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)- Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Lokasi Baru.

TAHAPAN	KEGIATAN	INTEGRASI ISU GENDER YANG DIBUTUHKAN
TAHAP 1 PENYIAPAN MASYARAKAT	<b>1. Sosialisasi di Masyarakat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan sosial</li> <li>• Sosialisasi program</li> </ul>	Diarahkan juga untuk melibatkan lebih banyak partisipasi perempuan agar dapat mempunyai tingkat keberdayaan dan kemadirian yang lebih baik.
	<b>2. Pertemuan Masyarakat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rembug/Musyawarah</li> <li>• Tahap belajar awal menggali kebersamaan</li> <li>• Berdemokrasi &amp; Kesadaran akan ekistensi diri</li> <li>• Pendaftaran Relawan</li> </ul>	
TAHAP 2: PERENCANAAN MASYARAKAT	<b>3. Refleksi kemiskinan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggalan akar persoalan kemiskinan</li> <li>• Identifikasi/ kriteria kemiskinan</li> <li>• Identifikasi harapan &amp; potensi untuk menanggulangnya</li> </ul>	
	<b>4. Pemetaan Swadaya:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi pencacahan KK miskin</li> <li>• Kajian permasalahan, potensi sb daya dan kebutuhan.</li> <li>• Pemetaan: Sebaran KK miskin, kondisi lingkungan, sosek.</li> </ul>	Reorientasi pemetaan diarahkan juga untuk memetakan KK miskin, permasalahan serta potensi yang menggambarkan penduduk perempuan, % KK perempuan baik usia produktif maupun lansia juga sangat penting.
	<b>5. Pembentukan BKM:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan (FGD, Kelembagaan, Kepemimpinan Moral)</li> <li>• Pemilihan Utusan Warga</li> <li>• Pemilihan anggota BKM dan pembentukan BKM</li> </ul>	
	<b>6. Perencanaan Partisipatif Menyusun PJM Pronangkis Berbasis Peningkatan IPM-MDGs:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan harapan kelurahan/ desa</li> <li>• Analisis persoalan, potensi dan kebutuhan</li> <li>• Prioritisasi Program</li> <li>• Rencana Program 3 tahun dan 1 tahun</li> <li>• Uji Publik dan penetapan PJM Pronangkis.</li> </ul>	

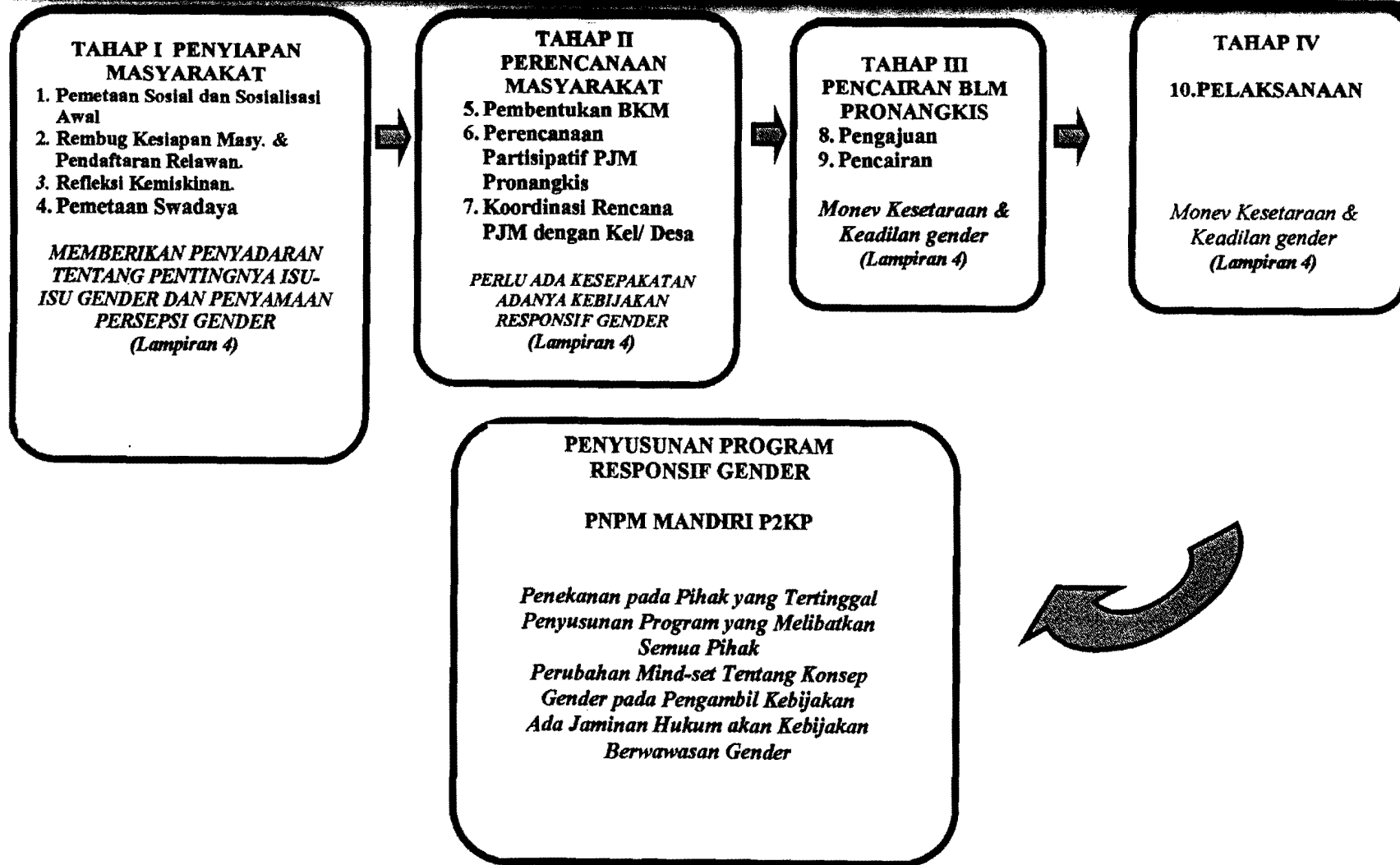
Lampiran 2b. Rekapitulasi Integrasi Isu Gender (Lanjutan).

	<p><b>7. Koordinasi Rencana PJM Pronangkis dgn Rencana Kel/Desa Berbasis IPM-MDGs:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi ke seluruh stakeholder kel/Desa</li> <li>• Penyepakatan sbg Program Kel/ Desa</li> <li>• Matriks Klasifikasi Kontribusi Sb daya Masyarakat &amp; Channeling Program</li> <li>• Marketing Sosial PJM Pronangkis</li> </ul>	<p>Koordinasi Rencana PJM Pronangkis juga diarahkan ke sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam menanggulangi masalah kemiskinan.</p>
<p><b>TAP 3:</b> <b>PENCAIRAN BLM</b></p>	<p><b>8. Pengajuan dan Administrasi Pencairan Dana BLM</b></p>	<p>Pengajuan dana juga diarahkan pada alokasi pemberdayaan ekonomi perempuan.</p>
	<p><b>9. Pencairan Dana BLM Dan Pembentukan KSM</b></p>	<p>Pencairan dana juga diarahkan pada monitoring dan evaluasi kegiatan dengan memprioritaskan penggunaan dana untuk pemberdayaan ekonomi perempuan.</p>
<p><b>TAP 4:</b> <b>PELAKSANAAN</b></p>	<p><b>10. Pelaksanaan Kegiatan</b></p>	<p>Pelaksanaan PJM pronangkis juga diarahkan pada perencanaan yang berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan.</p>

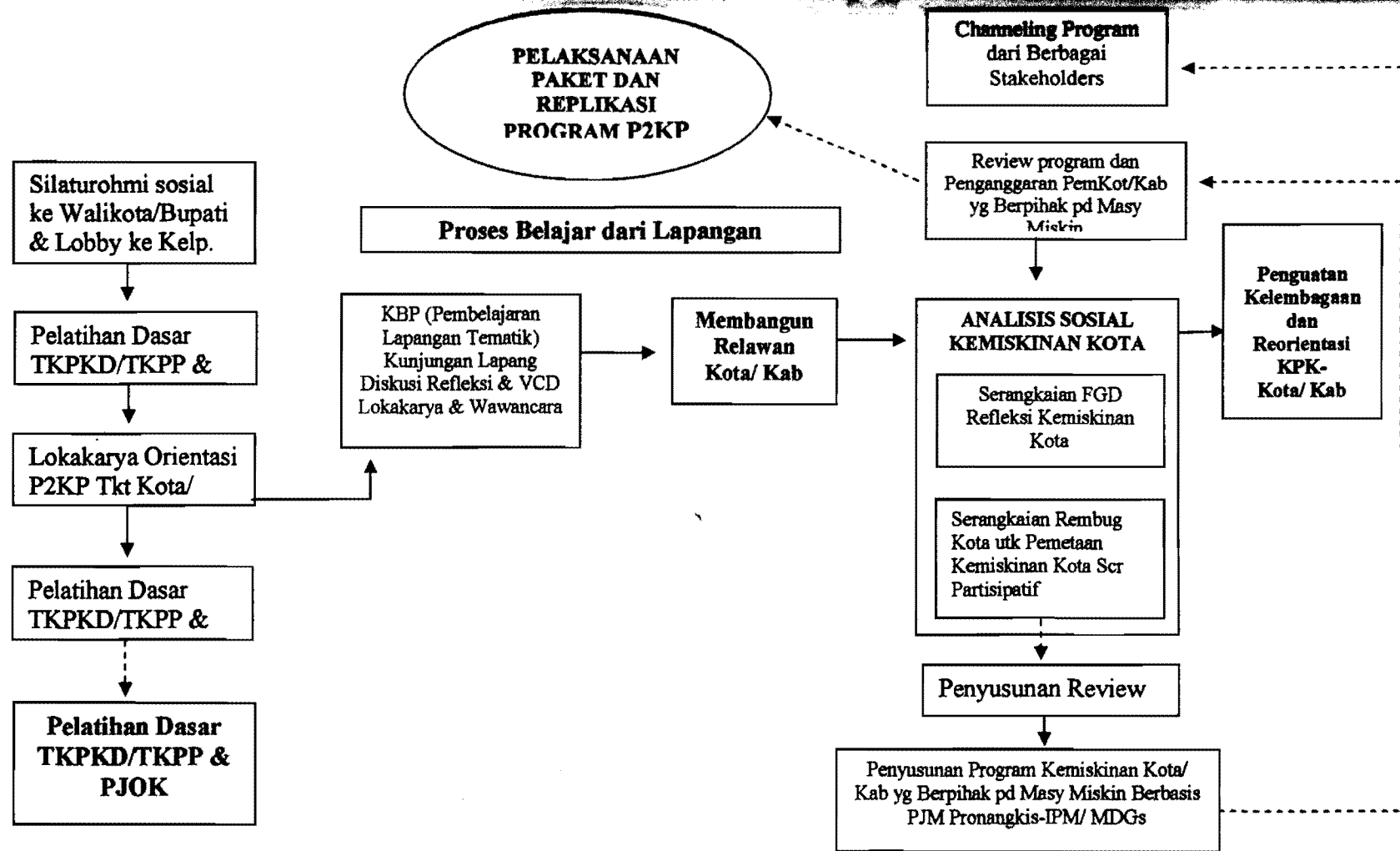
Penjelasan secara detail ada di Lampiran 3.



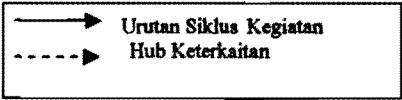
Gambar 5a. Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri P2KP di Lokasi Baru (Sumber: PNPM Mandiri -P2KP. 2007).

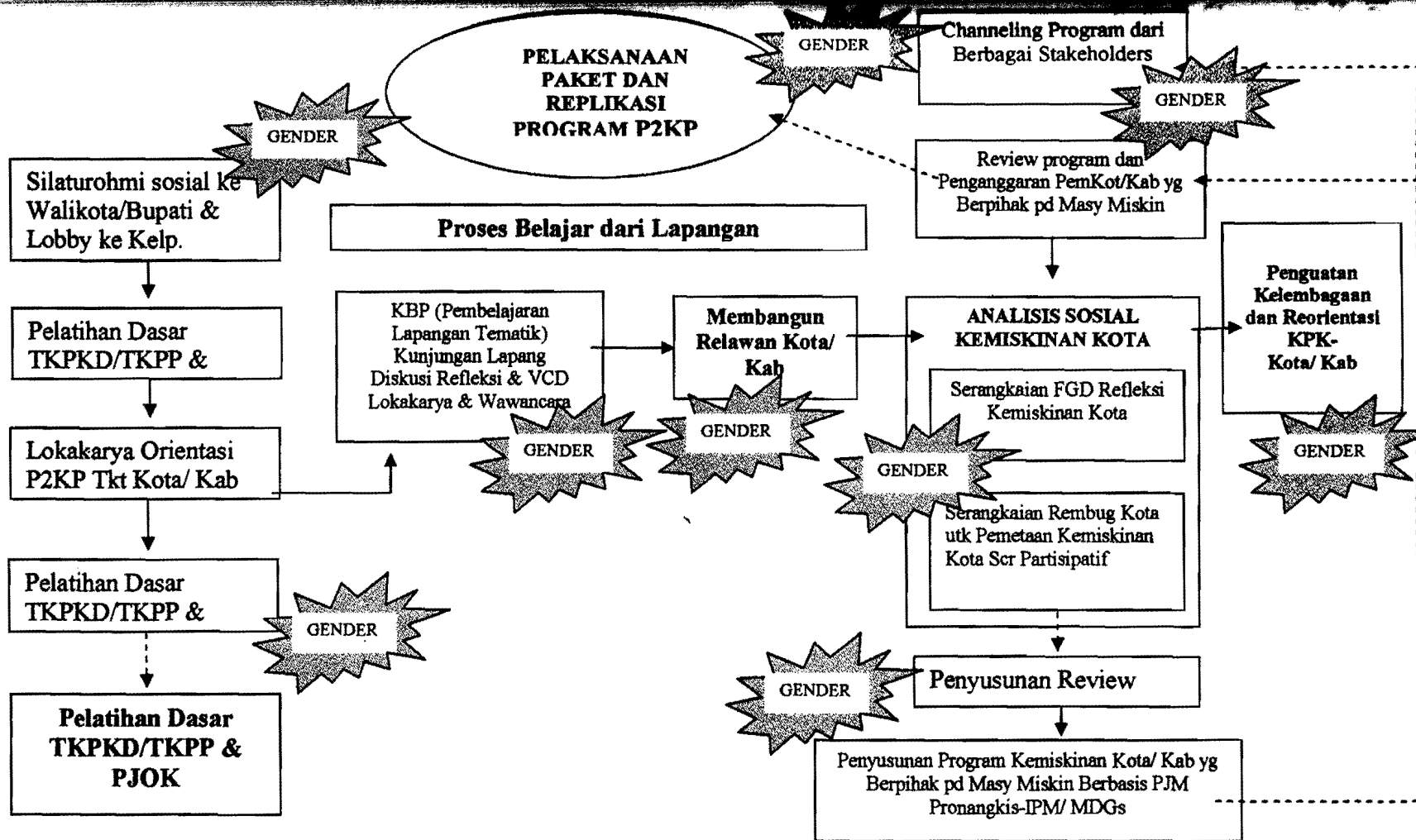


Gambar 5b. Integrasi Isu-Isu Gender ke Dalam Tahapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)- Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Lokasi Baru



Gambar 6a. Tahapan Kegiatan PNPB Mandiri P2KP Tingkat Kota/ Kabupaten





Gambar 6b. Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri P2KP Tingkat Kota/ Kabupaten yang Responsif Gender (Secara detail dapat mengacu pada Lampiran 3)

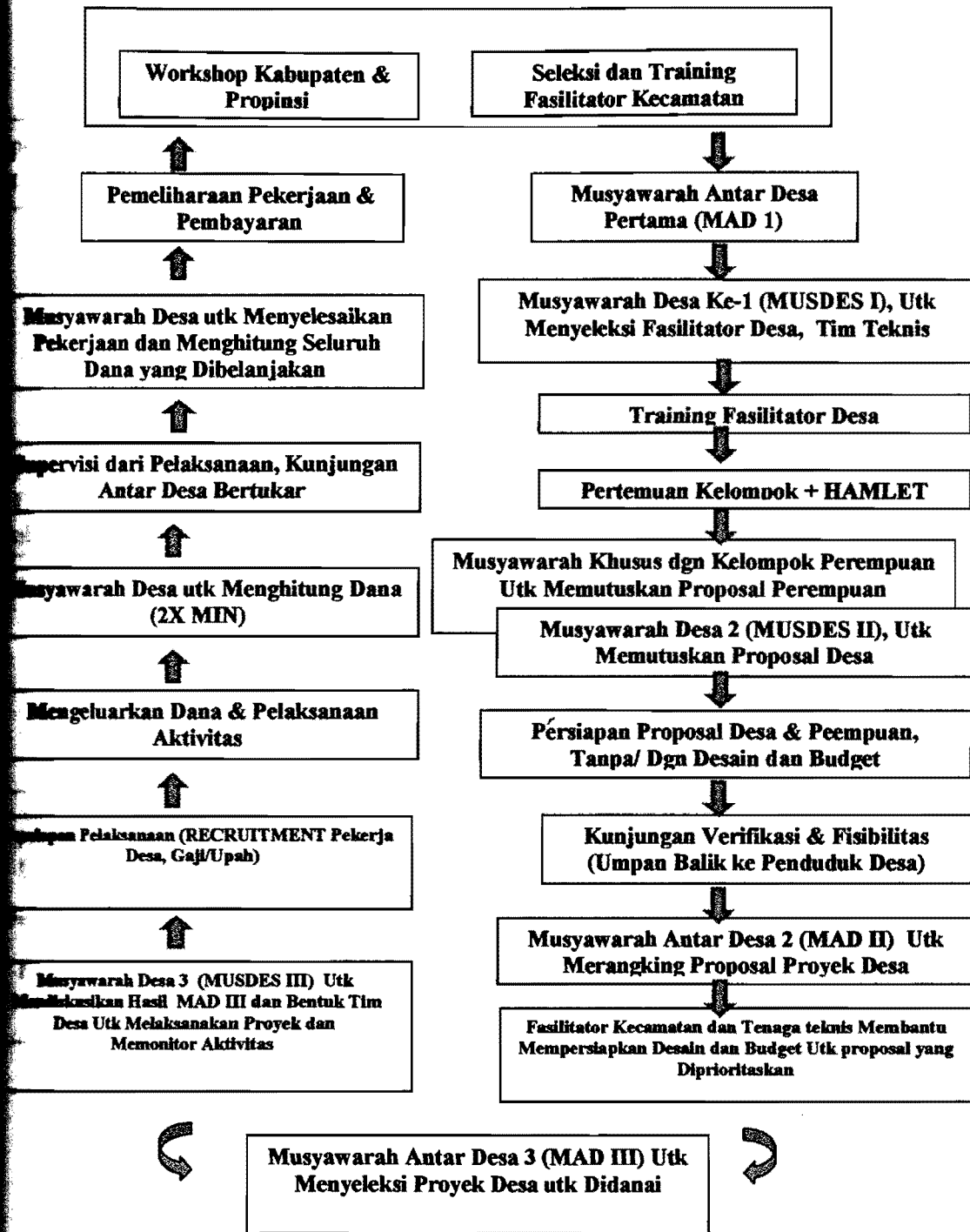
## **Mekanisme Kerja Pengintegrasian Isu Gender ke dalam Kebijakan Pangulangan Kemiskinan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK)**

Secara garis besar, berdasarkan mekanisme penyusunan program di bawah PNPM-PPK sebenarnya sudah responsif gender dan sudah partisipatif seperti yang diuraikan pada Gambar 7a dan 7b (secara detail ada di Lampiran 4). PNPM-PPK bertujuan untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat melalui siklus mekanisme project sebagai berikut:

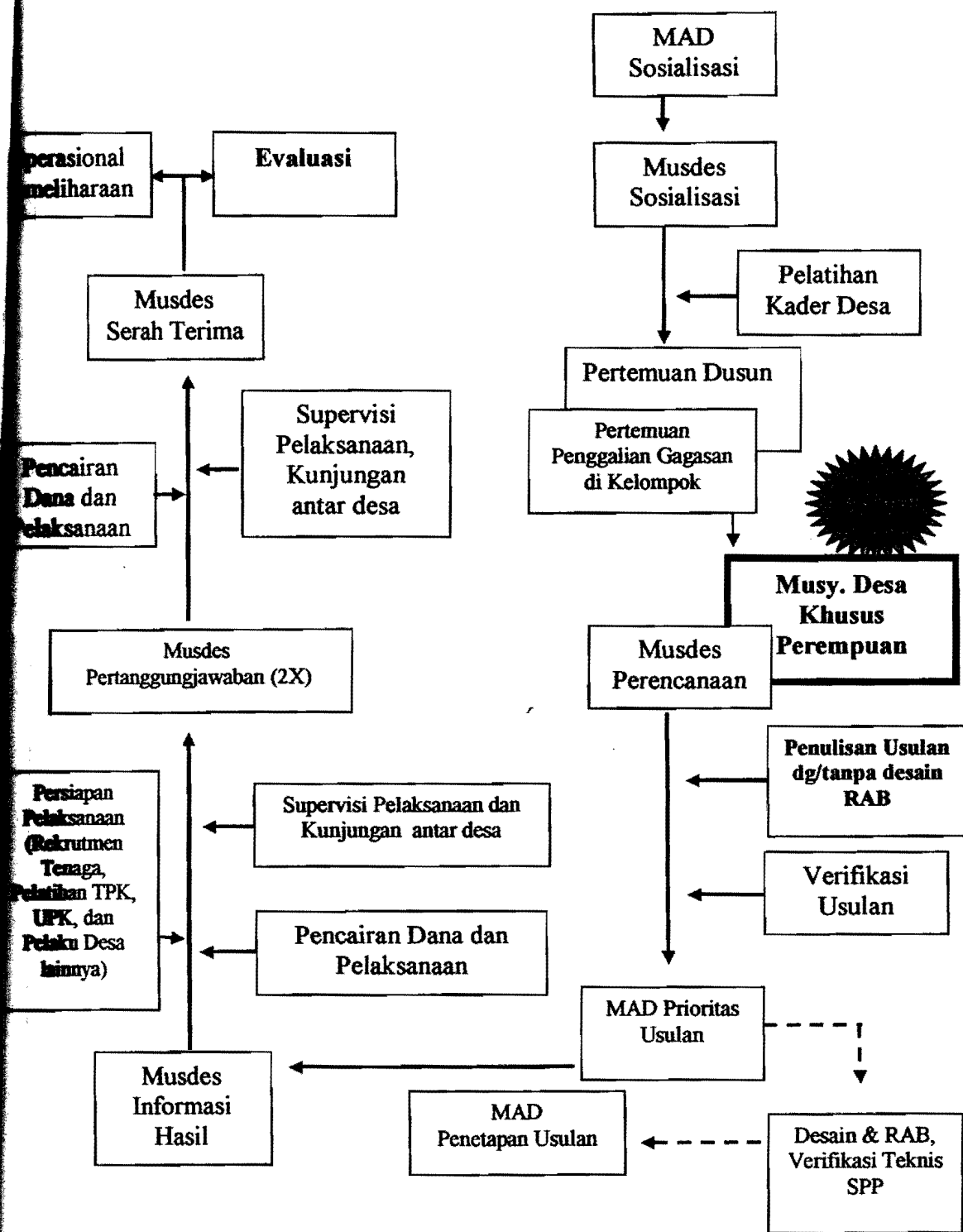
1. **Diseminasi dan Sosialisasi Informasi**  
Diseminasi dan sosialisasi informasi pada PPK dilakukan dalam berbagai cara. Lokakarya (Workshop) dilakukan pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi untuk diseminasi informasi dan mempopulerkan program.
  - a. Musyawarah Antar Desa Pertama (MAD 1)
2. **Proses Perencanaan Partisipatori pada Tingkat Dusun (Sub-Village), Desa (Village) dan Kecamatan (Sub-District)**  
Masyarakat desa memilih fasilitator (satu laki-laki dan satu perempuan) yang akan membantu proses sosialisasi dan perencanaan. Fasilitator desa ini memfasilitasi pertemuan-pertemuan kecil, termasuk pertemuan kelompok perempuan secara terpisah, untuk mendiskusikan kebutuhan desa dan prioritas pembangunan desa. Masyarakat desa membuat pilihan-pilihan mengenai jenis pembangunan proyek yang ingin diusulkan. PPK menyediakan konsultan teknis dan sosial pada tingkat kecamatan dan kabupaten untuk membantu sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan.
  - b. Musyawarah Desa Ke-1 (MUSDES I), Utk Menyeleksi Fasilitator Desa, Tim Teknis
  - c. Training Fasilitator Desa
  - d. Pertemuan Kelompok + HAMLET
  - e. Musyawarah Khusus dgn Kelompok Perempuan Utk Memutuskan Proposal Perempuan
  - f. Musyawarah Desa 2 (MUSDES II), Utk Memutuskan Proposal Desa
  - g. Persiapan Proposal Desa & Perempuan, Tanpa/ Dgn Desain dan Budget
3. **Seleksi Proyek pada Tingkat Desa dan Kecamatan**  
Masyarakat bertemu pada lokakarya tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan proposal mana yang harus didanai. Pertemuan ini bersifat terbuka untuk seluruh anggota masyarakat dalam rangka mengusulkan proyek. Kemudian Forum Desa yang terdiri dari representatif masyarakat desa yang terpilih membuat keputusan akhir atas proyek yang didanai.
  - a. Kunjungan Verifikasi & Fisibilitas
  - b. (Umpan Balik ke Penduduk Desa)
  - c. Musyawarah Antar Desa 2 (MAD II) Utk Merangking Proposal Proyek Desa



- d. Fasilitator Kecamatan dan Tenaga Teknis Membantu Mempersiapkan Desain dan Budget untuk proposal yang Diprioritaskan
  - e. Musyawarah Antar Desa 3 (MAD III) Utk Menyeleksi Proyek Desa utk Didanai
4. Masyarakat Desa Melaksanakan Projeknya Sendiri
- Forum masyarakat desa memilih anggota-anggota untuk menjadi bagian dari Tim Pelaksana untuk mengelola proyek. Fasilitator Teknis PPK membantu Tim Pelaksana Desa untuk mendisain infrastruktur, pendanaan proyek, kualitas, verifikasi dan supervisi. Para pekerja dipekerjakan terutama dari desa penerima proyek.
- a. Musyawarah Desa 3 (MUSDES III) Utk Mendiskusikan Hasil MAD III dan Bentuk Tim Desa Utk Melaksanakan Proyek dan
  - b. Memonitor Aktivitas
  - c. Persiapan Pelaksanaan (RECRUITMENT Pekerja Desa, Gaji/Upah)
  - d. Mengeluarkan Dana & Pelaksanaan Aktivitas
5. Akuntabilitas dan Laporan Pelaksanaan
- Selama implementasi, Tim Pelaksana harus melaporkan perkembangan proyek sebanyak dua kali didepan pertemuan desa. Pada pertemuan terakhir, Tim Pelaksana menyerahkan laporan proyek ke Desa dan panitia pemeliharaan dan operasi desa.
- a. Musyawarah Desa utk Menghitung Dana (2X MIN)
  - b. Supervisi dari Pelaksanaan, Kunjungan Antar Desa Bertukar
  - c. Musyawarah Desa utk Menyelesaikan Pekerjaan dan Menghitung Seluruh Dana yang Dibelanjakan
  - d. Pemeliharaan Pekerjaan & Pembayaran
  - e. Workshop Kabupaten & Propinsi



Gambar 7 a. Siklus Aktivitas Program Pengembangan Kecamatan



Gambar 7b . Alur Tahapan PNPB-PPK

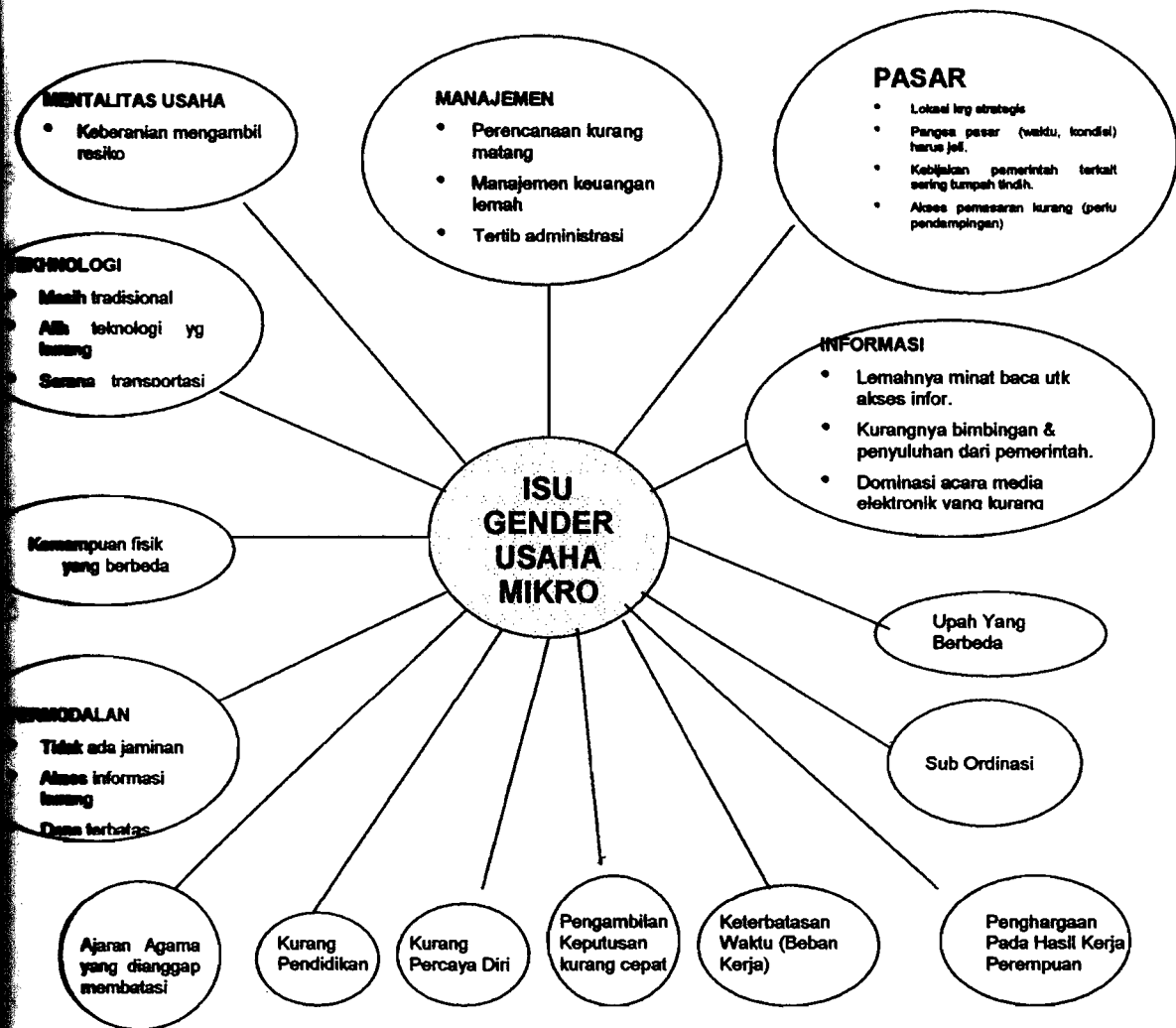
## **KONDISI PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH**

Berdasarkan laporan pengalaman pelaksanaan PPK selama ini, maka dilaporkan **Biro Pemberdayaan Perempuan Propinsi Jawa Tengah (2007)** sebagai berikut:

1. Keterlibatan perempuan dalam program-program penanggulangan kemiskinan misalnya PNPM-P2KP dan PNPM-PPK hanya sekedar keterlibatan perempuan secara kuantitatif jumlah perempuan, namun belum menyangkut keterlibatan kompetensi talenta perempuan sebagai sumberdaya manusia yang berkualitas.
2. Penyusunan perencanaan program baik yang diusulkan oleh masyarakat di tingkat dusun, desa, kecamatan maupun kabupaten maupun perencanaan hasil dampingan dari fasilitator belum melalui prosedur awal yaitu identifikasi isu gender yang berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif yang terpilah berdasarkan jenis kelamin.
3. Para fasilitator, baik di pendamping lokal di tingkat desa dan fasilitator kecamatan maupun konsultan manajemen kabupaten tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi isu-isu gender di wilayah masing-masing dikarenakan pengetahuan dan pemahaman konsep gender dan analisis gender yang belum memadai.
4. Kemampuan dan pengetahuan tentang konsep dan analisis gender dari aparatur desa, kecamatan dan kabupaten masih belum optimal dan bahkan banyak daerah yang aparaturnya belum mempunyai pemahaman gender sama sekali.
5. Dengan demikian, akomodasi masalah, aspirasi dan kebutuhan perempuan belum secara optimal terwujud dalam bentuk proposal kegiatan. Keterlibatan perempuan masih parsial dan belum berkelanjutan.
6. Keterlibatan SKPD di daerah terhadap upaya mengintegrasikan isu gender ke dalam program-program penanggulangan kemiskinan masih sangat rendah. Terkesan, program penanggulangan kemiskinan masih sektoral, temporal dan accidental dan belum memenuhi persyaratan pendekatan sinergis, holistik dan berkelanjutan.
7. Isu gender dalam pengembangan PNPM-PPK adalah disajikan pada Tabel 4.a :
8. Isu gender dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil disajikan pada Gambar 8.a :

Tabel 4.a. Isu gender dalam Pengembangan PNPM-PPK.

ISU GENDER	KETERANGAN
<p><b>Peningkatan kapasitas Masyarakat dan lembaganya</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan perempuan dan laki-laki berbeda.</li> <li>2. Masalah perempuan dan laki-laki berbeda.</li> <li>3. Akses yang tersedia untuk laki-laki dan perempuan berbeda.</li> <li>4. Kelembagaan desa lebih banyak dikelola laki-laki.</li> <li>5. Prosesnya berkait dengan waktu luang.</li> <li>6. Model dan metode peningkatan kapasitasnya apakah mampu meningkatkan kapasitas perempuan dan laki-laki.</li> </ol>
<p><b>Pelebagaan sistem pembangunan partisipatif</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan identifikasi masalah dan kebutuhan perempuan dan laki-laki.</li> <li>2. Kemampuan identifikasi isu-isu gender.</li> <li>3. Kemampuan merencanakan (ubah keinginan menjadi kebutuhan).</li> <li>4. Metode yang digunakan.</li> <li>5. Mekanisme yang digunakan apakah mampu mengakomodasi kepentingan semua kelompok laki-laki maupun perempuan.</li> </ol>
<p><b>Pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah lokal</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan identifikasi masalah dan kebutuhan perempuan dan laki-laki.</li> <li>2. Kemampuan identifikasi isu-isu gender.</li> <li>3. Pemenuhan hak dasar.</li> <li>4. Perlindungan social.</li> <li>5. Jaminan mekanisme yang akuntabel bagi semua kelompok masyarakat.</li> <li>6. Organisasi yang responsif gender.</li> </ol>
<p><b>Penyediaan sarana dan prasarana dasar dan ekonomi yang diprioritaskan</b></p>	<p>sarpras untuk menjawab hak dasar masyarakat miskin dan kebutuhan praktis gender dan strategis gender?</p>



er. Makalah Biro PP-Prov. Jateng. 2007

Gambar 8.a. Isu gender dalam Usaha Kecil Mikro (UKM).

er di atas menjelaskan isu gender dalam UKM yang meliputi:

Adanya beban kerja yang tinggi dialami perempuan usaha mikro karena selain melakukan pekerjaan-pekerjaan produktif sebagai pengusaha mikro-kecil dari pagi hari sampai sore hari, kelompok perempuan juga masih mendapatkan beban pekerjaan-pekerjaan reproduktif di dalam rumah. Hal itu berbeda dengan UMK laki-laki yang secara budaya tidak dibebani peran-peran reproduktif.

Secara konseptual ada beberapa macam pengelompokan kerja perempuan, seperti sistem produksi subsisten, pekerjaan tanpa upah dalam sistem produksi keluarga, sistem *putting-out*, pekerja rumahan (*home worker*), pekerja dalam usaha rumahan (*home-based worker*), pembantu rumah tangga, buruh upahan, dan usaha mandiri (*self-employed*). Ke semua jenis pekerjaan tersebut menunjukkan bahwa

hanya itulah ruang yang tersisa bagi perempuan. Pilihan yang ada sangat terbatas dan tidak menguntungkan. Hal ini merupakan salah satu ciri peminggiran atau marginalisasi akibat proses industrialisasi dan kapitalisasi yang gagal menciptakan keseimbangan pembangunan.

Pada hampir sebagian besar perempuan yang membantu suami pada usaha mikro kecil menjadi pekerja yang tidak dibayar.

Keputusan politik seringkali menafikan peran perempuan dalam ekonomi:

- a. Politik ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan menghasilkan pandangan masyarakat bahwa yang masuk dalam kategori usaha adalah usaha skala besar dan menghasilkan keuntungan yang besar pula.
- b. Usaha kecil/mikro yang dikelola perempuan meskipun mengakar pada berbagai sektor dan berkontribusi besar dalam proses peningkatan status ekonomi masyarakat, tidak diakui dalam perhitungan ekonomi dan dikategorikan dalam sektor non formal.
- c. Ada kecenderungan untuk mengesampingkan potensi basis perempuan yang melakukan kegiatan ekonomi di sektor riil.

Persoalan riil perempuan di tingkat usaha mikro:

- a. Usaha atau pekerjaan perempuan dianggap sampingan
- b. Pengambilan keputusan usaha dipegang suami/keluarga
- c. Ketergantungan aset; aset atas nama suami
- d. Pembatasan mobilitas perempuan untuk mengembangkan usaha dan berorganisasi
- e. Beban ganda menjadi bagian yang sulit dilepaskan dari kehidupan perempuan. Sebagian besar waktu PUK untuk pekerjaan domestik (masak, mengurus anak/suami, membersihkan rumah, mencuci pakaian), namun tidak ada penilaian ekonomis yang sepadan atas pekerjaan yang dilakukan.
- f. Permodalan terbatas
- g. Lembaga keuangan mikro masih konvensional dalam memahami persoalan perempuan (belum memiliki perspektif gender, sehingga tidak ada terobosan untuk melayani perempuan)

Masalah Perempuan di usaha Produktif pada umumnya adalah:

- a. Usaha produktif yang berstereotype feminin = konveksi ("koden"), batik, makanan, mainan anak, dan lain-lain.
- b. Usaha mikro-kecil lebih banyak di sektor informal.
- c. UKM perempuan dianggap tidak membutuhkan ketrampilan, modal kecil, "sampingan", musiman, sehingga menciptakan image kurang penting
- d. Partisipasi dan akses perempuan di UKM tinggi, tetapi tidak mempunyai kontrol yang tinggi, karena pengambilan keputusan tergantung dari suaminya, sehingga terlambat dalam pengambilan keputusan di sisi bisnis.
- e. Penghargaan terhadap perempuan di UKM adalah lebih rendah dibanding dengan laki-laki di UKM.
- f. Adanya beban kerjanya yang tinggi pada perempuan yang mengakibatkan peran beban ganda.
- g. Akses perempuan terhadap sumberdaya ekonomi rendah, yaitu rendah pada akses modal, pelatihan, dan lain-lain.

Dasar dari kelemahan pelaksanaan peran perempuan dalam program penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

Memberi pembekalan fasilitator tentang konsep dan analisis gender serta mengaplikasikan untuk mengubah keinginan kaum laki-laki maupun perempuan menjadi kebutuhan bersama dalam masyarakat desa. Tujuan pembekalan fasilitator akan konsep gender adalah untuk meningkatkan kepekaan dan kesadaran fasilitator terhadap isu gender di lokasi kerjanya yang kemudian dapat mendampingi masyarakat dan merubah *mind set* masyarakat agar responsif gender dalam membagi peran sosial di masyarakatnya. Untuk itu perlu pelatihan yang dapat dikordinasi oleh Biro Pemberdayaan Perempuan di kabupaten/ kota masing-masing.

Materi fasilitator PNPM harus ada materi konsep, analisis dan aplikasi gender ke dalam program penanggulangan kemiskinan.

Mekanisme pelibatan perempuan seperti tertuang dalam petunjuk teknis PNPM-PPK bukan sekedar *lips service*, namun sebagai acuan pelaksanaan program untuk kesedaran berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketertarikan dan keadilan. Untuk itu, perlu untuk menyesuaikan metode pelibatan perempuan yang disepakati dan disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat.

Meningkatkan kerjasama antar SKPD dalam menyinergikan kinerja dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan masyarakat dengan cara berdialog dan melaksanakan program bersama di kabupaten masing-masing. Dituntut masing-masing SKPD untuk "menjemput bola", terutama antara Bapermas (Badan Pemberdayaan Masyarakat) dengan SKPD lainnya agar sinergisme program dapat dilaksanakan dengan baik sampai dengan pelaksanaan di tingkat desa.

Pengoptimalan fungsi peran pemerintah, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga ke kabupaten agar dapat berperan optimal dalam memfasilitasi masyarakat melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Pengoptimalan peran dan fungsi pemerintah daerah juga harus ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dasar warga negara dan kebutuhan praktis serta strategis gender.

Harus ada ketersediaan data sosial-ekonomi dan budaya penduduk yang terpilah berdasarkan jenis kelamin agar permasalahan dan potensi gender dapat diketahui dan dipetakan dengan jelas dan benar.

Tahu metode pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan melalui metode responsif gender (Tabel 4b) dan pengintegrasian di sektor pertanian (lampiran 6).



b. Cara Mencapai Tujuan Program Penanggulangan Kemiskinan dengan Metodei Responsif Gender (*Participatory*)

ASPEK	KETERANGAN
	Ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan
	Peningkatan partisipasi laki-laki dan perempuan dlm proses pengambilan keputusan
	Kesadaran yang harus ditumbuhkan di kalangan laki-laki dan perempuan unt melihat ada / tidak senjangan gender
	Apakah ada kesenjangan gender akibat ketidaksetaraan akses antara laki-laki dan perempuan thd sumber daya dan pelayanan
an	Peningkatan kesejahteraan keluarga (pemenuhan kebutuhan praktis)

Makalah Biro PP-Prov. Jateng. 2007

## PENUTUP

"Pengintegrasian Isu Gender dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kegiatan Ekonomi Perempuan" merupakan bahan masukan yang dapat digunakan untuk mendukung proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Buku ini berisi instrumen-instrumen mengenai mekanisme pengintegrasian isu gender ke dalam program penanggulangan kemiskinan, dan kegiatan-kegiatan ekonomi perempuan di sektor pertanian.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf atas belum sempurnanya buku ini baik substansi maupun format. Penulis dengan hati terbuka menerima saran, masukan, dan kritik demi perbaikan penulisan buku ini. Mudah-mudahan penjelasan pengintegrasian isu gender dalam penanggulangan kemiskinan beserta lampiran modul-modul dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Terakhir, terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak pengguna buku ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia dan Lembaga Smeru. 2001. Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan. Penelitian Smeru, Jakarta.

2007. Presentase "Penjelasan Tambahan Prioritas V Rkp 2008: Mandiri Dan PKH". Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan Dan UKM Rencanaan Pembangunan Nasional. Juni 2007

Pemberdayaan Perempuan-Provinsi Jawa Tengah. 2007. Makalah Gender dan Disampaikan pada Diskusi "Gender dan Penanggulangan Kemiskinan" di Pemberdayaan Perempuan. 17 Desember 2007.

Priono, S. 2004a. Kondisi dan Penyebab Kemiskinan Multidimensi di TKP3KPK. Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Priono, S. 2004b. Dokumen Ringkas: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat TKP3KPK. Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan

Perkotaan Dalam Negeri Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Kota dan Desa. 2007. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK).

Perencanaan Pekerjaan Umum-Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2007. Petunjuk Operasional PNPM-Mandiri-P2KP.

Perencanaan Pendidikan Nasional. 2004. Pesan Standar Pengarusutamaan Gender Pendidikan.

Perencanaan Pendidikan Nasional. 2004. Pembangunan Kapasitas Kelembagaan: Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

Perencanaan Pendidikan Nasional. 2005. Model Modul Pendidikan Keluarga Pengarusutamaan Gender: Pendidikan, Pelatihan, dan Pendampingan Keluarga.

Perencanaan Pendidikan Nasional. 2005. Model Modul Pendidikan Keluarga Pengarusutamaan Gender: Membangun Masyarakat Desa dengan Pendekatan Potensi dan Lokal.

Perencanaan Pemukiman dan Perumahan, Bappenas. Tanpa Tahun. Kajian Perencanaan Ekonomi Desa untuk Mengatasi Kemiskinan. Bappenas, Jakarta.

Perencanaan 2005 (modified). SEAGA (*Socio Economic And Gender Analysis*) for Policy and rehabilitation Programme Guideline.

Pergerakan PKM Indonesia (Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia). 2003. Kemiskinan dan Keuangan Mikro. Gema PKM Indonesia, Jakarta.

Priono, Soetanto. 2005. Kunci Sukses Bisnis: Kredit Mikro (World Class

king). PT. Elex Media Komputindo; Jakarta.

Swati. 2005. Identifikasi Peubah Rumahtangga Miskin dan Rumahtangga yang  
Di Atas Garis Kemiskinan. Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB Tahun 2004-  
5. LPPM-IPB.

goro, M. 2006. E konomika Pembangunan, Edisi ke 4. UPP STIM YKPN,  
Jakarta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP). 2001. *Pemantapan Kesepakatan  
Prinsip-prinsip Operasional Pengarusutamaan Gender Kesejahteraan dan Perlindungan  
dalam Pembangunan Nasional dan Daerah: Bagian I dan II*. Rakernas  
Pemberdayaan PP & KPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP). 2004. *Bunga Rampai: Panduan dan  
Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan  
Nasional*. Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, BKKBN, dan  
KPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 2005. *Bahan Pembelajaran  
Pengarusutamaan Gender*. Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI,  
BKKBN, dan UNFPA.

Departemen Pekerjaan Umum. 2007. *Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri-P2KP*  
No. 1. Direktorat Jenderal Cipta Karya. Departemen Pekerjaan Umum.

Departemen Pendidikan Nasional (DepDiknas). 2004. *Panduan Pembuatan Position  
Paper*. Jakarta.

Kementerian Perumahan Rakyat. 2007. *Penyusunan Konsep Kebijakan Perkuatan  
Perempuan Dalam Program Pembangunan Perumahan Swadaya*. PT. Delima  
Tata Jo PT Nara Sumatama Hara.

Departemen Pendidikan Nasional, *Menggunakan Lensa Gender Bidang Pendidikan*.

Program Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Republik Indonesia  
2004-2009; Bab 12 Tentang "Peningkatan Kualitas Kehidupan Dan Peran  
Perempuan Serta Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak".

Kelembagaan Sekretariat KKPM. 2004. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Bappenas.  
Kelembagaan Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan.

Kelembagaan Sekretariat TKP3KPK. 2004. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional*.  
Kelembagaan Sekretariat Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Kelembagaan Sekretariat TKP3KPK. 2004. *Proses Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan*.  
Kelembagaan Sekretariat Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Kelembagaan Sekretariat TKP3KPK. 2004. *Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis  
Pemberdayaan Masyarakat*. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Kelembagaan Sekretariat TKP3KPK. 2004. *Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis  
Penciptaan Kesempatan*. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

31. TKP3 KPK. 2004. Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Perlindungan Sosial Bagi Keluarga Rentan dan Miskin. Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
32. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), 2005. Kemiskinan di Indonesia: Perkembangan Data dan Informasi Mutakhir, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Jakarta.
33. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), 2006. Panduan Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Jakarta.
34. World Bank. 2006a. Membuat Pelayanan Bermanfaat bagi Masyarakat Miskin di Indonesia: Titik Fokus untuk Mencapai Keberhasilan di Lapangan. Kantor Perwakilan Bank Dunia, Jakarta.
35. World Bank. 2006b. Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Ikhtisar), Kantor Perwakilan Bank Dunia, Jakarta. World Bank. *Making the New Indonesia Work for the Poor*. Kantor Perwakilan Bank Dunia, Jakarta. 2006b.
36. World Bank. 2006c. *Making the New Indonesia Work for the Poor*. Kantor Perwakilan Bank Dunia, Jakarta.
37. Tim Pengendali (TP) PNPM Mandiri- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 2007. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
38. Petunjuk Teknis PPK.

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Target *Millenium Development Goals (MDGs)*.

NO	TUJUAN <i>MDGs</i>	TARGET <i>MDGs</i>
1	Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan	Mengurangi ½ jumlah penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang dari \$1/ hari Mengurangi ½ jumlah penduduk yang kelaparan
2	Mewujudkan Pendidikan Dasar untuk Semua	Semua anak tamat pendidikan dasar
3	Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Menghapus perbedaan gender dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tahun 2015
4	Mengurangi Angka Kematian Anak	Mengurangi 2/3 dari jumlah kematian anak di bawah usia 5 tahun
5	Meningkatkan Kesehatan Ibu	Mengurangi sampai ¼ resiko jumlah kematian ibu
6	Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya	Menghentikan dan mulai menurunkan laju penyebaran HIV/AIDS Menghentikan dan mulai menurunkan laju penyebaran Malaria serta penyakit menular lainnya
7	Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup	Memadukan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan dan program nasional, serta memulihkan kerusakan berbagai sumberdaya lingkungan Mengurangi sampai setengah proporsi jumlah penduduk yang tidak memiliki akses keberlanjutan untuk mendapatkan air minum bersih Memperbaiki kehidupan setidaknya 100 juta penghuni kawasan kumuh tahun 2020
8	Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan	Mengembangkan sistem perdagangan dan keuangan yang terbuka, berdasarkan pada aturan yang jelas, mudah dipahami, tidak diskriminatif, termasuk komitmen terhadap tata pemerintahan yang baik, pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Menanggapi kebutuhan khusus negara kurang berkembang. Ini termasuk akses bebas tarif dan quota untuk ekspor dari negara-negara tersebut, meringankan beban utang negara miskin dan memberikan bantuan pembangunan yang lebih besar bagi negara berkomitmen mengurangi kemiskinan

## Lampiran 2. Pengertian Istilah-Istilah Berkaitan dengan Gender.

1. Pengarusutamaan gender (PUG) adalah suatu strategi pembangunan nasional yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender.
2. Kesetaraan dan keadilan gender (KKG) adalah suatu kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan nasional.
3. Kerangka analisis kebijakan gender diarahkan pada analisis terhadap akses, partisipasi, manfaat, dan penguasaan dengan pengertian sebagai berikut:
  - a. Akses pada pendidikan mengacu pada pertanyaan apakah warga negara laki-laki dan perempuan memperoleh akses/ peluang yang sama dalam pembangunan.
  - b. Partisipasi dalam pembangunan mengacu pada pertanyaan apakah warga negara laki-laki dan perempuan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
  - c. Penguasaan (*control*) terhadap pembangunan mengacu pada pertanyaan apakah warga negara laki-laki dan perempuan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan bagi dirinya terkait dengan pembangunan nasional.
  - d. Manfaat (*benefit*) pembangunan mengacu pada pertanyaan apakah warga negara laki-laki dan perempuan telah memperoleh manfaat dari pembangunan nasional.
4. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam pembangunan nasional.
5. *Gender Analysis Pathway* adalah salah satu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam menyusun kebijakan/ program/ kegiatan pendidikan responsif gender.
6. *Focal Point* Pengarusutamaan gender adalah individu-individu atau perorangan yang telah memiliki pemahaman dan komitmen tentang gender dan pengarusutamaan gender yang berasal dari berbagai dinas di daerah yang ditunjuk disetiap unit organisasi untuk melaksanakan PUG di segala bidang.
7. Kelompok kerja pengarusutamaan gender adalah adalah kelompok atau organisasi fungsional yang mengelola/menangani masalah gender di lingkungan instansi/lembaganya atau di wilayah kerjanya atau wadah konsultasi bagi para perencana dan pelaksana PUG dari berbagai instansi/lembaga pelaksana PUG di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Anggota Pokja PUG ini dipilih dari para *focal point* yang ada di instansi/lembaga atau di wilayah kerjanya.
8. Buta Gender: Kondisi/keadaan seseorang yang tidak memahami tentang pengertian atau konsep gender (ada perbedaan kepentingan laki-laki dan perempuan).



9. Bias Gender: Kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang memihak pada salah satu jenis kelamin.
10. Netral Gender: Kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak pada salah satu jenis kelamin.
11. Sensitif Gender: Kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender (d disesuaikan dengan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan).
12. Responsif Gender: Kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang sudah memperhitungkan kepentingan laki-laki dan perempuan.

Lampiran 3. Proses Integrasi Isu Gender ke Dalam Tahapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)- Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Pada Lokasi Baru dan Lokasi Lama.

**TAHAP I PENYIAPAN MASYARAKAT**

**1. Sosialisasi di Masyarakat pada Lokasi Baru:**

**a. Pemetaan sosial**

- Sosialisasi program diawali dengan Pemetaan sosial (*social mapping*) yang berkaitan dengan keadaan sosial budaya penduduk, kebiasaan dan pandangan hidup, nilai-nilai budaya masyarakat lokal, jumlah dan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan.
- Pemetaan sosial dilakukan oleh konsultan management kecamatan/ kabupaten bekerjasama dengan dinas-dinas terkait (pendidikan, kependudukan dan KB, ekonomi, kesehatan, BPM)
- Pemetaan sosial sangat penting untuk mengetahui secara garis besar gambaran permasalahan dan potensi masyarakat dan juga kesenjangan gender bidang ekonomi di masyarakat.
- Pemetaan sosial dapat digunakan untuk melihat persamaan dan perbedaan karakteristik masyarakat dari sisi sosial-ekonomi dan budaya.

**b. Sosialisasi Program**

- Sosialisasi program diawali dari pengenalan tujuan program penanggulangan kemiskinan yang intinya memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.
- Sosialisasi juga diarahkan untuk melibatkan semua kelompok masyarakat, terlebih lagi lebih banyak melibatkan partisipasi perempuan agar dapat mempunyai tingkat keberdayaan dan kemandirian yang lebih baik.
- Proses sosialisasi dapat berjalan dengan baik apabila semua unsur yang terlibat pada PNPM-Mandiri-P2KP, mulai dari TKPK Nasional, TKPK Provinsi, TKPK Kabupaten/Kota, Fasilitator Kecamatan, UPK, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) memberikan sosialisasi dengan simpatik, santun, tepat sasaran dan menjelaskan program penanggulangan kemiskinan yang responsif gender dengan tepat dan benar.
- Sosialisasi program dapat dibantu dengan media komunikasi seperti leaflet, majalah PNPM-Mandiri, VCD mengenai partisipasi perempuan dalam PNPM, dan lain-lain.
- Sosialisasi program dapat dilakukan melalui advokasi, audiensi, diskusi (round table discussion) yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang responsif gender.

## 2. Pertemuan Masyarakat pada Lokasi Baru:

### a. Rembug/Musyawarah

- Rembug/ pertemuan masyarakat desa bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai hakekat tujuan program penanggulangan kemiskinan yang intinya memberikan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.
- Pertemuan masyarakat desa diharapkan memberikan kesadaran tentang pentingnya mempertimbangkan gender dalam pembangunan, dan menganggap gender adalah salah satu potensi yang sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan.
- Pertemuan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan kualitas sumberdaya manusia sehingga memiliki:
  - Pemahaman dan sensitivitas gender di lingkungan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan
  - Menggali permasalahan yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan gender, kemiskinan, dan budaya, dengan semangat memecahkan masalah bersama untuk kepentingan bersama
  - Bersama-sama bertekad untuk keluar dari kemelut masalah kemiskinan dengan menata ulang perencanaan pembangunan fisik dan sumberdaya manusia di lingkungan desa/ kelurahan.
- Pertemuan masyarakat mengundang perwakilan kelompok laki-laki maupun perempuan dari berbagai unsur, seperti kelompok PKK, Posyandu, kelompok pengajian, kelompok usaha dagang, kelompok tani, paguyuban kesenian, kelompok arisan/ simpan pinjam.

### b. Tahap Belajar Awal Menggali Kebersamaan

- Tahap belajar awal di desa harus melibatkan semua unsur termasuk kelompok laki-laki dan perempuan.
- TKPK Nasional maupun Propinsi menyediakan bahan-bahan ajar mengenai situasi kemiskinan dan peran gender dalam mengentaskan kemiskinan.
- Tahap belajar awal ini difasilitasi oleh fasilitator kecamatan dengan terlebih dahulu menjelaskan konsep gender dan peran gender dalam mengatasi masalah kemiskinan.
- Menggali masalah secara bersama-sama diantara semua unsur masyarakat mengenai hal-hal sebagai berikut:
  - Potensi fisik dan SDM masyarakat (potensi kelompok laki-laki dan perempuan)
  - Masalah sosial-ekonomi-budaya masyarakat (kendala sosial-budaya perempuan dalam berpartisipasi di sektor ekonomi)
  - Kebutuhan masyarakat dan prioritasnya (kebutuhan praktis laki-laki dan perempuan)
- Menggali bersama permasalahan dan potensi melalui:
  - Transek wilayah desa

- Pemetaan fisik dan sosial masyarakat (data dan informasi mengenai pemetaan sosial dapat diungkapkan disini)

**c. Berdemokrasi & Kesadaran akan Eksistensi Diri**

- Pertemuan masyarakat desa juga ditujukan untuk meningkatkan eksistensi diri dan bangga akan asal usul daerah, budaya asal dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi serta bangga akan potensi perempuan beserta nilai-nilai peran perempuan dalam masyarakat.
- Pertemuan masyarakat desa juga ditujukan untuk berlatih berdemokrasi diantara masyarakat desa untuk menentukan prioritas kebutuhan bersama dengan dilandasi oleh rasa saling menghormati pendapat orang lain.
  - Suara perempuan dilibatkan mulai dari tingkat dusun dan diberi penghormatan atas partisipasi serta kepedulian terhadap pembangunan di daerahnya
  - Perempuan diberi kesempatan untuk menyuarakan kebutuhan dan keinginannya, baik aspek sosial, ekonomi maupun budaya
  - Suara masyarakat miskin dilibatkan mulai dari tingkat dusun, diberi kesempatan menyampaikan keinginan dan kebutuhannya.
- Proses demokrasi di tingkat desa tercermin dalam menentukan prioritas kebutuhan bersama yang berimplikasi pada rencana kegiatan yang diprioritaskan melalui pengambilan keputusan secara musyawarah dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan gender.
- Dalam proses demokrasi ini PERLU ADA KESEPAKATAN ADANYA PROGRAM YANG RESPONSIF GENDÉR, yaitu:
  - Penekanan pada Pihak yang Tertinggal (terutama kelompok perempuan)
  - Penyusunan Program yang Melibatkan Semua Pihak
  - Perubahan Mind-set Tentang Konsep Gender pada semua unsur masyarakat
- Proses demokrasi disini berarti melibatkan semua unsur baik kelompok laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan:
  - Kelompok perempuan yang tidak dapat hadir karena suatu hal dapat memberikan suaranya melalui surat tertulis kepada ketua musyawarah desa. Dengan demikian, meskipun secara fisik kelompok perempuan tersebut tidak datang, namun suara dan haknya sudah masuk kedalam proses pembangunan desa.
  - Mekanisme mengintegrasikan isu gender dan pelibatan kelompok perempuan ke dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan ini harus dipersiapkan dan dilaksanakan.

**d. Pendaftaran Relawan**

- Pertemuan masyarakat desa juga diarahkan untuk membangkitkan jiwa berjuang untuk menjadi relawan pembangunan daerahnya
- Relawan diharuskan dari kelompok laki-laki dan perempuan, dan sebaiknya diberi ketentuan misalnya minimal sepertiga adalah kelompok perempuan.
- Relawan diseleksi berdasarkan kemampuan dan karakter serta semangat untuk melakukan pembangunan desa bersama-sama.

### 3. Review Partisipasi Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) pada Lokasi Lama (Responsif Gender):

#### a. Review Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis)

- Tahapan ini bertujuan untuk menganalisis program PJM Pronangkis apakah sudah responsif gender dalam arti sudah mempertimbangkan persamaan dan perbedaan kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan serta memberikan kesempatan yang sama dalam akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pada laki-laki dan perempuan.
- Program PJM Pronangkis harus mengikutsertakan partisipasi perempuan dalam pemberdayaan ekonomi produktif.
- Tabel 3a dan 3b berikut ini dapat memberi gambaran Lingkup dan Aspek-Aspek Review Program yang Responsif Gender yang berkaitan dengan review program, review kelembagaan dan review keuangan.

Tabel 3a. Lingkup dan Aspek-Aspek Review Program yang Responsif Gender.

NO	LINGKUP REVIEW PARTISIPATIF	TAMBAHAN ASPEK-ASPEK YANG DIREVIEW
1	Review Program <i>(dengan mengikutsertakan partisipasi perempuan dalam pemberdayaan ekonomi produktif)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ % KK dan % warga yg menerima manfaat P2KP dan program lainnya (baik langsung maupun tak langsung) berdasarkan jenis kelamin dan dianalisis berdasarkan analisis gender</li> <li>▪ % jenis kegiatan yang dialokasikan untuk kelompok perempuan</li> <li>▪ % keberhasilan atau kesesuaian program dengan keinginan perempuan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi produktifnya.</li> </ul>
2	Review Kelembagaan (UP-UP, Pra LKM, LKM) <i>(dengan mengikutsertakan partisipasi perempuan dalam kelembagaan)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ % jml relawan berdasarkan jenis kelamin</li> <li>▪ % kelompok yang terlibat baik kelompok laki-laki, perempuan dan campuran</li> <li>▪ Intensitas pertemuan kelompok perempuan dibandingkan dengan kelompok laki-laki</li> <li>▪ Apakah sudah ada Pokja Gender di Kabupaten/Kota yang menangani kemiskinan berwawasan gender?</li> </ul>
3	Review Keuangan (akuntabilitas & pembukuan UPK, Sekretariat dll) <i>(dengan gender budgeting, yaitu memastikan bahwa anggaran mempertimbangkan kepentingan laki-laki dan perempuan)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ % dana yang dialokasikan untuk KK perempuan/ warga perempuan/ kelompok perempuan.</li> <li>▪ % dana yang berhasil digalang oleh kelompok perempuan dibandingkan dengan kelompok laki-laki</li> <li>▪ % kemacetan dana pinjaman yang berasal dari anggota perempuan dibandingkan dengan laki-laki</li> </ul>

Keterangan: (...huruf italic...) adalah saran-saran yang berhubungan dengan peningkatan peran perempuan sebagai bagian dari isu kesenjangan gender.

Tabel 3b. Langkah-langkah Pelaksanaan Kegiatan Review Partisipatif Pronangkis Responsif Gender

NO	WAKTU	KEGIATAN	PELAKU	OUTPUT
1	Bulan 1, minggu ke-1	Bimbingan review partisipatif kepada fasilitator oleh KMW. <i>(diarahkan untuk meningkatkan partisipatif masyarakat baik laki-laki maupun perempuan; terutama penekanan pada partisipatif ekonomi perempuan)</i>	Pelaksana: Korkot/ TA Pelatihan Peserta: Fasilitator Fasilitator: Pemandu Nasional KMW/ KMP	Fasilitator mampu memfasilitasi BKM melakukan review partisipatif
2	Bulan 1, minggu ke-1	Penyepakatan rencana pertemuan warga untuk pelaksanaan lokakarya review partisipatif pronangkis <i>(perlu diyakinkan adanya kesepakatan keterwakilan partisipatif dari kelompok perempuan)</i>	Pelaksana: Lurah/ Kades Peserta: BKM, Relawan, LPM/ BPD Fasilitator: Fasilitator kelurahan	Terlaksananya pertemuan warga untuk menyepakati pelaksanaan lokakarya review partisipatif pronangkis
3	Bulan 1, minggu ke-2	Bimbingan pelaksanaan lokakarya review partisipatif pronangkis kepada BKM dan relawan <i>(perlu diyakinkan adanya bimbingan partisipatif dari kelompok perempuan di BKM dan sebagai relawan)</i>	Pelaksana: Tim fasilitator Peserta: BKM & Relawan	BKM dan Relawan mampu memfasilitasi pelaksanaan lokakarya review partisipatif pronangkis.
4	Bulan 1, minggu ke-2	Pelaksanaan lokakarya review partisipatif pronangkis tingkat kelurahan/ desa, dikoordinir oleh BKM <i>(perlu diyakinkan adanya keterwakilan partisipatif dari kelompok perempuan pada lokakarya)</i>	Pelaksana: BKM Peserta: Representasi/ perwakilan masyarakat Fasilitator: Relawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Masyarakat sepakat melakukan reorientasi PS dan PJM Pronangkis</li> <li>o Pembentukan tim PP untuk melaksanakan re-orientasi PS &amp; PJM pronangkis</li> <li>o RKTL Tim PP.</li> </ul>

Keterangan: (...huruf italic...) adalah saran-saran yang berhubungan dengan peningkatan peran perempuan sebagai bagian dari isu kesenjangan gender.

## TAHAP 2: PERENCANAAN MASYARAKAT

### 3. Refleksi kemiskinan Pada Lokasi Baru:

#### a. Penggalian Akar Persoalan Kemiskinan

- Penggalian akar persoalan kemiskinan diarahkan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender dalam 4 faktor utama, yaitu akses, kontrol, partisipasi dan manfaat sebagai berikut:
  - Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber-sumber daya pembangunan?
  - Siapa yang menguasai (memiliki kontrol) sumber-sumber daya pembangunan tersebut?
  - Bagaimana partisipasi perempuan dan laki-laki dalam berbagai tahapan pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan?
  - Apakah perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan atau sumber-sumber daya pembangunan yang ada?

#### b. Identifikasi/ Kriteria Kemiskinan

- Pada langkah ini, fasilitator beserta masyarakat bersama-sama mengidentifikasi kriteria kemiskinan berdasarkan cara pandang penduduk setempat atau disebut *Participatory Poverty Assessment (PPA)*, baik kelompok laki-laki maupun perempuan secara terpisah.
- Identifikasi/ kriteria kemiskinan berdasarkan jenis kelamin ini memberikan cara pandang berbeda antara laki-laki dan perempuan berdasarkan perbedaan kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman.
- Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang berakar dari masalah kesenjangan gender ini akan dapat terungkap, sehingga permasalahan dan rencana mengatasi masalah akan semakin jelas. Semua ini dikaitkan dengan meningkatkan kondisi 4 faktor utama perempuan dalam akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat dari sumberdaya pembangunan daerah:
  - Apakah kesenjangan gender yang berdampak pada kemiskinan terjadi mulai dari wilayah domestik karena adanya kendala budaya bagi perempuan untuk berkontribusi di sektor ekonomi?
  - Apakah kesenjangan gender yang berdampak pada kemiskinan terjadi karena adanya kebijakan yang masih bias gender?

#### c. Identifikasi Harapan & Potensi untuk Menanggulangnya

- Pada pertemuan masyarakat digali identifikasi harapan dan potensi untuk menanggulangnya
- Identifikasi harapan masyarakat
  - Harapan kelompok masyarakat perempuan
    - Jangka pendek, menengah, panjang
    - Aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana

- Harapan kelompok masyarakat laki-laki
  - Jangka pendek, menengah, panjang
  - Aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana
- Potensi masyarakat
  - Potensi sumberdaya alam (pertanian, perkebunan, perikanan, migas)
  - Potensi sumberdaya manusia (attitude, nilai/ norma, kognitif, psiko-sosial, spiritual/ mental)

#### 4. Pemetaan Swadaya Pada Lokasi Baru atau

##### Re-orientasi Pemetaan Swadaya berbasis IPM-MDGs Pada Lokasi Lama:

##### a. Identifikasi Pencacahan KK Miskin pada Lokasi Baru

##### Atau Klarifikasi KK Miskin yg Berorientasi Pada IPM-MDGs di Lokasi Lama

- Klarifikasi KK miskin harus dilakukan secara bersama-sama (baik bekerjasama dengan kelompok perempuan dan kelompok laki-laki serta aparat desa dan tokoh masyarakat serta fasilitator) dan diarahkan sesuai dengan pencapaian tujuan IPM-MDGs.
- Klarifikasi KK miskin dilakukan sesuai dengan indikator kemiskinan baik makro (14 kriteria BPS) maupun mikro (indikator kemiskinan berdasarkan Participatory Poverty Assessment) baik menurut kelompok laki-laki maupun perempuan.

##### b. Kajian Permasalahan, Potensi Sumberdaya dan Kebutuhan Pada Lokasi Baru Atau Re-orientasi Kajian Permasalahan Potensi Sumberdaya dan Kebutuhan:

- Pada langkah ini, semua unsur masyarakat sebagai perencana di wilayahnya akan mengetahui hasil kajian permasalahan, potensi sumberdaya dan kebutuhannya sendiri.
- Kajian permasalahan, potensi sumberdaya dan kebutuhan masyarakat didasarkan atas semangat partisipatif semua unsur masyarakat.
- Masyarakat sebagai perencana merumuskan kembali permasalahan potensi sumberdaya dan juga mengkaji ulang prioritas kebutuhan masyarakat secara bersama-sama.

##### c. Pemetaan: Sebaran KK Miskin, Kondisi Lingkungan, Sosial-Ekonomi

- Pemetaan mengenai penduduk miskin (siapa, dimana, jumlah KK laki-laki, jumlah KK perempuan)
- Pemetaan masalah sosial-ekonomi dan budaya beserta cara mengatasi masalah
- Pemetaan lingkungan (kumuh, banjir, gersang, subur, dll)
- Reorientasi pemetaan diarahkan juga untuk memetakan KK miskin, permasalahan serta potensi yang menggambarkan penduduk perempuan, % KK perempuan baik usia produktif maupun lansia juga sangat penting.
- Reorientasi pemetaan sosial dan ekonomi ini akan membantu mengarahkan kembali perencanaan kegiatan dalam hal:



- Langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan peran perempuan di sektor ekonomi?
- Bagaimana agar dapat dipastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi lebih optimal dalam program penanggulangan kemiskinan dan mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan tersebut?

**d. Langkah 2. Tahapan Reorientasi Pemetaan Swadaya (Tabel 4c dan 4d).**

Tabel 3c. Data Pemetaan Swadaya yang Mendukung IPM-MDGs yang Responsif Gender

NO	HASIL PS	TAMBAHAN IPM MDGs	SUMBER DATA
1	Data KK Miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rata-rata pendapatan per kapita KK laki-laki dibandingkan dengan KK Perempuan</li> <li>▪ KK miskin berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).</li> </ul>	BPS
2	Data Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Status Gizi anak balita berdasarkan jenis kelamin</li> <li>▪ Status kesehatan anak balita berdasarkan jenis kelamin</li> <li>▪ Angka kematian balita berdasarkan jenis kelamin</li> <li>▪ Angka kematian ibu</li> </ul>	BPS
3	Data Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APS, APK mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, PT berdasarkan jenis kelamin</li> <li>▪ Angka Buta aksara berdasarkan jenis kelamin</li> <li>▪ Rata-rata lama pendidikan berdasarkan jenis kelamin.</li> </ul>	BPS
4	Data Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ % keterlibatan perempuan dalam program pembangunan ekonomi di wilayahnya</li> <li>▪ % perempuan bekerja dibandingkan dengan perempuan tidak bekerja</li> <li>▪ Jml kelompok ekonomi perempuan</li> </ul>	BPS

Tabel 3d. Langkah-langkah Pelaksanaan Kegiatan Re-orientasi Pemetaan Swadaya Responsif Gender

NO	WAKTU	KEGIATAN	PELAKU	OUTPUT
1	Bulan 1, minggu ke-3 & 4	Bimbingan kepada Tim PP untuk pelaksanaan re-orientasi PS dan fasilitator. <i>(memastikan keterlibatan perempuan dan masalah/ isu gender di wilayahnya)</i>	Pelaksana: Tim fasilitator Peserta: Tim PP Fasilitator: BKM	Tim PP mampu melaksanakan reorientasi PS
2	Bulan 2, minggu ke-1	Pelaksanaan identifikasi dan pencacahan KK miskin di tingkat masyarakat oleh Tim PP <i>(memastikan data KK miskin laki-laki dan perempuan)</i>	Pelaksana: Tim PP Peserta: masyarakat keluarga miskin Fasilitator: BKM	Data pemetaan keluarga miskin, lengkap beserta nama-nama anggota keluarga.
3	Bulan 2, minggu ke-2 & 3	Pelaksanaan pemetaan dan penajaman kajian persoalan dan potensi sumberdaya (lingkungan, sosial dan ekonomi), kajian kelembagaan oleh Tim PP	Pelaksana: Tim PP Peserta: Masyarakat Fasilitator: BKM	Data dan peta kondisi lingkungan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kelembagaan yang ada (kondisi fisik: kuantitatif & kualitatif,

		(memastikan pemetaan isu gender dan potensi perempuan di wilayahnya)		persoalan dan potensi terkait).
4	Bulan 2, minggu ke-4	Pelaksanaan lokakarya PS tingkat kelurahan/ desa oleh BKM (memastikan keterlibatan wakil perempuan dan masalah/ isu gender di wilayahnya)	Pelaksana: BKM Peserta: Representasi/ perwakilan masyarakat Fasilitator: Tim PP	o Dokumen hasil PS.
5	Bulan 2, minggu ke-4	Sosialisasi hasil PS kepada masyarakat kelurahan/ desa (memastikan keterlibatan perempuan dan masalah/ isu gender di wilayahnya)	Pelaksana: BKM & relawan Peserta: masyarakat	Bukti sosialisasi (berita acara sosialisasi, tanda terima penempatan informasi).

Keterangan: (...huruf italic...) adalah saran-saran yang berhubungan dengan peningkatan peran perempuan sebagai bagian dari isu kesenjangan gender.

#### 4. Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat(BKM) Pada Lokasi Baru:

##### a. Persiapan (FGD, Kelembagaan, Kepemimpinan Moral)

- Dilakukan identifikasi calon-calon anggota BKM dari berbagai kelompok masyarakat.
- Persiapan pembentukan BKM dilakukan dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara fasilitator dan aparatur desa, kecamatan, tokoh masyarakat baik laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok masyarakat (kelompok usaha, kelompok sosial, kelompok keagamaan)
- Disepakati bersama antara fasilitator dan masyarakat serta aparat pemerintahan daerah adanya kuota jumlah anggota BKM dari unsur kelompok perempuan.
- Sosialisasi adanya pemilihan calon BKM ke masyarakat dengan jadwal yang disepakati.

##### b. Pemilihan Utusan Warga

- Melakukan pemilihan utusan warga dari sejumlah calon yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat (laki-laki dan perempuan) dari berbagai dusun.
- Pemilihan utusan warga didasarkan atas usulan dari kelompok masyarakat dengan kriteria yang disepakati bersama.

##### c. Pemilihan anggota BKM dan pembentukan BKM

- Melakukan pemilihan utusan warga dengan kuota jumlah anggota BKM laki-laki dan perempuan yang disepakati.
- Pembentukan BKM sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh proyek.

**6. Perencanaan Partisipatif Menyusun PJM Pronangkis Berbasis Peningkatan IPM-MDGs Pada Lokasi Baru atau Re-orientasi PJM Pronangkis Berbasis Kinerja pencapaian Target IPM-MDGs pada Lokasi Lama:**

Tabel berikut ini menjelaskan secara detil perencanaan partisipatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perumusan harapan kelurahan/ desa
- b. Analisis persoalan, potensi dan kebutuhan
- c. Prioritasisasi Program
- d. Rencana Program 3 tahun dan 1 tahun
- e. Re-Orientasi PJM Pronangkis-IPM dan langkah-langkahnya disajikan pada Tabel 3e dan 3f.

**Tabel 3e. Lingkup dan Aspek-Aspek Re-orientasi PJM-Pronangkis yang Responsif Gender**

NO	LINGKUP	TAMBAHAN ASPEK-ASPEK RE-ORIENTASI PJM PRONANGKIS
1	Harapan Ke depan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga meningkat</li> <li>▪ Jumlah kelompok ekonomi perempuan meningkat</li> <li>▪ Persentase KK miskin berkurang (terutama KK perempuan)</li> <li>▪ Status gizi balita meningkat (termasuk balita perempuan)</li> <li>▪ Angka putus sekolah berkurang (terutama siswa perempuan)</li> </ul>
2	Klasifikasi Program Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program terkait dengan peningkatan ekonomi perempuan</li> <li>▪ Program terkait dengan perkuatan kelembagaan ekonomi perempuan</li> <li>▪ Program terkait dengan keterlibatan perempuan dalam program dan pembangunan ekonomi di wilayahnya.</li> </ul>
3	Klasifikasi Prioritas Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program yang disepakati bersama yang dianggap sangat penting dan juga melibatkan representasi dari kelompok perempuan</li> <li>▪ Program dapat diselesaikan dalam 1 tahun</li> </ul>
4	Klasifikasi Pembiayaan Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program dapat dibiayai dahulu oleh Pemda dan kemudian dibiayai oleh swadaya masyarakat.</li> </ul>

Tabel 3f. Langkah-langkah Pelaksanaan Orientasi PJM Pronangkis adalah:

NO	WAKTU	KEGIATAN	PELAKU	OUTPUT
1	Bulan 3, minggu ke-1	Bimbingan kepada Tim Perencanaan Partisipatif untuk pelaksanaan re-orientasi PJM Pronangkis oleh fasilitator. (memastikan keterlibatan wakil perempuan dan masalah/ isu gender di wilayahnya)	Pelaksana: BKM & Tim fasilitator Peserta: Tim PP Pemandu: Fasilitator	Tim Perencanaan Partisipatif mampu melaksanakan rangkaian kegiatan re-orientasi PJM Pronangkis.
2	Bulan 3, minggu ke-1	Lokakarya perencanaan partisipatif kelurahan/ desa yang dikoordinir oleh BKM (memastikan keterlibatan wakil perempuan dan masalah/ isu gender di wilayahnya)	Pelaksana: BKM & Lurah/ Kades Peserta: representatif masyarakat dan stakeholders tingkat kelurahan / desa Fasilitator: Tim PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tersusunnya visi dan misi kelurahan untuk penanggulangan kemiskinan.</li> <li>o Tersusunnya matriks persoalan dan daftar prioritas.</li> <li>o Tersusunnya matriks rencana program penanggulangan kemiskinan lengkap dengan target capaian.</li> </ul>
3	Bulan 3, minggu ke-2	Penyusunan draft dokumen PJM Pronangkis oleh Tim Perencanaan Partisipatif (memastikan memasukkan isu permasalahan gender dan upaya pemberdayaan ekonomi perempuan yang signifikan dalam perencanaan partisipatif di wilayahnya)	Pelaksana: Tim PP Peserta: seluruh anggota Tim PP Fasilitator: BKM	Draft dokumen PJM Pronangkis yang menghasilkan daftar rencana program 3 tahun dan rencana tahunan lengkap dengan klasifikasi sumber pembiayaannya.
4	Bulan 3, minggu ke-3	Konsultasi dan sosialisasi perencanaan pronangkis di kelurahan/ desa (pameran perencanaan partisipatif, bazar, lelang amal penanggulangan kemiskinan) (memastikan perencanaan yg responsif gender dengan menekankan pemberdayaan ekonomi perempuan)	Pelaksana: BKM & Lurah/ Kades Peserta: seluruh masyarakat kelurahan yang peduli Fasilitator: Tim PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Catatan proses usulan / ide/ gagasan masyarakat terhadap draft yang telah disusun.</li> <li>o Kesepakatan-kesepakatan prioritas program</li> <li>o Draft rencana pembiayaan program (hasil lelang amal).</li> </ul>
5	Bulan 3, minggu ke-4	Revisi final dokumen PJM Pronangkis oleh Tim Perencanaan Partisipatif & BKM (memastikan perencanaan yg responsif gender dengan menekankan pemberdayaan ekonomi perempuan)	Pelaksana: BKM & Tim PP Peserta: Anggota BKM, UP-UP & Anggota Tim PP Fasilitator: Fasilitator sebagai pengendali jaminan kualitas PJM	Dokumen PJM Pronangkis kelurahan/ desa

Keterangan: (...huruf italic...) adalah saran-saran yang berhubungan dengan peningkatan peran perempuan sebagai bagian dari isu kesenjangan gender.

- f. Uji Publik dan penetapan PJM Pronangkis.
- Uji publik dilakukan secara transparan dengan melibatkan semua unsur masyarakat.

**7. Koordinasi Rencana PJM Pronangkis dengan Rencana Kelurahan/Desa Berbasis IPM-MDGs Pada Lokasi Baru dan Lokasi Lama:**

**a. Sosialisasi ke Seluruh Stakeholder Kelurahan/Desa dengan Menjunjung Tinggi Prinsip-prinsip Perencanaan yang Responsif Gender:**

1. Perencanaan kebijakan/ program/ kegiatan yang responsif gender dilandasi atas analisis gender
  2. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti: peran, akses, manfaat, dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan maupun laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga perencanaan ini akan terkait dalam perencanaan kebijakan maupun perencanaan program sampai operasionalnya di lapangan.
  3. Perencanaan yang responsif gender penting dilakukan dengan tujuan agar tersusun program penanggulangan kemiskinan yang responsif gender.
- c. Menyiapkan komunikasi, informasi dan edukasi untuk membantu unit kerja dalam melaksanakan sosialisasi program penanggulangan kemiskinan yang berwawasan gender.
- d. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan PUG di unit masing-masing.
- b. Lingkup dan Aspek-Aspek Koordinasi PJM Pronangkis disajikan di Tabel 3g dan langkah-langkah pelaksanaan koordinasi PJM Pronangkis-IPM disajikan di Tabel 3h.

Tabel 3g. Lingkup dan aspek-aspek tahapan Koordinasi PJM Pronangkis adalah:

NO	LINGKUP	TAMBAHAN ASPEK-ASPEK ORIENTASI PJM PRONANGKIS
1	Koordinasi Program Bersama	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Integrasi PJM Pronangkis dengan Program Biro Pemberdayaan Perempuan dan Bapermas di wilayahnya</li> <li>o Koordinasi PJM Pronangkis dengan Program Pronangkis lainnya yang ada di masyarakat.</li> <li>o Koordinasi PJM Pronangkis dengan berbagai pihak seperti SKPD terkait di wilayahnya.</li> </ul>
2	Integrasi Program bersama melalui Musrenbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>o PJM Pronangkis harus dijadikan program Musrenbang dari mulai tingkat desa, kecamatan sampai ke pemkot/ kabupaten.</li> </ul>

Tabel 3h. Langkah-langkah pelaksanaan koordinasi PJM Pronangkis IPM

NO	WAKTU	KEGIATAN	PELAKU	OUTPUT
1	Bulan 4, minggu ke-1	Musyawaharah warga penyepakatan integrasi PJM Pronangkis sebagai bagian dari program Kelurahan/ Desa. <b>(memastikan memasukkan isu permasalahan gender dan upaya pemberdayaan ekonomi perempuan yang signifikan dalam perencanaan partisipatif di wilayahnya)</b>	Pelaksana: BKM & Lurah/ Kades Fasilitator: Tim Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Adanya kesepakatan untuk mengintegrasikan PJM Pronangkis ke dalam program keluarahan/ desa.</li> <li>o Penetapan jenis Program Bersama berbasis peningkatan IPM yang akan dijadikan usulan kelurahan melalui Musrenbang.</li> <li>o Konsultasi Publik usulan yang akan diajukan ke Musrenbang.</li> </ul>
2	Bulan 4, minggu ke-1	Penetapan dan penerbitan surat bahwa PJM Pronangkis yang telah disusun bersama sebagai keputusan kelurahan/ desa <b>(memastikan pada penerbitan surat tentang upaya pemberdayaan ekonomi perempuan yang signifikan dalam keputusan bersama perencanaan partisipatif di wilayahnya)</b>	Pelaksana: Lurah/ Kades	Surat Keputusan Lurah/ Kades tentang PJM Pronangkis sebagai program nagkis Kelurahan/ Desa
3	Bulan 4, minggu ke-1	Sosialisasi PJM Pronangkis kepada warga masyarakat dan stakeholders kelurahan/ desa <b>(memastikan adanya sosialisasi pentingnya upaya pemberdayaan ekonomi perempuan untuk ikut menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya)</b>	Pelaksana: Tim PP Fasilitator: BKM, Lurah/ Kades	Seluruh masyarakat mengetahui PJM Pronangkis sebagai keputusan kelurahan/ desa.
4	Bulan 4, minggu ke-2	Pemasaran program PJM Pronangkis kepada pemerintah dan sumberdaya lainnya (swasta). <b>(memastikan memasukkan isu permasalahan gender dan upaya pemberdayaan ekonomi perempuan yang signifikan dalam pemasaran program PJM Pronangkis)</b>	Pelaksana: BKM & UP-UP Fasilitator: Relawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>o PJM Pronangkis dapat diakomodir ke dalam program pemerintah melalui mekanisme Musrenbang kelurahan/ desa, kecamatan, forum SKPD dan Kabupaten/ Kota.</li> <li>o PJM Pronangkis dapat menarik minat swasta untuk memberikan peluang kerjasama dengan pihak swasta dalam penanggulangan kemiskinan.</li> </ul>

Keterangan: (...huruf italic...) adalah saran-saran yang berhubungan dengan peningkatan peran perempuan sebagai bagian dari isu kesenjangan gender.

- c. Penyepekatan sbg Program Kel/ Desa
- d. Matriks Klasifikasi Kontribusi Sb daya Masyarakat dan *Channeling* Program
- e. Marketing Sosial PJM Pronangkis
  - Marketing sosial PJM Pronangkis dilakukan bersama-sama antara konsultan manajemen, fasilitator dan masyarakat baik internal maupun eksternal.
  - Marketing sosial PJM Pronangkis juga diarahkan ke sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam menanggulangi masalah kemiskinan.

**TAHAP 3: PENCAIRAN BLM PRONANGKIS**

**8. Pengajuan dan Administrasi Pencairan Dana BLM Pada Lokasi Baru dan Lokasi Lama**

- Pengajuan dana juga diarahkan pada alokasi pemberdayaan ekonomi perempuan.

**TAHAP 3. PENCAIRAN BLM PRONANGKIS**

Lingkup dan aspek-aspek kegiatan pengajuan dan administrasi pencairan dana BLM disajikan pada Tabel 3i dan langkah-langkah pengajuan dan administrasi pencairan dana BLM disajikan pada Tabel 3j sebagai berikut:

Tabel 3i. Lingkup dan aspek-aspek kegiatan pengajuan dan administrasi pencairan dana BLM

NO	LINGKUP	TAMBAHAN ASPEK-ASPEK PENGAJUAN DAN ADMINISTRASI DANA BLM
1	Pemahaman tentang dana BLM	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sosialisasi dana BLM sebagai stimulan pemberdayaan ekonomi, termasuk pemberdayaan ekonomi perempuan untuk membentuk masyarakat mandiri dalam rangka penanggulangan kemiskinan.</li> <li>o Sosialisasi dana BLM adalah diperuntukkan untuk bermanfaat bagi semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.</li> </ul>
2	Transparansi dan akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Dana BLM dialokasikan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dan harus terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk itu perlu keterwakilan dari berbagai kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan.</li> <li>o Sistem monitoring dan evaluasinya juga harus melibatkan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.</li> </ul>
3	Kontrol Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pengajuan proposal juga melibatkan semua kelompok masyarakat, laki-laki maupun perempuan berdasarkan kebutuhannya.</li> <li>o Pemanfaatan dana disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat secara musyawarah, namun demikian harus ada keterwakilan bagi kepentingan pemberdayaan ekonomi perempuan di wilayahnya.</li> </ul>

Tabel 3j. Langkah-langkah pengajuan dan administrasi pencairan dana BLM

NO	WAKTU	KEGIATAN	PELAKU	OUTPUT
1	Bulan 4, minggu ke-3	Coaching Administrasi Pencairan dana BLM P2KP oleh KMW. (memastikan pencairan dana sesuai dengan perencanaan yang memasukkan isu permasalahan gender)	Pelaksana: KPPN, PJOK, BKM & Relawan Masyarakat Fasilitator: KMW	Seluruh para pihak yg terkait dalam proses administrasi pencairan dana BLM memiliki persepsi serta pemahaman yang sama tentang tata cara administrasi dan mekanisme pencairan dana BLM.
2	Bulan 4, minggu ke-3	Penyiapan Berkas Pencairan oleh BKM & UP-UP yang difasilitasi oleh fasilitator (memastikan penyiapan berkas sesuai dengan perencanaan yang responsif gender)	Pelaksana: BKM & UP-UP Fasilitator: KMW/ Tim Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> <li>o BKM &amp; UP-UP memiliki kesiapan dalam melakukan proses penyiapan kelengkapan pencairan.</li> <li>o Kelengkapan Dokumen Pencairan sesuai tahapan yg akan dicairkan.</li> </ul>
3	Bulan 4, minggu ke-4	Verifikasi kelengkapan Dokumen Pencairan oleh PJOK (memastikan verifikasi harus teliti dan cermat)	Pelaksana: PJOK, BKM & UP-UP Fasilitator:: Tim Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> <li>o PJOK mampu memberikan jtifikasi kelayakan dokumen pencairan dana BLM yg diusulkan BKM</li> <li>o Dokumen Kelengkapan pencairan diverifikasi PJOK</li> <li>o Permohonan Pembayaran yg dilampiri dokumen PJM Pronangkis</li> </ul>
4	Bulan 5, minggu ke-1	Verifikasi Dokumen Pencairan oleh Pejabat PK Kabupaten/ Kota dan Korkot (memastikan verifikasi harus teliti dan cermat)	Pelaksana: PJOK & Pej. PK Kab/ Kota Fasilitator: Korkot	<ul style="list-style-type: none"> <li>o PJM Pronangkis dapat diakomodir ke dalam program pemerintah melalui mekanisme Musrenbang kelurahan/ desa, kecamatan, forum SKPD dan Kabupaten/ Kota.</li> <li>o PJM Pronangkis dapat menarik minat swasta untuk memberikan peluang kerjasama dengan pihak swasta dalam penanggulangan kemiskinan.</li> </ul>
5	Bulan 5, minggu ke-1	Verifikasi Dokumen Pencairan oleh SNVT PBL Propinsi dan TL KMW (memastikan verifikasi harus teliti dan cermat)	Pelaksana: Pej. PK Kab/ Kota & SNVT PBL Prop. Fasilitator: KMW	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Penerbitan SPM kepada KPPN Kota/ Kab untuk membayarkan sejumlah dana langsung ke rekening BKM</li> </ul>
6	Bulan 5, minggu ke-2	Verifikasi oleh KPPN dan penerbitan SP2D (memastikan verifikasi harus teliti dan cermat)	Pelaksana: KPPN, SNVT PBL Propinsi. Fasilitator: KMW	<ul style="list-style-type: none"> <li>o KPPN Pembayar di Kab/Kota menerbitkan SP2D ke Bank Pelaksana dimana KPPN tersebut membuka rekening.</li> <li>o Bank Pelaksana Daerah mentransfer dana BLM ke rekening BKM sesuai SP2D yang diterima.</li> </ul>



Keterangan: (...huruf italic...) adalah saran-saran yang berhubungan dengan peningkatan peran perempuan sebagai bagian dari isu kesenjangan gender.

### 9. Pencairan Dana BLM Dan Pembentukan KSM Pada Lokasi Baru dan Lokasi Lama

- Pencairan dana juga diarahkan pada monitoring dan evaluasi kegiatan dengan memperdulikan penggunaan dana untuk pemberdayaan ekonomi perempuan.
- Lingkup dan aspek-aspek kegiatan pencairan dana BLM dan pengembangan KSM disajikan pada Tabel 3k, adapun langkah-langkah pencairan dana BLM dan Pengembangan KSM disajikan pada Tabel 3l sebagai berikut:

Tabel 3k. Lingkup dan aspek-aspek kegiatan pencairan dana BLM dan pengembangan KSM

NO	LINGKUP	TAMBAHAN ASPEK-ASPEK PENCAIRAN DANA BLM DAN PENGEMBANGAN KSM
1	Pengembangan KSM	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Ada keterlibatan perempuan dalam pengembangan KSM</li> <li>o Pengembangan KSM juga harus ada gender awareness yang berhubungan dengan permasalahan isu gender dan upaya penanggulangan isu tersebut.</li> </ul>
2	Pencairan Dana BLM ke KSM dan Pemanfaatan dana oleh anggota KSM	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Penetapan prioritas usulan KSM oleh BKM harus dipastikan sudah responsif gender dalam arti sudah mempertimbangkan masalah gender dan upaya penanggulangannya.</li> <li>o Alokasi dana BLM diharapkan dapat mengatasi permasalahan isu gender dalam rangka penanggulangan kemiskinan.</li> </ul>

Tabel 3l. Langkah-langkah pencairan dana BLM dan Pengembangan KSM

NO	WAKTU	KEGIATAN	PELAKU	OUTPUT
1	Bulan 5, minggu ke-3	Pencairan dana BLM tahap 1 ke rekening BKM.	Pelaksana: KPPN, Fasilitator: KMW & PJOK	Dana BLM Tahap I (40%) tersedia di rekening BKM
2	Bulan 5, minggu ke-3	Konsultasi Publik Ketersediaan Dana BLM.	Pelaksana: BKM Fasilitator: Relawan	Masyarakat tahu dan paham posisi keuangan BKM dengan cairnya dana BLM Pronangkis.
3	Bulan 5, minggu ke-4	Pelaksanaan kegiatan dengan BLM Pronangkis Tahap 1 (40%).	Pelaksana: UP-UP/ Panitia/ KSM/ Masyarakat Fasilitator:: BKM, Lurah dan Relawan.	Prioritas kegiatan PJM Pronangkis IPM mulai direalisasi sesuai kesepakatan bersama (jenis program, jadwal, pelaksana, dll).
4	Dapat mulai setelah hasil PS dan menerus	Sosialisasi Konsepsi KSM dan FGD tentang Dinamika Kelompok (memastikan adanya sosialisasi pentingnya upaya pemberdayaan ekonomi perempuan untuk ikut	Pelaksana: BKM, UP-UP dan Relawan Fasilitator: Tim Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Masyarakat paham maksud dan tujuan pembentukan KSM</li> <li>o Masyarakat memiliki motivasi kuat untuk membangun atau membentuk KSM sebagai wadah</li> </ul>

		<b>menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya)</b>		kepentingan bersama..
5	Dapat mulai setelah hasil PS dan menerus	Pengorganisasian dan pendaftaran KSM ke BKM (memastikan adanya partisipasi laki-laki dan perempuan, jangan sampai ada golongan yang terabaikan)	Pelaksana: Masyarakat. Fasilitator: BKM, UP-UP, Relawan dan Tim Fasilitator.	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Masyarakat mempraktekkan tata cara pembentukan KSM dan/ atau melakukan revitalisasi kelompok yang sudah ada menjadi KSM sesuai konsepsi P2KP.</li> <li>o Masyarakat secara mandiri mendaftarkan KSM yang telah dibentuknya ke BKM.</li> </ul>
6	Dapat mulai setelah hasil PS dan menerus	Justifikasi kelayakan KSM oleh BKM (memastikan adanya keberpihakan pada kelompok marjinal)	Pelaksana: BKM. Fasilitator: Tim Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> <li>o BKM dan UP BKM mampu melakukan verifikasi kelayakan KSM</li> <li>o Anggota BKM mampu mengambil keputusan secara demokratis mengenai kelayakan KSM</li> </ul>
7	Dapat mulai setelah hasil PS dan menerus	Diseminasi Kaidah Umum dan bimbingan teknis penyusunan usulan kegiatan KSM (memastikan adanya keberpihakan pada kelompok marjinal)	Pelaksana: BKM, UP-UP dan Relawan. Fasilitator: Tim Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Anggota BKM, UP-UP dan Relawan memiliki pemahaman dan kemampuan melakukan fasilitasi teknis penyusunan usulan KSM.</li> </ul>
8	Dapat mulai setelah hasil PS dan menerus	Proses penyusunan usulan kegiatan oleh KSM berdasarkan PJM Pronangkis (memastikan adanya usulan dari semua golongan dan keberpihakan pada kelompok marjinal)	Pelaksana: UP-UP BKM dan Relawan Masyarakat Peserta: KSM-KSM Fasilitator: Faskel & Relawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pengajuan usulan KSM kpd UP BKM, untuk kegiatan-kegiatan kepentingan umum (prasarana lingkungan dan pemukiman, pelatihan, sosial, dll).</li> </ul>
9	Dapat mulai setelah BLM thp 1 mulai dilaksanakan	Proses analisis kelayakan usulan KSM	Pelaksana: BKM & UP-UP. Fasilitator: Tim Fasilitator dan relawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Daftar usulan KSM yang layak, yang perlu perbaikan dan yang tidak layak.</li> </ul>
10	Dapat mulai setelah BLM thp 1 mulai dilaksanakan	Penetapan prioritas usulan yg layak melalui rembuk warga dimana yg berkepentingan diundang	Pelaksana: BKM. Peserta: Tim Verifikasi, KSM-KSM dan masyarakat Fasilitator: Relawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Daftar urutan prioritas usulan kegiatan</li> <li>o Proposal kegiatan BKM Berdaya Tahap 2 disetujui</li> </ul>
11	Dapat mulai setelah kegiatan dengan BLM thp 1 sudah 95% dilaksanakan	Verifikasi KMW terhadap kinerja tahap sebelumnya untuk rekomendasi pencairan BLM tahap 2 (60%).	Pelaksana: KMW. Fasilitator: Tenaga Ahli dan Tim Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> <li>o BKM dan masyarakat telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh dana BLM tahap berikutnya.</li> <li>o Kemajuan fisik kegiatan dan penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 95%.</li> </ul>
12	Bulan 7, minggu ke-3	Pencairan dana BLM tahap II ke rekening BKM.	Pelaksana: KPKN Fasilitator: KMW & PJOK	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Dana BLM Tahap II tersedia di rekening BKM</li> </ul>
13	Bulan 7,	Pencairan dana ke KSM/	Pelaksana: UP-	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Dana diterima oleh KSM/</li> </ul>

	minggu ke-3 dan menerus	Panitia.	BKM. Peserta: KSM-KSM/ Masyarakat Fasilitator: Relawan	panitia
14	Bulan 7, minggu ke-3 dan menerus	Pemanfaatan dana oleh KSM/ anggota sesuai usulan. (memastikan adanya partisipasi dari laki-laki dan perempuan)	Pelaksana: KSM-KSM. Fasilitator: Tim Fasilitator dan Relawan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Dana dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan dan dikelola secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh masing-masing KSM.</li> <li>o Dana dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan dan dikelola secara tranparan, partisipatif dan akuntabel oleh masing-masing KSM.</li> </ul>

Keterangan: (...huruf italic...) adalah saran-saran yang berhubungan dengan peningkatan peran perempuan sebagai bagian dari isu kesenjangan gender.

#### **TAHAP 4: PELAKSANAAN PROGRAM YANG RESPONSIF GENDER**

##### **10. Pelaksanaan Kegiatan PJM Pronangkis Berbasis IPM-MGDs**

- Pelaksanaan PJM pronangkis juga diarahkan pada perencanaan yang berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan.
- Pada tahapan pelaksanaan ini, harus dipastikan bahwa strategi yang dijelaskan mempunyai dampak pada perempuan dan laki-laki.
- Lingkup dan aspek-aspek pelaksanaan PJM Pronangkis berbasis kinerja peningkatan IPM-MDGs disajikan pada Tabel 3m, adapun langkah-langkah Pelaksanaan PJM Pronangkis Berbasis IPM-MDGs disajikan pada Tabel 3n sebagai berikut:

Tabel 3m. Lingkup dan aspek-aspek pelaksanaan PJM Pronangkis

<b>NO</b>	<b>LINGKUP</b>	<b>TAMBAHAN ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN PJM PRONANGKIS BERBASIS IPM-MDGs</b>
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Peran serta Kapasitas Pemda	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Adanya keberpihakan kepada kelompok perempuan marginal dengan melaksanakan strategi pemberdayaan perempuan dalam pengantasan kemiskinan</li> <li>o Penguatan kapasitas Pemda didasari atas kesamaan persepsi tentang pentingnya peran gender dalam pembangunan</li> </ul>
2	Pelaksanaan Kegiatan dengan pemanfaatan dana masyarakat dan stimulan BLM	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Memastikan pelaksanaan kegiatan melibatkan partisipasi semua pihak laki-laki dan perempuan dengan pendekatan pemberdayaan partisipatif</li> <li>o Pelaksanaan kegiatan harus dimonitor dan dievaluasi agar tidak menyimpang dari perencanaan</li> </ul>
3	Pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana channeling APBD dan sumberdaya lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sumber dana APBD diharapkan sudah berwawasan gender (gender responsif budgeting)</li> </ul>

Tabel 3n. Langkah-langkah Pelaksanaan PJM Pronangkis

NO	WAKTU	KEGIATAN	PELAKU	OUTPUT
1	Bulan 7, minggu ke-3 dan menerus	Pelaksanaan kegiatan PJM Pronangkis dengan berbagai sumberdaya dan dana (masyarakat, BLM pronangkis, APBD, Swasta, dll). <i>(memastikan adanya partisipasi dari laki-laki dan perempuan)</i>	Pelaksana: BKM/ UP-UP maupun KSM/ Panitia Fasilitator: Tim Fasilitator dan Relawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Minimal 25% PJM Pronangkis berbasis IPM-MDGs dapat terealisasi pada tahun pertama.</li> <li>o Terdapat minimal 30% perempuan dalam penerima manfaat pelayanan sosial.</li> <li>o Terdapat minimal 30% perempuan yang menjadi anggota KSM.</li> <li>o BKM mampu mengakses channelling ke sumberdaya lain maupun pemerintah (APBD).</li> </ul>
2	Bulan 7, minggu ke-3 dan menerus	Monitoring dan Evaluasi. <i>(memastikan sudag gender responsif budgeting)</i>	Pelaksana: BKM Fasilitator: Tim Fasilitator dan Relawan	Monitoring bersama terhadap pelaksanaan kegiatan PJM Pronangkis yang bersumber dari dana BLM, APBD maupun pihak lain (swasta).

Keterangan: (...huruf italic...) adalah saran-saran yang berhubungan dengan peningkatan peran perempuan sebagai bagian dari isu kesenjangan gender.

#### 11. Monitoring Dan Evaluasi Yang Responsif Gender

- Rencana Aksi yang sudah disusun harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan tokoh-tokohnya beserta *social capital* yang ada di daerah.
- Rencana aksi kemudian segera disosialisasikan kepada para tokoh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.
- Sosialisasi yang dilakukan pada para tokoh masyarakat merupakan bagian dari *capacity building* melalui kemitraan dengan kelompok masyarakat.
- Pendekatan dalam sosialisasi tetap mengakomodasi beberapa hal yaitu:
  - o Menghormati sosial budaya masyarakat setempat termasuk *endogenous knowledge, local wisdom* dan sebagainya.
  - o Melakukan pendekatan yang bijaksana dalam merubah *mind set* masyarakat yang berkaitan dengan perkuatan peran perempuan dalam pembangunan, khususnya pembangunan perumahan swadaya.

## Lampiran 4. Mekanisme Pengintegrasian Isu Gender ke Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat-Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK)

Tahapan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) disajikan pada lampiran ini, sedangkan keterangan yang berkaitan dengan pengintegrasian isu gender dapat dicocokkan dan dikombinasi secara detil seperti yang tercantum pada Lampiran 4 (PNPM-Mandiri-P2KP).

### 1. Diseminasi dan Sosialisasi Informasi

Diseminasi dan sosialisasi informasi pada PPK dilakukan dalam berbagai cara. Lokakarya (Workshop) dilakukan pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi untuk diseminasi informasi dan mempopulerkan program.

#### a. Musyawarah Antar Desa Pertama (MAD 1)

MAD sosialisasi merupakan pertemuan antar desa untuk sosialisasi tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal yang berkaitan dengan PNPM-PPK serta untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM-PPK.

Tabel 4a. Harapan MAD dan Sosialisasi.

HASIL MAD	PESERTA MAD
Dipahaminya informasi pokok PNPM-PPK; tujuan pentingnya RTM; dipahaminya panduan pembentukan BKAD, pola pengaduan, pola pemantauan-pemeriksaan & evaluasi, pola penyampaian informasi, panduan penyusunan RPJMDes; disepakatinya waktu perencanaan, mekanisme musyawarah antar desa, jadwal kegiatan musyawarah desa, waktu penyusunan detail desain dan RAB; tersosialisasinya rencana pembentukan UPK dan Badan pengawas UPK; dan disampaikan hasil evaluasi pelaksanaan PPK.	Camat dan staf; wakil dari seluruh instansi sektoral kecamatan (ISK); Kades di lingkungan kecamatan; BPD; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); wakil RTM dari setiap desa; wakil perempuan dari setiap desa; komite sekolah; LSM, Tokoh masyarakat dan anggota masyarakat lainnya.

- Proses Perencanaan Partisipatori pada Tingkat Dusun (Sub-Village), Desa (Village) dan Kecamatan (Sub-District). Masyarakat desa memilih fasilitator (**satu laki-laki dan satu perempuan**) yang akan membantu proses sosialisasi dan perencanaan. Fasilitator desa ini memfasilitasi pertemuan-pertemuan kecil, termasuk pertemuan kelompok perempuan secara terpisah, untuk mendiskusikan kebutuhan desa dan prioritas pembangunan desa. Masyarakat desa membuat pilihan-pilihan mengenai jenis pembangunan proyek yang ingin diusulkan. PPK menyediakan konsultan teknis

dan sosial pada tingkat kecamatan dan kabupaten untuk membantu sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan.

- a. Musyawarah Desa Ke-1 (MUSDES I), Utk Menyeleksi Fasilitator Desa, Tim Teknis. Musdes sosialisasi merupakan pertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi atau penyebaran informasi PNPM-PPK di desa.
- b. Pelatihan KPD (Kader Pemberdayaan Desa)
- c. Penggalan Gagasan: Pertemuan Kelompok + HAMLET. Penggalan gagasan adalah mengadakan pertemuan di tingkat dusun untuk membuat peta sosial kemiskinan bersama-sama dengan warga dusun setempat, terdiri atas pendataan RTM partisipatif, penyusunan peta social dan musyawarah penggalan gagasan. Adalah pertemuan kelompok masyarakat di dusun untuk menemukan gagasan-gagasan yang disampaikan masyarakat yang menjadi prioritas kebutuhan RTM yang ada kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan
- d. Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKDP) dihadiri oleh kaum perempuan dalam rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok perempuan yang merupakan aspirasi khusus dari perempuan berwujud Proposal Perempuan.
- e. Musyawarah Desa 2 (MUSDES II) Perencanaan yang merupakan pertemuan masyarakat di desa yang bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil dari proses penggalan gagasan di tingkat kelompok dan dusun.
- f. Persiapan Proposal Desa & Perempuan, Tanpa/ Dgn Desain dan Budget yang merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui sebagai usulan desa yang diajukan pada MAD.

Tabel 4b. Harapan Musyawarah Desa (Musdes) dan Sosialisasi.

HASIL Musdes	PESERTA Musdes
<p>Tersosialisasinya informasi pokok PNPM-PPK; tersosialisasinya keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah antar desa; adanya pernyataan kesanggupan desa untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan PNPM-PPK; terpilihnya pengurus TPK; disosialisasinya pola pemantauan-pemeriksaan &amp; evaluasi; ditetapkannya BPD; dibentuknya tim monitoring masyarakat; dipilihnya kader desa; disepakatinya jadwal musyawarah desa perencanaan, tersosialisasinya pola penyampaian informasi; disepakati pembuatan dan lokasi pemasangan papan informasi; dipahaminya panduan pembentukan BAKD; dan disosialisasinya pola pengaduan dan penanganan masalah.</p>	<p>Kepala desa dan aparat desa; BPD atau sebutan lainnya; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); wakil RTM desa; wakil perempuan; LSM, Tokoh masyarakat dan anggota masyarakat lainnya.</p> <p>Fasilitator : FK dan PjOK</p> <p>Pendanaan Musdes adalah swadaya desa atau masyarakat.</p>

Tabel 4c. Harapan Pelatihan KPD.

<b>HASIL PELATIHAN KPD</b>	<b>PESERTA PELATIHAN KPD</b>
<p>Dipahaminya latar belakang, tujuan, prinsip, kebijakan dan tahapan atau mekanisme PNPM-PPK serta peran dan tugas KPD; bertambahnya ketrampilan melakukan teknik-teknik fasilitasi pertemuan masyarakat dalam tahapan PNPM-PPK termasuk perencanaan desa secara partisipatif; bertambahnya kemampuan pendampingan, administrasi, penyusunan rencana kerja; dipahaminya instrumen pemetaan RTM basis dusun secara partisipatif, pola penyampaian informasi, pola penanganan pengaduan dan masalah dan pola pemantauan dan evaluasi.</p>	<p>Warga masyarakat yang dipilih dalam musyawarah desa baik laki-laki maupun perempuan.</p>

Tabel 4d. Harapan Penggalian Gagasan.

<b>PENGGALIAN GAGASAN</b>	<b>PENYUSUNAN PETA SOSIAL</b>	<b>MUSYAWARAH PENGALIAN GAGASAN</b>
<p>Adalah identifikasi jumlah dan lokasi RTM basis dusun pada setiap desa lokasi PNPM-PPK.</p>	<p>Tujuan pemetaan sosial adalah untuk memetakan rumah-rumah di dusun, kondisi geografis, sumberdaya alam, fasilitas umum, potensi desa, keadaan sosial ekonomi desa.</p>	<p>Hasil berupa dipahaminya hal-hal pokok tentang PNPM-PPK; analisis permasalahan dan penyebab kemiskinan RTM; analisis potensi dan sumberdaya lokal; gagasan-gagasan kegiatan dan visi ke depan.</p>
<p>Tujuan dari sensus dan pemetaan untuk mendapatkan kriteria dan data RTM yang mendekati sasaran program; Bermanfaat untuk digunakan sebagai aspek penilaian yang dominan dalam menentukan kelayakan suatu usulan oleh tim verifikasi usulan.</p>	<p>Hasil penyusunan peta sosial dipakai untuk dasar menggali gagasan masyarakat sesuai kebutuhan dan berguna bagi mayoritas RTM serta dapat digunakan sebagai alat bantu dalam melaksanakan dan memantau tahapan PNPM-PPK.</p>	<p>Kelompok terdiri atas warga masyarakat laki-laki atau perempuan, atau camupran yang mempunyai ikatan kelompok masyarakat.</p>
<p>Kegiatan dilakukan oleh KPD dibawah supervisi FK.</p>		

Tabel 4e. Harapan Pelatihan MKPD.

HASIL MKPD	TUJUAN METODE MKPD
<p>Ditetapkannya usulan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan; ditetapkannya usulan aspirasi perempuan lainnya; dan terpilihnya calon-calon wakil perempuan yang akan hadir di musyawarah antar desa.</p>	<p>Analisis penyebab kemiskinan bertujuan untuk mengajak perempuan mencari masalah penyebab kemiskinan yang seringkali dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menganalisis dan mencari akar permasalahan.; dan untuk</p>
<p>MKDP dilakukan untuk mendapatkan usulan dari kelompok perempuan yang dipandang berkaitan langsung dengan kondisi kemiskinan, karena perempuan seringkali merasakan sehari-hari dalam kehidupan rumah tangganya.</p>	<p>menentukan gagasan kegiatan apa saja yang diperkirakan dapat mengatasi permasalahannya dari sudut pandang kelompok perempuan.</p>

Tabel 4f. Harapan Muiyawah Desa Perencanaan..

HASIL Musdes PERENCANAAN	PESERTA Musdes Perencanaan
<p>Tersusunnya peta sosial desa; ditetapkannya satu usulan kegiatan sarana prasarana dasar (kesehatan atau pendidikan); disahkan usulan kegiatan hasil keputusan musyawarah khusus perempuan; ditetapkannya usulan-usulan kegiatan yang akan diajukan pendanaannya melalui sumber dana lainnya (swadaya, pendapatan desa, APBD Kabupaten, ADD); terpilih dan ditetapkannya TPU, terpilihnya minimal satu orang yang akan diusulkan menjadi calon pengurus UPK; terpilihnya wakil-wakil desa yang akan hadir dalam musyawarah antar desa prioritas usulan 6 orang (kepala desa, ketua TPK, dan 4 orang wakil masyarakat; minimal 3 dari 6 wakil tersebut perempuan); disetujuinya keikutsertaan dalam pembentukan BKAD.</p>	<p>Kepala desa dan aparat desa. BPD. LPM. Wakil RTM Desa. Wakil Perempuan. LSM. Tokoh masyarakat, tokoh agama.</p>



Tabel 4g. Harapan Penulisan Usulan Desa (Proposal).

HASIL PENULISAN PROPOSAL	TIM PENULISAN PROPOSAL
Dokumen proposal usulan kegiatan desa yang disetujui dalam musyawarah desa perencanaan dan musyawarah desa khusus perempuan, termasuk data dan isian formulir pendukungnya.	Proses dilakukan oleh TPU yang telah dipilih dalam forum musyawarah desa perencanaan.
Pengajuan proposal desa harus disertai dengan desain sederhana, yaitu berupa gambaran dari usulan kegiatan secara umum dengan perkiraan besaran biayanya. Desa juga dapat mengajukan proposal dengan dilengkapi detail desain dan rencana Anggaran Biaya (RAB).	Sebelum melakukan penulisan, TPU akan mendapatkan pelatihan dari FK dan atau FT.

6. Seleksi Proyek pada Tingkat Desa dan Kecamatan

Masyarakat bertemu pada lokakarya tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan proposal mana yang harus didanai. Pertemuan ini bersifat terbuka untuk seluruh anggota masyarakat dalam rangka mengusulkan proyek. Kemudian Forum Desa yang terdiri dari representatif masyarakat desa yang terpilih membuat keputusan akhir atas proyek yang didanai.

- a. Kunjungan Verifikasi & Fisibilitas
- b. (Umpan Balik ke Penduduk Desa)
- c. Musyawarah Antar Desa 2 (MAD II) Utk Merangking Proposal Proyek Desa
- d. Fasilitator Kecamatan dan Tenaga Teknis Membantu Mempersiapkan Desain dan Budget untuk proposal yang Diprioritaskan
- e. Musyawarah Antar Desa 3 (MAD III) Utk Menyeleksi Proyek Desa utk Didanai

7. Masyarakat Desa Melaksanakan Projeknya Sendiri

Forum masyarakat desa memilih anggota-anggota untuk menjadi bagian dari Tim Pelaksana untuk mengelola proyek. Fasilitator Teknis PPK membantu Tim Pelaksana Desa untuk mendisain infrastruktur, pendanaan proyek, kualitas, verifikasi dan supervisi. Para pekerja dipekerjakan terutama dari desa penerima proyek.

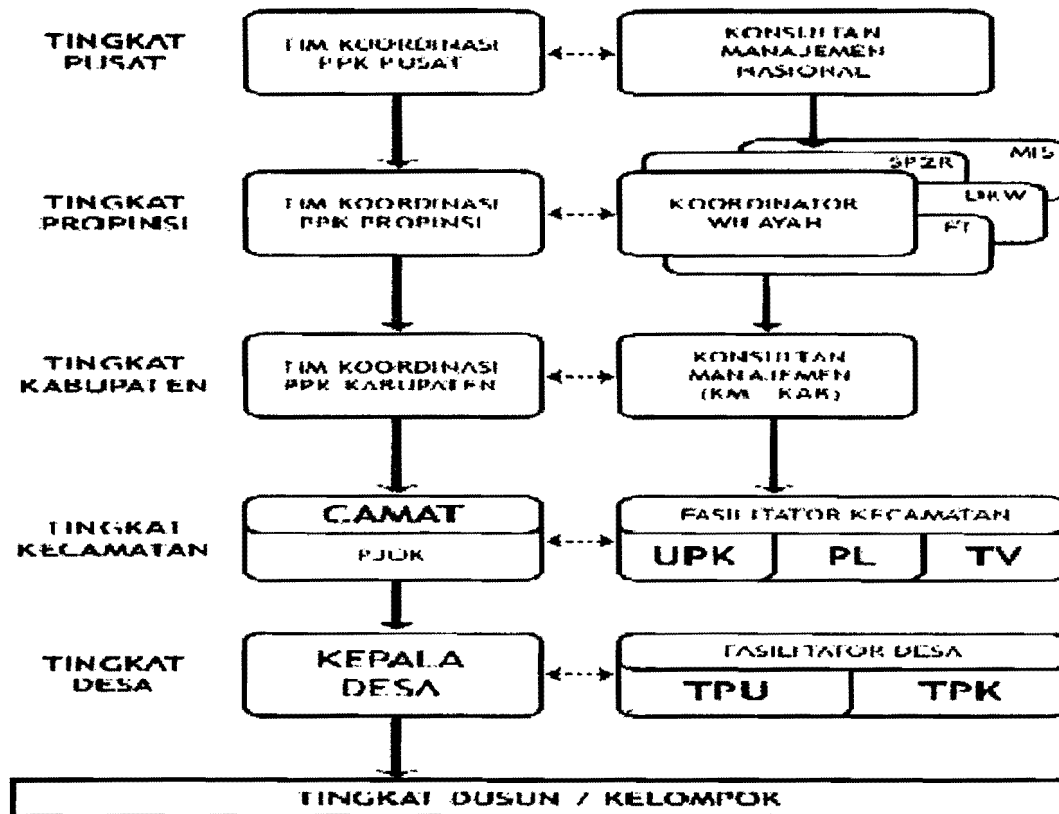
- a. Musyawarah Desa 3 (MUSDES III) Utk Mendiskusikan Hasil MAD III dan Bentuk Tim Desa Utk Melaksanakan Proyek dan
- b. Memonitor Aktivitas
- c. Persiapan Pelaksanaan (RECRUITMENT Pekerja Desa, Gaji/Upah)
- d. Mengeluarkan Dana & Pelaksanaan Aktivitas

**8. Akuntabilitas dan Laporan Pelaksanaan**

Selama implementasi, Tim Pelaksana harus melaporkan perkembangan proyek sebanyak dua kali didepan pertemuan desa. Pada pertemuan terakhir, Tim Pelaksana menyerahkan laporan proyek ke Desa dan panitia pemeliharaan dan operasi desa.

- a. Musyawarah Desa utk Menghitung Dana (2X MIN)
- b. Supervisi dari Pelaksanaan, Kunjungan Antar Desa Bertukar
- c. Musyawarah Desa utk Menyelesaikan Pekerjaan dan Menghitung Seluruh Dana yang Dibelanjakan
- d. Pemeliharaan Pekerjaan & Pembayaran
- e. Workshop Kabupaten & Propinsi

## Struktur Manajemen PPK



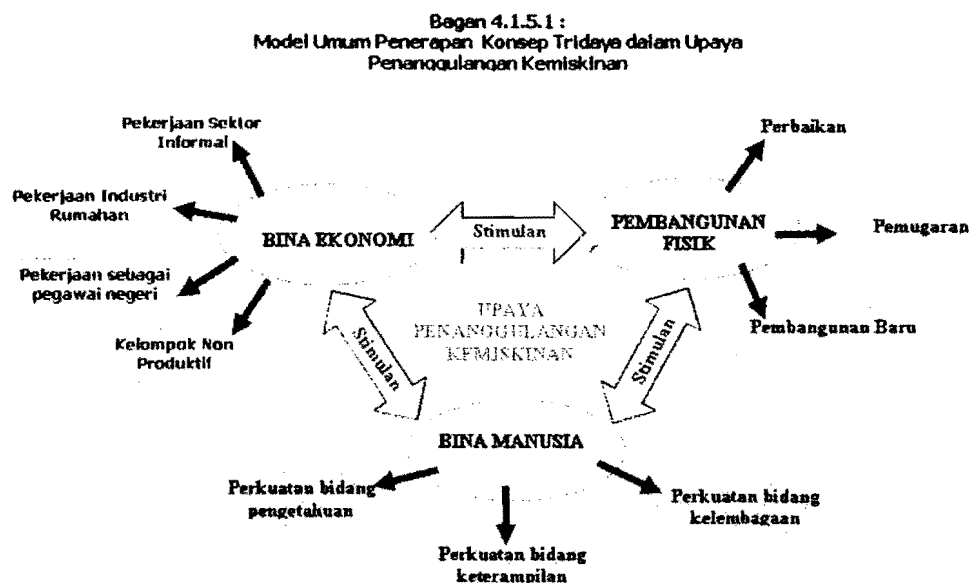
### Keterangan:

MIS: Management Information Specialist  
 SP2R: Spesialis Penanganan Pengaduan Regional  
 DKW: Deputi Koordinator Wilayah  
 FT: Fasilitator Training  
 KM-Kab: Konsultan Manajemen Kabupaten

PjOK: Penanggung Jawab Operasional Kegiatan  
 UPK: Unit Pengelola Kegiatan  
 PL : Pendamping Lokal  
 TV : Tim Verifikasi  
 TPU : Tim Penulis Usulan  
 TPK : Tim Pelaksana Kegiatan

## Mekanisme Pengintegrasian Isu Gender dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pelaksanaan PPK dengan Menjunjung Prinsip Tri-Bina

Strategi pengintegrasian isu gender ke dalam pelaksanaan PPK dapat dilakukan melalui penerapan konsep Tridaya, yaitu pembangunan yang menyeluruh meliputi bina ekoomi, sosial dan fisik lingkungan. Hal ini berdasar pada asumsi bahwa yang paling utama untuk menanggulangi lemahnya akses kelompok perempuan berpenghasilan rendah atau bahkan tidak produktif adalah perkuatan dalam bidang ekonomi berupa stimulan untuk bina usaha. Sejalan dengan itu, dilakukan pula bina kapasitas perempuan dalam bentuk meningkatkan keterampilan dan keahlian yang sifatnya melembaga untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang usaha. Melalui bina usaha dan bina kapasitas manusianya, diharapkan perempuan juga dapat berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan fisik di sekitarnya.



## Lampiran 5. Daftar Istilah dan Singkatan.

1. ADD : Alokasi Dana Desa
2. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
3. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
5. BBM : Bahan Bakar Minyak
6. BAPPUK : Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan
7. BI : Bank Indonesia
8. BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat
9. BLM : Bantuan Langsung Masyarakat
10. BOP : Biaya Operasional
11. BPD : Badan Perwakilan Desa
12. BPKP : Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
13. CSR : *Corporate Social Responsibility*
14. Dokumen SPK-D : Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah
15. DPT : Diskusi Partisipatif Terpadu
16. Depdagri : Departemen Dalam Negeri
17. Dep. Keu : Departemen Pekerjaan Umum
18. Dep. PU : Penyelenggara Program
19. DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
20. Dirjen : Direktur Jenderal
21. Ditjen : Direktorat Jenderal
22. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
23. Executing Agency : Penyelenggara Program
24. Fasilitator : Tenaga Pengembangan Masyarakat P2KP
25. FGD : *Focussed Group Discussion*/ Diskusi Kelompok Terarah
26. FKA-BKM : Forum Komunikasi Antar BKM Tingkat Kota/ Kabupaten
27. Gender : Asumsi atau bentukan oleh masyarakat atas peran, tanggung-jawab serta perilaku laki-laki dan perempuan yang dipelajari dan dapat berubah dari waktu ke waktu serta bervariasi menurut budaya.
28. IPM : Indeks Pembangunan Manusia
29. Kelompok peduli : Kelompok yang memberikan perhatian atau memiliki kepentingan terhadap suatu kegiatan tertentu.
30. KBK : Komunikasi Belajar Kelurahan
31. KBP : Komunikasi Belajar Perkotaan
32. KE : Konsultasi Evaluasi
33. KMP : Konsultan Manajemen Pusat
34. KMW : Konsultan Manajemen Wilayah
35. Korkot : Koordinator Kota, KMW
36. KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
37. KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat

38. Litbang : Penelitian & Pengembangan
39. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
40. Masyarakat Mandiri : Masyarakat yang mampu mengelola potensi yang ada dalam dirinya atau lingkungannya sehingga menghasilkan nilai lebih, dan bukan masyarakat yang pasif atau hanya menggantungkan kehidupannya dengan mengharap pemberian bantuan dari pemerintah atau masyarakat lainnya.
41. MDGs : Millenium Development Goals
42. Musrenbang : Musyawarah Rencana Pembangunan
43. ND : *Neighborhood Development*, Pembangunan Lingkungan Pemukiman Kelurahan
44. NOL : *No Objection Letter*
45. PDMDKE : Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi
46. P3A : Perkumpulan Petani Pemakai Air
47. P2DTK : Program Pengembangan Daerah Tertinggal dan Khusus
48. PPIP : Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan
49. PPK : Program Pengembangan Kecamatan
50. P2KP : Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
51. PAKET : Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
52. PAMSIMAS : Program air Minum dan sanitasi Masyarakat
53. PBL : Penataan Bangunan dan Lingkungan
54. Pembangunan Sektoral : Kegiatan pelayanan yang diwujudkan dalam investasi anggaran maupun regulasi yang diselenggarakan oleh kementerian/ lembaga, dinas sektor.
55. Pembangunan Kewilayahan : Pembangunan yang diselenggarakan pada wilayah tertentu di daerah yang diorientasikan pada pengembangan potensi lokal wilayah tersebut.
56. Pembangunan Partisipatif : Pembangunan yang melibatkan secara aktif komponen masyarakat dan dunia usaha guna mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
57. Pemberdayaan Masyarakat : Upaya menumbuhkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*), sehingga memiliki akses dan kemampuan untuk mengambil keuntungan timbal balik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.
58. PISEW : Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah
59. PJM : Program Jangka Menengah
60. PJOK : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
61. PK : Pembuat Komitmen

62. Pej.PK	: Pejabat Pembuat Komitmen
63. PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
64. PMD	: Pemberdayaan Masyarakat Desa
65. PMT	: Program Manager Team
66. PNPMMandiri Mandiri	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
67. PPM	: Penanganan Pengaduan Masyarakat
68. PRONANGKIS	: Program Penanggulangan Kemiskinan
69. PS	: Pemetaan Swadaya
70. PU	: Pekerjaan Umum
71. Relawan	: Warga setempat yang peduli membantu warga miskin di wilayahnya tanpa pamrih
72. Renja	: Rencana Kerja
73. Renta	: Rencana Tahunan
74. RISE	: <i>Regional Infrastructure for Social Economic</i>
75. RK	: Refleksi Kemeskinan
76. RKM	: Rembug Kesiapan Masyarakat
77. RT/RW	: Rukun Tetangga/ Rukun Warga
78. SA	: <i>Special Account</i> (Rekening Khusus)
79. SATKER-P2KP	: Satuan Kerja program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
80. SE-DJP	: Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
81. SIM	: Sistem Informasi Manajemen
82. SKS	: Satuan Kerja Sementara
83. SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab Terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di bidang Tertentu di daerah provinsi, kabupaten/kota.
84. SNPK	: Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan
85. SNVT	: Satuan Kerja Non Vertikal di Tingkat Propinsi
86. SOP	: Standard Operational Procedures
87. SPADA	: <i>Support for Poor and Disadvantage Areas</i>
88. SP2D	: Surat Perintah pencairan Dana
89. SPM	: Surat Perintah Membayar
90. SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
91. SPPB	: Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan
92. SPPN	: Sistem perencanaan Pembangunan Nasional
93. SPPP	: Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan
94. Subak	: Organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem Pengairan sawah yang digunakan dalam cocok tanam Padi di Provinsi bali.
95. Susenas	: Survey Sosial Ekonomi Nasional
96. SWK	: Satuan Wilayah Kerja
97. TA	: <i>Technical Assistance</i>
98. TIM INTERDEP	: Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Antar Departemen Terkait di Tigkat Nasional

99. TKPP : Tim Koordinasi Pelaksanaan P2KP (Tingkat Propinsi dan Kota/ Kabupaten)
100. TKPK : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
101. TKPK-D : Tim Komite Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (Tingkat propinsi atau Kota/ Kabupaten)
102. UKM : usaha Kecil Menengah
103. UP : Unit Pengelola yang dibentuk BKM
104. UPK : Unit pengelola Keuangan
105. UPL : Unit Pengelola Lingkungan
106. UPS : Unit Pngelola Sosial
107. UPP : *Urban Poverty Project (P2KP)*
108. WB : *World Bank*



## Lampiran 6. Perkuatan Perempuan dalam Pengembangan Ekonomi Keluarga di Bidang Pekerjaan *On-Farm*, *Off-farm* dan *Non-Farm*.

Dalam bagian ini akan dikemukakan bidang pekerjaan yang dapat dilakukan oleh perempuan pada berbagai bidang pekerjaan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

### 1. *ON FARM*

Pengertian *On Farm* adalah seluruh kegiatan yang dilakukan di bidang pertanian di mana kegiatan tersebut dilaksanakan di ladang di sawah, atau di kebun secara langsung. Pada dasarnya perempuan dapat melakukan seluruh kegiatan-kegiatan pada *On Farm* ini, namun kegiatan-kegiatan yang akan diuraikan di sini adalah yang umumnya dilakukan oleh perempuan dan telah biasa dilakukan oleh perempuan.

Di bawah ini akan diuraikan kegiatan *On Farm* yang dilakukan oleh kaum perempuan sesuai dengan berbagai pendekatan komoditas:

- a. Tanaman pangan,
- b. Perkebunan,
- c. Perikanan,
- d. Peternakan dan
- e. Kehutanan.

#### a. **Tanaman Pangan.**

Tanaman pangan terdiri dari tanaman padi, palawija, hortikultura, dan buah-buahan. Pada tanaman padi, pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan yang dominan adalah pada saat tanam, pemeliharaan (penyiangan), dan panen. Ketiga jenis pekerjaan ini banyak memerlukan tenaga kerja. Pada pemupukan, sering juga dibantu oleh tenaga kerja perempuan. Sedangkan pada jenis pekerjaan tanaman palawija adalah utamanya pada saat penyiangan dan panen.

Tanaman hortikultura utama di dataran tinggi adalah kubis, kentang dan wortel dan di dataran rendah adalah bawang merah dan cabe. Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh perempuan adalah pada saat pemeliharaan dan panen. Khususnya pada tanaman cabe, panen memerlukan tenaga kerja yang relatif besar dan juga diperlukan dalam frekuensi yang besar juga karena cabe tidak dapat dipanen sekaligus namun berangsur-angsur hingga mencapai sekitar satu bulan.

Buah-buahan biasanya ditanam di pekarangan atau di kebun petani. Jenis buah-buahan yang ditanam beragam disesuaikan dengan kondisi agroklimat, seperti di Jawa Timur pohon mangga dominan, sedangkan di Jawa Barat durian dan alpukat. Pada saat buah-buahan tersebut masih muda, perempuan banyak membantu pada pemupukan dan pemeliharaan. Namun biasanya setelah tanaman berbuah, perempuan membantu panen.

Program/ aktivitas ekonomi perempuan yang dapat dilakukan pada tanaman pangan – *on-farm* adalah:

- Budidaya tanaman pangan padi
- Budidaya tanaman pangan palawija

- Budidaya sayuran dan hortikultura

#### **b. Perkebunan**

Di bidang perkebunan, kaum perempuan biasanya membantu pemupukan, pemeliharaan dan panen. Program/ aktivitas ekonomi perempuan yang dapat dilakukan pada perkebunan – *on-farm* adalah:

- Budidaya tanaman perkebunan
- Budidaya mixed-cropping (tumpang sari) tanaman pangan dan tanaman tahunan.

#### **c. Perikanan**

Di bidang perikanan, pekerjaan yang banyak membutuhkan waktu adalah pemberian pakan dan pengawasan terhadap kesehatan ikan. Program/ aktivitas ekonomi perempuan yang dapat dilakukan pada perikanan – *on-farm* adalah:

- Budidaya perikanan air tawar
- Budidaya perikanan air laut
- Budidaya tumpang sari perikanan dan tanaman pangan
- Budidaya tumpang sari perikanan dan tanaman perkebunan

#### **d. Peternakan**

Di bidang peternakan, pekerjaan yang banyak membutuhkan waktu adalah pemberian pakan dan pengawasan terhadap kesehatan ternak. Program/ aktivitas ekonomi perempuan yang dapat dilakukan pada peternakan – *on-farm* adalah:

- Budidaya peternakan unggas
- Budidaya peternakan ternak kecil
- Budidaya peternakan ternak besar
- Budidaya tumpang sari peternakan, perikanan dan tanaman pangan
- Budidaya tumpang sari peternakan, perikanan dan tanaman perkebunan

#### **e. Kehutanan**

Di bidang kehutanan, khususnya pada hutan rakyat, kaum perempuan biasanya membantu pemupukan, pemeliharaan tanaman dan panen, khususnya pada jenis tanaman hutan damar. Berdasarkan uraian di atas, banyak kegiatan yang dilakukan oleh perempuan di sektor pertanian On Farm. Bahkan pada kenyataannya, banyak dijumpai pekerjaan yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan seperti pada saat pemeliharaan dan panen. Juga banyak dijumpai kaum perempuan meskipun tidak membantu secara langsung di kebun, namun membantu menyediakan makan bagi para pekerja. Program/ aktivitas ekonomi perempuan yang dapat dilakukan pada kehutanan – *on-farm* adalah:

- Budidaya tanaman keras
- Budidaya tumpang sari perkebunan, peternakan, perikanan dan tanaman pangan
- Budidaya tumpang sari perkebunan, peternakan, perikanan .

## 2. OFF FARM

Pengertian Off Farm adalah seluruh kegiatan yang dilakukan di bidang pertanian, namun kegiatan tersebut dilaksanakan bukan di ladang di sawah, atau di kebun secara langsung. Kegiatan Off Farm meliputi pangolahan hasil (pasca panen) dan pemasaran. Pengolahan hasil dari yang sederhana (misalnya padi menjadi beras) hingga yang paling rumit (misalnya buah tandan sawit menjadi minyak sawit). Sedangkan pemasaran, dari yang sederhana (misalnya sortasi dan pembungkusan) sampai yang paling rumit (misalnya sortasi, pembungkusan dan pemasaran ke perusahaan).

Kegiatan Off Farm sangat bergantung pada jenis komoditi dan pasar yang akan dimasuki. Namun pada dasarnya perempuan dapat melakukan seluruh kegiatan-kegiatan pada Off Farm ini. Di bawah ini akan diuraikan sesuai dengan berbagai pendekatan komoditas (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan).

### a. Tamanan Pangan.

Tanaman padi, kegiatan *off farm* biasanya pada pengeringan gabah, sampai pada penggilingan padi. Biasanya kaum perempuan banyak membantu. Begitu juga pada tanaman palawija, seperti pada tanaman jagung, kacang kedele dan kacang hijau biasanya kaum perempuan membantu mengeringkan hasil panen dan kemudian menjualnya ke pedagang tengkulak.

Tanaman hortikultura belum banyak memerlukan penanganan pasca panen, kecuali cabe dan bawang merah. Pada saat panen raya, di mana harga cabe jatuh, biasanya cabe dikeringkan dan digiling, sedangkan bawang merah biasanya dikeringkan dan dapat disimpan sampai beberapa bulan.

Buah-buahan biasanya dijual dalam bentuk segar dan hanya dilakukan sortasi dan pengepakan. Banyak juga dijumpai petani menjual buah sebelum panen (disebut juga dengan cara ijon) kepada pedagang. Kalau cara ijon, biasanya panen dan sortasi dilakukan oleh pedagang. Program/ aktivitas ekonomi perempuan yang dapat dilakukan pada tanaman pangan – *off-farm* adalah:

- Pemasaran beras
- Pengolahan pasca panen (padi menjadi beras, tepung beras, tepung ketan)
- Pengolahan sayuran dan buah-buahan (menjadi asinan, buah-buahan kering, tepung wortel, tepung jeruk, juice buah, dll)
- Pembuatan jamu dari tanaman obat .
- Membuat kue-kue dan makanan.

### b. Perkebunan

Di bidang perkebunan, khususnya pada perkebunan rakyat, tidak banyak kegiatan pasca panen yang dilakukan. Biasanya setelah panen dijual atau dikirimkan langsung untuk diolah. Namun pada komoditas karet, kaum perempuan biasanya membantu pengolahan dari getah karet menjadi karet remah. Program/ aktivitas ekonomi perempuan yang dapat dilakukan pada tanaman perkebunan – *off-farm* adalah:

- Pengolahan tanaman perkebunan (minyak kelapa, minyak kayu putih, madu, VCO, dll)
- Pembuatan tenun dan kerajinan tangan dari sutera, serat-serat tanaman.

- Pembuatan warna untuk bahan tenun dari akar mengkudu, daun nila, dan sebagainya.

#### **c. Perikanan**

Di bidang perikanan, khususnya pada perikanan tangkap, kegiatan pengolahan ikan, seperti pengeringan, pengasapan dan pembuatan dendeng ikan banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Program/ aktivitas ekonomi perempuan yang dapat dilakukan pada perikanan – *off-farm* adalah:

- Pengolahan pasca panen perikanan (ikan asin, tepung ikan, kerupuk udang, ebi, abon)
- Pengolahan pengalengan hasil-hasil perikanan.
- Membuat kue-kue dan makanan dari hasil-hasil pengolahan perikanan.

#### **d. Peternakan**

Di bidang peternakan, khususnya pada ternak unggas, banyak kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan adalah membersihkan bulu ayam dan pengolahan daging sapi, seperti dibuat dendeng dan kerupuk kulit. Program/ aktivitas ekonomi perempuan yang dapat dilakukan pada peternakan – *off-farm* adalah:

- Pengolahan pasca panen peternakan (susu, yogurt, keju, krupuk susu)
- Pengolahan pengalengan hasil-hasil peternakan (kornet, sosis).
- Membuat kue-kue dan makanan dari hasil-hasil pengolahan peternakan.

#### **e. Kehutanan**

Di bidang kehutanan, khususnya pada hutan rakyat, kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam pengolahan hasil hutan umumnya membantu pengolahan hasil (pengeringan) hasil hutan. Program/ aktivitas ekonomi perempuan yang dapat dilakukan pada hasil-hasil kehutanan – *off-farm* adalah:

- Pengolahan pasca panen kehutanan (tikar, furniture rotan/ kayu)
- Menjual kerajinan dari hasil-hasil pengolahan produk kehutanan (patung, lukisan, dll).

Berdasarkan uraian di atas, banyak kegiatan yang dilakukan oleh perempuan di sektor pertanian Off Farm. Umumnya pekerjaan yang dilakukan oleh kaum perempuan adalah pengeringan, sortasi dan pengolahan.

### **3. NON FARM**

Kegiatan Non Farm adalah seluruh kegiatan di luar sektor pertanian. Program/ aktivitas ekonomi perempuan yang dapat dilakukan pada kegiatan *non-farm* adalah:

- Penjualan jasa di bidang telekomunikasi dan informasi (warnet, wartel, jual pulsa)
- Jasa salon dan perawatan tubuh (pria dan wanita).
- Jasa pemasaran produk secara angsuran.

- Jasa kursus menjahit, perawatan tubuh dan kecantikan.
- Jasa rias pengantin.
- Menjual makanan (warung nasi, rumah makan).
- Menerima pesanan makanan (jasa catering).
- Menjual kebutuhan sehari-hari (toko serba ada di rumah).
- Jasa antar jemput sekolah.
- Dan kegiatan lainnya.

Masyarakat adalah pelaku utama PNPM-PPK mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Pelaku-pelaku PNPM mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten disajikan pada Tabel 1a sampai 1 c.

Tabel 1a. Pelaku PNPM-PPK di Desa.

NO	PELAKU	PERAN/ FUNGSI
1	Kepala Desa (Kades)	Berperan sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM-PPK di desa; bersama BPD menyusun peraturan desa yang mendukung pelebagaan prinsip dan prosedur PNPM-PPK sebagai pola pembangunan partisipatif; mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau kerjasama antar desa.
2	BPD (Badan Permusyawaratan Desa) atau sebutan lainnya	Berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM-PPK, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian di desa; melegalisasi peraturan desa yang berkaitan dengan pelebagaan dan pelestarian PNPM-PPK di desa.
3	TPK (Tim Penggerak Kegiatan)	TPK terdiri atas anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa; berperan untuk mengelola dan melaksanakan PNPM-PPK; Ketua sebagai penanggungjawab operasional kegiatan di desa, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dan pengelolaan administrasi serta keuangan program; Sekretaris dan Bendahara adalah membantu Ketua TPK terutama dalam masalah administrasi dan keuangan.
4	TPU (Tim Pengusul Usulan)	TPU terdiri atas anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; berperan untuk menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang ditatahkan dalam musyawarah desa dan musyawarah khusus perempuan.
5	Tim Pemantau	Tim Pemantau berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah; Berperan memantau pelaksanaan kegiatan yang ada di desa.
6	Tim Pemelihara	Tim Pemelihara berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah; Berperan memelihara hasil-hasil yang ada di desa. Hasil laporan pemeliharaan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa, dengan dukungan dana yang berasal dari swadaya masyarakat setempat.
7	KPD (Kader Pemberdayaan Desa)	KPD berasal dari anggota masyarakat yang terpilih; Berperan untuk memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM-PPK di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan; Jumlah KPD minimal dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan atau jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peranserta kaum perempuan.

Tabel 1b. Pelaku PNPMP-PPK di Kecamatan.

NO	PELAKU	PERAN/ FUNGSI
1	Camat	Berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPMP-PPK oleh desa-desa di wilayah kecamatan; Membuat surat penetapan camat tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati musyawarah antar desa untuk didanai melalui PNPMP-PPK.
2	Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK)	PjOK adalah sebagai Kasi pemberdayaan masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPMP-PPK di kecamatan.
3	Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PjAK)	PjAK adalah seorang aparat di kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan administrasi kecamatan.
4	Tim Verifikasi (TV)	TV adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, baik di bidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan dan pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam musyawarah desa kedua; Berperan melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta PNPMP-PPK dan membuat rekomendasi kepada musyawarah antar desa sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
5	UPK	Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan PNPMP-PPK di tingkat antar desa termasuk mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara yang berasal dari masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa.
6	BP-UPK	BP-UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh UPK. BP-UPK dibentuk melalui Musyawarah Antar Desa, minimal 3 orang terdiri dari ketua dan anggota.
7	Fasilitator Kecamatan (FK) / Teknik (FT)	FK/FT merupakan pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PNPMP-PPK yang berperan dalam memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan, dimulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian; Berperan untuk membimbing kader-kader desa tau pelaku-pelaku PNPMP-PPK di desa dan kecamatan.
8	Pendamping Lokal (PL)	Pendamping lokal adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu FK untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian; Di setiap kecamatan akan ditempatkan minimal satu orang pendamping lokal.
9	Tim Pengamat	Tim pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau dan mengamati jalannya proses musyawarah antar desa serta membuat rekomendasi/ saran agar dapat berlangsung secara partisipatif.
10	Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil PKK yang terdiri dari kelembagaan UPK, prasarana sarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan dan perguliran dana; Berperan merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam bidang mikro finansial, pelayanan program dan pelayanan usaha kelompok.
11	Setrawan Kecamatan	Diutamakan dari PNS di lingkungan kecamatan yang dibekali kemampuan khusus untuk melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di lingkungan komunitas dan perubahan tata pemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif.

Tabel 1c. Pelaku PNPB-PPK di Kabupaten.

NO	PELAKU	PERAN/ FUNGSI
1	Bupati	Merupakan pembina TK PNPB-PPK Kabupaten; penanggungjawab atas pelaksanaan operasional dan administrasi kegiatan di tingkat kabupaten, termasuk bersama DPRD untuk melakukan kaji ulang terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan pengaturan desa sesuai komitmen awal yang telah disepakati.
2	Tim Koordinasi PNPB-PPK Kabupaten (TK PNPB-PPK Kab)	Dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan pen gembangan peranserta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program; berfungsi untuk memberikan dukungan koordinasi program antar instansi, pelayanan dan proses administrasi di tingkat kabupaten.
3	Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PjOKab)	Seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati, yang mempunyai tugas pokok sejenis di kabupaten yang berperan sebagai pelaksana harian TK PNPB-PPK Kabupaten
4	Penanggungjawab Administrasi Kabupaten (PjAKab)	Seorang pejabat di lingkungan Badan pemberdayaan masyarakat atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati, yang mempunyai tugas pokok sejenis di kabupaten yang berperan sebagai penyelenggara administrasi Kabupaten.
5	Konsultan Manajemen Kabupaten (KM Kab)	Tenaga konsultan profesional yang berkedudukan di tingkat kabupaten; berperan sebagai supervisor atas pelaksanaan tahapan PNPB-PPK di lapangan yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan; Memastikan setiap tahapan pelaksanaan PNPB-PPK dapat selesai dengan baik; Berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan teknis kepada pelaku PNPB-PPK di kecamatan dan desa; Mendorong munculnya forum lintas pelaku sebagai media pembelajaran pemberdayaan masyarakat; Melakukan koordinasi dengan TK PNPB-PPK Kabupaten.
6	Konsultan Manajemen Teknik (KMT)	KMT berkedudukan di tingkat kabupaten; berperan sebagai supervisor atas hasil kualitas teknik kegiatan prasarana infrastruktur pedesaan, mulai dari perencanaan desain, PAB, survei dan pemetaan, pelaksanaan serta operasional dan pemeliharaan. KMT harus memastikan pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur selesai dengan baik, tepat waktu, dan tetap mengacu kepada prinsip prosedur PNPB-PPK serta sesuai dengan kaidah dan standar teknik prasarana.
7	Pendamping UPK	Konsultan yang bertugas melakukan pendampingan UPK dan lembaga pendukung menjadi suatu lembaga yang akuntabel secara kelembagaan; Pendampingan yang diberikan dalam aspek pengelolaan keuangan dan pinjaman, aspek penguatan kelembagaan, serta aspek penguatan jaringan kerjasama.
8	Setrawan Kabupaten	Adalah PNS di lingkungan pemerintah kabupaten yang dibekali kemampuan khusus untuk melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di lingkungan kecamatan dan perubahan tata pemerintahan dan perubahan tata pemerintahan, mengkoordinasi dan memfasilitasi setrawan kecamatan, serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif.



Tabel 1d. Pelaku PNPM-PPK Lainnya.

NO	PELAKU	PERAN/ FUNGSI
1	Gubernur	Sebagai pembina dan penanggungjawab pelaksanaan PNPM-PPK di tingkat provinsi
2	TK PNPM-PPK Propinsi	Tim yang dibentuk oleh gubernur yang berperan dalam melakukan pembinaan administrasi dan perantara masyarakat serta memberikan dukungan pelayanan dan proses administrasi di tingkat provinsi.
3	Penanggungjawab Operasional Propinsi (PjOProv)	Adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan desa atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di Propinsi yang berperan sebagai pelaksana garian TK PNPM-PPK Propinsi, PjOProv ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.
4	Konsultan Manajemen Propinsi	Dipimpin oleh seorang koordinator dengan didukung oleh beberapa staf profesional.
5	Tim Koordinasi PNPM-PPK Nasional (TK PNPM-PPK Nasional)	Berperan dalam melakukan pembinaan kepada TK PNPM-PPK di Provinsi dan kabupaten yang meliputi pembinaan teknis dan administrasi.
6	Sekretariat Nasional PNPM-PPK	Didukung oleh beberapa staf profesional dengan fungsi dan perannya menjaga proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM-PPK secara nasional agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM-PPK; melakukan supervisi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, pengendalian secara fungsional terhadap fasilitator dan konsultan serta memberikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan dalam PNPM-PPK.

Gambar 3c berikut ini menyajikan aliran dana budget Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Pengintegrasian konsep gender ke dalam dana budget disebut sebagai "Gender Budgeting" atau anggaran responsif gender (Gender Responsive Budgeting (GRB)). Konsep GRB ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan agar anggaran pemerintah mendukung kesetaraan dan keadilan gender:
  - a. Memastikan bahwa anggaran, kebijakan, serta program yang disusun pemerintah mempertimbangkan kepentingan individual berbagai kelompok sosial.
  - b. Mempertimbangkan kelompok yang terpinggirkan karena status etnis, kasta, kelas sosial dan kemiskinan, lokasi geografi, dan usia dengan memberi perhatian bagaimana anggaran berdampak pada mereka yang paling tidak beruntung dan terpinggirkan.
  - c. Mempertimbangan adanya perbedaan dan persamaan kebutuhan laki-laki dan perempuan.
2. Bukanlah persoalan memisahkan anggaran antara laki-laki dan perempuan atau melihat perbandingan antara jumlah alokasi dana antara laki-laki dan perempuan tanpa mempunyai suatu makna dan tujuan, namun GRB lebih menyangkut penggunaan dana yang mengikuti penerapan konsep pengarusutamaan gender (PUG) dengan memastikan adanya kesadaran menanggulangi kesenjangan gender pada kehidupan di masyarakat dari berbagai aspek (sosial, ekonomi, politik, dan budaya).
3. GRB tidak memaknai alokasi dana 50:50 untuk laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memaknai adanya persamaan dan perbedaan kebutuhan. Di Bidang ekonomi misalnya,
  - a. Kebutuhan laki-laki dan perempuan sebagai manusia mempunyai persamaan, yaitu kebutuhan pokok akan sandang, pangan, dan papan. Namun karena adanya pembagian peran dalam keluarga yang cenderung didasari oleh sistem patriarki, dimana laki-laki sebagai kepala keluarga yang berperan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang berperan sebagai pengasuh anak dan pemelihara rumah, maka seperti perempuan tidak dibutuhkan perannya sebagai pencari nafkah.
  - b. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing mempunyai kompetensi, keahlian, ketrampilan, motivasi, dan keinginan untuk mengaktualisasikan dirinya. Untuk itu perlu alokasi dana yang berbeda antara pemberdayaan laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi. Perempuan yang mempunyai kompetensi namun belum mendapat kesempatan memaksimalkan fungsi ekonominya, maka pemerintah dapat mengalokasikannya dananya untuk memfasilitasi kaum perempuan yang berkeinginan untuk mencari penghasilan.
4. Gender *Budgeting*, yaitu dukungan anggaran terhadap proyek/kegiatan yang telah disusun tersebut, hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: